

Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum

HUKUM ISLAM



Judul :
HUKUM ISLAM

Penulis :
Dr. Paisal Burlian, SH, M.Hum

ISBN : 978-602-1153-77-2

Layout :
Okti Martilawati, SE

Layout Cover :
Rohadi Wijaya

Copyright@2017 Tunas Gemilang Press
hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau
memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, secara elektronik
atau mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan teknik perekaman lain,
tanpa seizin tertulis dari penerbit

@Diterbitkan Oleh :
TUNAS GEMILANG PRESS
Perumnas Talang Kelapa Blok IV No. 4 Kec. Alang-alang Lebar Palembang Phone
: 0852 7364 4075 - (0711) 5645995
Email : tunas_gemilang@ymail.com

@Dicetak Oleh :
PERCETAKAN TUNAS GEMILANG
Perumnas Talang Kelapa Blok IV No. 4 Kec. Alang-alang Lebar Palembang
Phone : 0852 7364 4075 Email : tunas_gemilang@ymail.com

4. Hutang Piutang	183
5. Pinjam Meminjam	195
6. Bagi Hasil (Qiradh)	198
7. Pemberian	201

BAB VII JINAYAT	215
1. Pengretian Jinayat	215
2. Kitab Jinayat	215
3. Kitab Hudud	224
4. Pembelaan Diri	232

BAB VIII AQDHIYAH (HUKUM-HUKUM PENGADILAN)	234
1. Peradilan Agama Pada Umumnya	234
2. Peradilan Agama di Indonesia	243

DAFTAR ISTILAH	257
DAFTAR PUSTAKA	260

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II DASAR-DASAR DAN PENGERTIAN HUKUM ISLAM	 11
1. Arti Hukum Islam.....	11
2. Kedudukan Hukum Islam	12
3. Rukun Islam dan Perintah Agama	27
4. Hukum Islam dan Hukum Lainnya	51
5. Perkembangan Hukum Islam dan Mazhab-mazhabnya ..	54
 BAB III SISTEM HUKUM ISLAM	 77
1. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Islam	77
2. Sumber-sumber Hukum Islam	78
3. Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Hukum Islam.....	84
 BAB IV MUNAKAHAT	 87
1. Dasar dasar Pemikiran	87
2. Arti dan Tujuan Perkawinan	89
3. Kewajiban dan Hak Suami Istri	94
4. Putusnya Perkawinan	108
5.. Dampak Putusnya Perkawinan	113
 BAB V HUKUM WARIS	 129
1. Pengertian dan Pemikiran Hukum Waris	129
2. Pembagian Harta Waris	139
3. Harta Warisan Rahim	160
 BAB VI MUAMALAT	 163
1. Pengretian Muamalat	163
2. Jual Beli	166
3. Sewa Menyewa	179

PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum W. W.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ba'da salam, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT, dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktifitas sehari hari dengan baik dan lancar, amin. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT, sehingga dapat mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah SAW, amin.

Selanjutnya, buku Hukum Islam, yang disusun Dr. Paisal Burlian, SH., M.Hum. ini merupakan buku yang membahas tentang dasar dan pengertian hukum Islam, sistem hukum Islam serta ruang lingkupnya, masalah munakahat meliputi pernikahan, hak suami istri, putusnya pernikahan dan dampaknya bagi keluarga dan anak-anaknya, masalah jinayat, hudud serta pembelaanya, masalah peradilan.agama dan peradilan agama di Indonesia, serta muamalat meliputi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan pinjam meminjam. begitu lengkapnya buku hukum Islam ini menjadikan para pembaca tertarik untuk mendalami lebih lanjut, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi umat manusia amin.

Atas nama percetakan dan penerbit Tunas Gemilang kami sampaikan, semoga Dr. Paisal Burlian, yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan buku ini, mudah-mudahan buku ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Wassalamu'alaikum W. W.

Palembang, 17 Mei 2017
Direktur,

Dr. Yusron Masduki, M. Pd.I
NIDN. 0213086801

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah rabbi'l'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir, yang telah mambawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan perjuangan pikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan berpikir, pengorbanan baik secara materiil maupun immateriil serta waktu yang panjang, apalagi ingin membahas Hukum Islam yang sudah menjadi cabang ilmu hukum yang telah diajarkan sejak zaman penjajahan Belanda pada perguruan tinggi hukum di Batavia disebut dengan *Mohammedaansch Recht* (karena dianggap Muhammad adalah penyebabnya), setelah ini tidak banyak lagi digunakan karena konotasinya subyektif, istilah yang lebih populer adalah *Islamic Law*, termasuk salah satu sistem hukum utama (*major legal system*) dalam rumputun keluarga sistem hukum yang dikenal didunia.

Lembaga pendidikan islam mempunyai pemahaman yang sama baik secara fungsional operasional dan substansional. Dalam masa pra kemerdekaan mata kuliah Hukum Islam dengan nama “*Mohamme dansch Recht en Instellingen van den islam*” , paska kemerdekaan pemerintah RIS, 1950 Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat. Hukum Islam dan lembaga-lembaga Hukum Islam mulai diajarkan di Universitas Indonesia. Setelah itu terjadi pemekaran terhadap mata kuliah pengetahuan masyarakat.

b. Alasan Penduduk

Menurut sensus, hampir 90% (tepatnya 88,09% menurut sensus 1980), penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia yang mendiami kepulauan Nusantara ini adalah pemeluk agama islam

c. Argumen Yuridis

Di Indonesia hukum islam berlaku :

(1).Berlaku secara normatif

Berlakunya ditentukan oleh kesadaran atas kuat lemahnya iman Umat Muslim, negara tidak turut campur tangan.

(2).Berlaku secara Formal

Berlaku didasarkan atau ditunjuk oleh peraturan UU. Menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, ada unsur campur tangan negara. Contoh : pasal 2(1) UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan Islam.

Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, oleh sebab itu penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan disertasi ini menjadi karya yang lebih sempurna lagi.

Palembang, Oktober 2017

Penulis,

Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan sejarah yang tidak henti-hentinya sampai sekarang dan sebagai suatu kenyataan alam yang tidak dapat dihindari lagi, maka Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau atas karunia Allah memiliki letak strategis. Dan atas karunia-Nya pula bahwa penghuni Indonesia yang terdiri atas suku bangsa tersebar luas dalam hidup kelompok dengan kebudayaannya dapat bersatu dalam satu kesatuan bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Kehidupan masyarakat yang tersebar dan lazim disebut heterogen itu tidak menjadi penghalang untuk memisahkan diri dari kesatuannya bahkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan kuat dalam sebuah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pandangan hidupnya, yaitu Pancasila dan berpedoman kepada Undang-undang Dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak tergoyahkan dari rongrongan yang pernah mencoba untuk menghancurkannya.

Negara Indonesia tidak timbul begitu saja sebagai suatu bentuk organisasi bangsa melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa untuk mewujudkan asas kesatuannya yang dijadikan sumber penghidupan dan kehidupan bangsa lain. Dan atas karunia Allah perjuangan itu tercapai yang sampai saat ini tetap utuh berdiri.

Berdasarkan sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya sebelum abad ke 1 kepulauan nusantara ini telah banyak dihuni kelompok-kelompok sosial yang memiliki kebudayaan tinggi. Hasil-hasil bumi dan kerajinan rumah tangga banyak

diperdagangkan antar mereka dan keluar kepulauan, berarti komunikasi dengan bangsa lain telah berlangsung waktu itu.

Kemudian sejak kedatangan orang-orang dari Yunani sebagai kelompok sosial menetap dan dalam perkembangannya didatangi oleh bangsa-bangsa Asia lainnya, maka bertambah ramailah hubungan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain itu. Mereka datang ke Indonesia selain membawa barang-barang dagangan juga membawa kebudayaannya. Komunikasi antar bangsa yang mempunyai dua kebudayaan berbeda melalui perdagangan tentu akan menimbulkan titik temu tertentu. Hal ini tidak mungkin dapat dihindarkan apalagi hubungan perdagangannya dilakukan dengan penuh pengertian dalam perdamaian.

Suatu pertemuan antara dua hal yang berbeda tentu akan menimbulkan akibat, baik lambat maupun cepat, sebagai reaksi. Dan akibat itu relatif, kadang-kadang hal yang datang dapat menguasai, dikuasai, atau pembauran. Demikian juga halnya dengan adanya pertemuan dua kebudayaan yang berbeda akibatnya dapat menimbulkan saling pengaruh-meempengaruhi satu kebudayaan akan kalah kepada kebudayaan yang lain atau terjadi pembauran dari kedua kebudayaan itu. Tetapi jangka waktu timbulnya akibat dari pertemuan kedua kebudayaan itu tidak dapat diukur, sebab dilihat dari unsur-unsur kebudayaan perubahan-perubahannya tergantung kepada cepat lambatnya menerima pengaruh dari kebudayaan lain itu.

Menurut Prof. Koentjaraningrat, unsur-unsur universal yang sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan di dunia ini adalah :

1. Sistem religi dan upacara keagamaan.
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
3. Sistem pengetahuan.
4. Bahasa.

5. Kesenian.
6. Sistem mata pencaharian hidup.
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Dari ketujuh unsur kebudayaan ini yang paling mudah menimbulkan perubahan suatu kelompok sosial tertentu justru mulai urutan ketujuh, keenam dan seterusnya sampai urutan pertama secara berurutan dari mudah, agak sulit, sulit dan tersulit untuk berubah. Jadi kalau kebenaran pendapat ini dikembalikan kepada datangnya kebudayaan dari luar dan masuk ke dalam kebudayaan Indonesia, pada awal mula datangnya kebudayaan tersebut yang kemudian terjadi perubahan dari sebagian unsur kebudayaan Indonesia tentu memerlukan waktu sangat lama. Kalau dilihat dari urutan unsur-unsur universal kebudayaan itu berarti sistem religi merupakan unsur yang tersulit berubah. Hal ini perlu dipahami mengingat bahwa bagi penganut suatu religi tertentu memiliki sifat yang unik, yaitu keyakinan individu yang religius. Merubah keyakinan seseorang yang religius dengan keyakinan religius lainnya itulah yang dimaksud tersulit, karena suatu keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat religius itu diterima melalui batin dan bukan melalui akal. Dogma-dogma yang diterima melalui batin tidak dapat dianalisis secara empiris melainkan hanya diyakini kebenarannya. Perubahan sebagian unsur universal kebudayaan yang terjadi di Indonesia khususnya unsur religi dan upacara keagamaan dapat dilihat dengan banyaknya bangsa Indonesia sebagai pemeluk agama Budha, Hindu, Nasrani (Katolik, Protestan), dan Islam. Tetapi walaupun pada umumnya setiap orang yang telah memeluk suatu agama belum tentu seluruh peraturan hukum agama itu menguasai pelaksanaan dari pemeluknya. Maksudnya, dari religi yang dipeluk semula secara turun-temurun masih ada bagian tertentu yang tetap dominan dan

tidak dapat dipengaruhi oleh keteentuan hukum agama yang dipeluknya.

Contoh : Seseorang pemeluk agama tertentu kalau mau melangsungkan perkawinan supaya sah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, tetap dalam upacara perkawinannya digunakan hukum adat.

Berarti pertemuan dua kebudayaan yang berbeda itu di Indonesia khususnya dalam religi yang terjadi hanyalah suatu pembauran. Karena itu sampai sekarang nampaknya sangat sulit untuk melaksanakan peraturan hukum agama secara murni.

Dilihat dari letak geografis kepulauan Indonesia yang strategis antara dua benua dan lautan luas, maka penyebaran agama-agama yang dibawa oleh pendatang terjadi secara menyeluruh dan berkembang. Tetapi heterogenitas kehidupan masyarakat mengakibatkan juga terjadinya suasana heterogen dalam kehidupan umat beragama. Agama Islam, misalnya sebagai salah satu agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia terlihat keheterogenannya dalam melaksanakan kemurnian dari peraturan-peraturannya. Hukum agama Islam yang seharusnya ditaati oleh setiap umat Islam sebagai pemeluknya, maka peraturannya tidak dapat berjalan secara menetap. Ada saja orang yang mengaku beragama Islam dan dalam tindakan tertentu belum melaksanakan hukum agama itu dengan baik. Situasi sosial yang demikian hendaknya dapat dipahami, karena pandangan hidup Pancasila tidak mengharuskan untuk menegakkan Negara Islam. Karena itu dalam perkembangan agama Islam tidak mungkin hukum agama positif akan bercorak unifikasi di dalam Negara Republik Indonesia. Demikian juga dengan perkembangan agama-agama lain yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hanya saja dengan adanya heterogenitas dalam kehidupan

beragama itu mengundang suatu pertanyaan khusus bagi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam kedudukan dan pelaksanaan aturan hukumnya.

Kalau ada suatu pertanyaan yang menyangkut tentang kedudukan dan pelaksanaan aturan-aturan hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban yang luas. Sebab selain dapat dilihat kekhususannya dalam kegiatan politik Indonesia juga secara umum terdapat pandangan masyarakat dunia pengetahuan untuk mempelajari hukum Islam yang selalu berkembang. Karena itu perlu diketahui lebih dahulu kegiatan politik Negara dalam memperhatikan hukum Islam, kemudian perhatian dunia pengetahuan terhadap perkembangan hukum Islam yang perlu di pelajari.

Pandangan hidup Pancasila yang dilaksanakan dengan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen menunjukkan tetap tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Dalam salah satu kegiatan politik yang menyangkut mengenai hukum dan pelaksanaannya dicantumkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 itu yang menyatakan “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru meenurut Undang-undang Dasar ini. Maksud dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan ini untuk menghindarkan kekosongan berlakunya hukum sesaat setelah Indonesia menjadi sebuah Negara merdeka. Dan dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan itu juga menunjukkan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebelum Indonesia merdeka menjadi tetap berlaku sebagai hukum positif nasional. Sedangkan sebelum Indonesia merdeka kepulauan nusantara ini diduduki oleh Bala Tentara Jepang. Waktu itu

pemerintah Bala Tentata Jepang yang dicantumkan dalam Osamu Serei No. 1 Tahun 1942 Pasal 3 memberlakukan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebelumnya. Berarti bahwa peraturan hukum yang berlaku adalah peraturan hukum Hindia Belanda. Dan peraturan hukum Hindia Belanda didasarkan pada *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)* serta *Indische Staatsregelin (IS)*. Dengan demikian sejak berlakunya Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihannya, maka peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah AB dan IS sepanjang tidak dirubah/diganti oleh Undang-undang Nasional.

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Islam, maka Pasal 134 ayat 2 IS menyatakan bahwa “Akan tetapi perkara hukum perdata antara orang-orang Islam itupun kalau dikehendaki oleh hukum adatnya diperiksa oleh hakim agama sekedar tidak ditentukan lain dengan ordonansi”. Dari ketentuan pasal ini ditempuh jalan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membedakan secara tegas pelaksanaan berlakunya hukum perdata bagi setiap orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam dalam bidang hukum tertentu kalau terjadi masalah hukum. Dan penyelesaiannya pun disediakan pengadilan agama. Tetapi kalau masalah hukum yang dihadapi dikuasai oleh peraturan hukum perdata Eropah yang peraturannya dikeluarkan melalui Ordonansi, maka penyelesaiannya tidak melalui pengadilan agama.

Misalnya : seseorang anggota masyarakat adat beragama Islam tunduk secara suka rela kepada seluruh hukum perdata Eropah (menurut S. 1917 :12) mau bercerai. Percerainnya tidak dilakukan oleh pengadilan agama melainkan oleh pengadilan Hindia Belanda.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat 2 IS ini criteria yang perlu diperhatikan ialah :

1. Terjadinya perkara harus orang yang beragama Islam, artinya semua pihak yang berperkara harus benar-benar orang yang beragama Islam.
2. Menurut hukum Adat mereka, perkaranya harus diajukan kepada hakim agama, dan hakim agama disediakan oleh pemerintah.
3. Perkara itu harus tidak ditarik dengan ordonansi dari kekuasaan hakim agama, artinya para pihak yang berperkara tidak tunduk pada hukum perdata Eropah.

Dari ketiga kriteria ini memberikan penegasan adanya perbedaan penyelesaian masalah perdata bagi pemeluk agama Islam yang tidak tunduk kepada hukum perdata Eropah. Sedangkan masalah hukum perdata yang dapat diselesaikan melalui pengadilan agama adalah masalah hukum kekeluargaan meliputi nikah, talak, rujuk, waris dan waqaf. Dan untuk kepentingan menyelesaikan masalah hukum itu pemerintah Hindia Belanda menyediakan pengadilan agama. Pembentukannya melalui ordonansi yang dibedakan antara pengadilan agama di Jawa dan di luar Jawa dalam struktur dan peristilahan. Pengadilan agama di Jawa dan Madura melalui S. 1882:152 jo. S. 1937:116 dan 610 dinyatakan terdiri atas dua tingkat yang ada di dalam lingkungan pengadilan pemerintah, yaitu :

1. Raad Agama (Pri-asteraad), dan
2. Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voor Islamatische Zakenn).

Sedangkan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura pada umumnya terdiri atas dua tingkat juga hanya istilah yang digunakan berbeda.

Misalnya : di Minangkabau dinamakan “Sidang Jum’at”, di Kalimantan Tenggara dinamakan “Pengadilan Kadi” untuk tingkat I dan pengadilan “Pengadilan Kadi Kepala” untuk tingkat II.

Berdasarkan kepada kegiatan lembaga peradilan agama yang telah berjalan sejak zaman colonial itu, maka pada tahun 1957 pemerintah Indonesia membentuk lembaga peradilan agama untuk luar Jawa dan Madura. Maksudnya supaya ada lembaga peradilan agama yang sama kedudukan dan wewenang hukumnya dengan lembaga peradilan agama di Jawa dan Madura bentukan pemerintah Hindia Belanda.

Pembentukan lembaga tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.

Dengan emikian berarti bahwa di seluruh wilayah Republik Indonesia ada pengadilan agama yang mempunyai wewenang tertentu dan berdampingan dengan lembaga pengadilan lain yang sudah ada sebelumnya.

Dengan ketentuan Pasal 134 ayat 2 IS dan disediakannya pengadilan agama sebagai dasar hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia untuk menyelesaikan masalah perdata bidang tertentu, maka pemerintah Hindia Belanda mengakui secara sah bahwa hukum perdata Islam bidang hukum tertentu itu mempunyai kedudukan sebagai hukum positif bagi pemeluknya kecuali yang bersangkutan tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropah. Dan bidang-bidang hukum perdata lainnya seperti hukum kekayaan (hak ulayat dan kebendaan lainnya) tetap dikuasai oleh hukum adat.

Pemikiran hukum pemerintah Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum perdata Islam seperti tersebut diatas itu dibawa terus oleh pemerintah bala tentara Jepang dan dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia bedasarkan Pasal II Aturan Peralihan bahkan kemudian ditugasskan secara formal oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang mengatur tentang Pokok-

pokok kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan adanya empat macam peradilan yang terdiri atas :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari susunan lembaga peradilan yang dicantumkan dalam Undang-undang itu jelas bahwa setiap masalah perdata bidang hokum kekeluargaan seperti nikah, talak, rujuk, waris, dan wakaf bagi orang yang beragama Islam dapat dimintakan penyelesaiannya dihadapan hakim pengadilan yang berwenang menangani masalah itu, yaitu pengadilan agama.

Dan lebih tegas lagi sejak tanggal 29 Desember 1989 diundangkan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Jadi hukum perdata Islam bidang hukum kekeluargaan tertentu sampai sekarang tetap berlaku sebagai hukum positif bagi setiap orang yang beragama Islam di dalam kehidupan Negara selain ada kewajiban mentaati aturan hukum agamanya secara individual.

Dilihat dari dunia pengetahuan dalam perhatiannya terhadap hukum Islam sebenarnya ada beberapa pokok pendekatan yang perlu diketahui.

Berdasarkan sejarah perkembangan agama Islam sejak Nabi Muhammad ternyata bahwa ajaran agama itu sangat pesat. Pengaruh meluasnya ajaran agama Islam terlihat sejak abad pertengahan di Asia dan Afrika Utara yang bersamaan waktunya dengan revolusi industri di Eropa. Dan disamping itu hukum yang mengatur tentang hubungan antar manusia sebagai hukum Islam, memiliki sistem hukum sendiri yang sejajar dengan sistem-sistem

hukum lainnya. Sumber-sumber hukumnya yang lengkap menjadi dasar pengaturan dan pelaksanaan hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan cara pembinaan yang dilakukan bertahap melalui doktrin keyakinan sampai menimbulkan kesadaran hukum individu akan dapat diresapi dengan penghayatan yang mendalam berdasarkan sistem berfikir praktis dan realistik.

Dilihat dari dinamisasi pembinaan ini akibat yang sangat dirasakan dalam kehidupan sosial, yaitu adanya sikap keterbukaan pandangan dan dapat menerima perubahan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al Quran. Karena itu dengan pesat juga tumbuh lembaga-lembaga pendidikan khusus yang menggunakan metode belajar-mengajar tradisional (pendidikan agama). Kemudian timbul dorongan para cendekia untuk mempelajari hukum Islam itu melalui pendekatan sistemnya yang berkembang pada kehidupan akademik pelbagai bangsa dan Negara di dunia ini.

Dari uraian pokok di atas terlihat secara jelas mengenai kedudukan hukum Islam yang sampai saat ini tetap memasyarakat dan menjadidi aktual dalam perkembangan hukum. Dan dalam suasana heterogenitas kehidupan masyarakat keagamaan di Indonesia sangat terasa aktualitas dari hukum Islam itu.

Untuk memperjelas materi hukum Islam itu, maka dalam bab-bab berikutnya diuraikan mengenai dasar-dasar pengertian baik mengenai arti, kedudukan, sistem, maupun perkembangannya, hubungan antar manusia dalam pengertian muamalat dan munakahat, tingkah laku manusia yang menyimpang dan penyelesaiannya.

BAB II

DASAR-DASAR PENGERTIAN HUKUM ISLAM

1. Arti Hukum Islam

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk itu melainkan kata ‘Islam’ berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Quran.

Di dalam Quran **Surah (5) Al-Maidah ayat 3** dinyatakan bahwa “Wa radhitsu lakum al-Islama dinan” artinya “Dan Allah mengakui bagimu Islam sebagai agama”. Selain itu juga di dalam **Surah (3) Al-Imran ayat 19** dinyatakan bahwa “Inna’dinna inda Ilahi al-Islam”, artinya “sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam”. Dari dua surah yang dikemukakan itu membuktikan bahwa kata ‘Islam’ tidak dibuat oleh manusia sebagai pemeluk agamanya melainkan nyata merupakan wahyu Allah yang dicantumkan di dalam Quran.

Kata “Islam” artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu disebut “muslim”. Dan menurut Quran, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan berprasangka melainkan selalu menghendaki persabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain. Perdamaian dengan sesama manusia itu ditunjukkan mealui kegiatan tingkah laku dalam berucap diantara sesama muslim ketika bertemu memberi salam yang wajib mengucapkan “Assalamu alaikum” artinya “damai, keselamatan bagimu” dan

dijawab dengan mengucapkan “Wa’ alaikumsalam”, artinya “dan damai pula bagimu”.

Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak Allah yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintah-Nya. Seluruh perintah sebagai satu kesatuan yang terdiri atas bermacam-macam perintah merupakan hal-hal yang perlu dilakukan atau yang perlu di jauhi. Dan setiap perintah itu dinamakan “Hukum” (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Hal inilah kemudian lama-kelamaan dinamakan “Hukum”.

Jadi kalau dilihat dari pengertian-pengertian ini, maka hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.

2. Kedudukan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk mausia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini semua kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perjalanan sejarahsejak Nabi Muhammad mengajarkan Islam sampai wafatnya dan dilanjutkan oleh para

sahabat, khalifah, serta ulama-ulama hingga sekarang, maka menjadi muslim untuk menjalankan Islam jumlahnya sudah berjuta-juta manusia. Bahkan suasana itu terus berkembang diseluruh dunia dengan dasar yang kokoh, erat dan kuat. Kalau diumpamakan sebagai sebuah bangunan kekokohan, keamatan dan kekuatannya itu disebabkan hukum Islam berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat digoyahkan oleh apapun juga. Ketiga tiang pokok penyanggah itu terdiri dari :

a. Hukum syariat

menurut **Nicolas P. Agnides** dalam bukunya menyatakan bahwa : syariat adalah sesuatu yang tidak akan diketahui adanya kalau tidak ada wahyu Allah. Berdasarkan pengertian ini dapat dinyatakan bahwa bagi seorang muslim tidak mungkin akan dapat mengetahui segalanya yang ada kalau Allah tidak memberitahukan melalui wahyu-Nya. Karena itu istilah syariat mempunyai pengertian cukup luas. Maksudnya di dalam syariat memuat wahyu-wahy Allah yang diturunkan kepada Nabi-nabi baik yang berkebangsaan Ibrani maupun Nabi Isa dengan ketetapan bahwa wahyu-wahyu itu hanya akan berlaku selama dibenarkan dan dikuatkan oleh wahyu-wahyu. Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan dari istilah itu dinyatakan juga bahwa hanya yang secara tegas dicantumkan sebagai wahyu Allah atau yang dapat dimasukkan ke dalamnya secara analogi saja yang termasuk syariat.

Contoh : Ada Anjuran dalam wahyu Allah “hendaknya jangan merokok”. Kalau dilihat pengertian ini inti dari perbuatan merokok itu adalah meninggalkan bekas bau tidak enak dimulut perokok. Suatu kegiatan yang dilakukan dengan memasukkan benda tertentu kemulut dan meninggalkan bekas bau tidak enak seperti jengkol, petai, bawang mentah

mempunyai inti pengertian yang sama dengan merokok. Jadi secara analogis termasuk syariat. Sedangkan bagi suatu ajaran yang diperoleh dari perkembangan kecerdasan yang ditetapkan oleh akal tidak termasuk syariat.

Contoh : Hubungan seksual bukan suami istri, perbuatannya dosa besar. Dalam agama Islam perbuatan itu disebut haram.

Kalau terjadi hubungan seksual seperti yang dimaksud dan berakibat kehamilan, maka anak yang lahir bukan anak haram (anak yang berdosa besar). Pengertian berbuat (hubungan seksual) dengan akibat (kelahiran anak dari hubungan seksual) itu tidak ada kesamaan dalam inti pengertiannya. Analisis seperti inilah yang dinamakan menggunakan akal. Karena itu tidak termasuk syariat.

Kalau dikatakan bahwa syariat itu adalah hukum (hukum syariat) artinya merupakan jenis, sifat dan nilai-nilai dari wahyu Allah. Dan hukum syariat yang mempelajari hukumnya sebagai ilmu dinamakan “Ilmu Fiqh”. Ahli ilmu fiqh dinamakan “Faqih”.

Menurut Abu Hanifah arti umum dari fiqh ialah ilmu untuk mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi diri seseorang. Pengertian ini sangat luas, karena di dalamnya mengenai perbuatan, iman dan etika.

Fiqh yang telah dirumuskan *khusus* sebagai deduksi dari hukum *syariat* menyangkut mengenai *amal*. Dengan menggunakan istilah syariat dimaksudkan untuk memisahkan dari nilai rasio dalam kaitannya dengan menggiatkan indera-indera dari panca indera seseorang. Sedangkan dengan kata *amal* di dalamnya tidak dimasukkan pengetahuan yang diperoleh dari seseorang ulam besar (mudjtahid) sebagai alternatif dalam suatu penyelidikan yang dihasilkan secara langsung dari bukti-bukti yang ada (dalam sumber hukumnya). Istilah “khusus” menunjukkan adanya dasar tertentu yang digunakan oleh fiqh secara tidak langsung diperoleh

dari bukti-bukti syariat (sumber-sumber hukum). Dan pengetahuan secara khusus ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pokok-pokok dalam fiqh yang dinamakan pengetahuan tentang “usul al-fiqh” atau “ilmu dasar-dasar fiqh”. Karena itu ilmu usul al-fiqh dapat diartikan sebagai ilmu tentang prinsip-prinsip yang menjadikan seseorang dapat memahami fiqh dengan cara yang benar. Dan fungsinya untuk mempersiapkan dasar-dasar yang digunakan fiqh dalam menetapkan hukum syariat pada kejadian tertentu.

Misalnya: Kalau dikatakan dalam usul al-fiqh bahwa suatu kejadian tertentu itu termasuk idjma (konsekuensi para ulama besar), maka dijadikan bukti untuk menentukan hukum syariat dan fiqh mengambil ketentuan itu sebagai pegangan pokok dalam memberikan kesimpulan bahwa peristiwa hukum dalam praktek pemesanan barang kepada seorang seniman –walaupun bukan profesinya- adalah sah karena idjma.

Jadi usul al-fiqh itu membahas bukti-bukti syariat, yaitu dasar-dasar fiqh selama diperkenankan sebagai bukti untuk menetapkan hukum syariat dan memberikan kesimpulan sebagai hukum syariatnya dalam masalah tertentu dengan menggunakan fungsi fiqh.

Menurut Abu Harifah bagian-bagian yang menjadi usul al-fiqh, fiqh dan kedudukan kedua-duanya dalam lapangan pengetahuan umum terdiri atas :

1. Ilmu yang ditetapkan

- 1.1. Akal (aqliyyah), diperoleh dengan melatih akal dan panca indera.
- 1.2. Kebiasaan (naqliyyah), diperoleh dari kebiasaan (tradisi).

2. Ilmu yang tradisional

2.1. Ilmu kesusasteraan.

2.2. Ilmu syariat terdiri atas :

2.2.1. Asas (asliyyah) mengenai :

- a. Pembacaan Quran;
- b. Penafsiran Quran;
- c. Hadist atau Sunnah.

2.2.2. Yang disimpulkan secara deduksi, yaitu :

- a. Dogma (I'tiqaddiyyah) ialah ilmu tentang keesaan dan sifat-sifat Allah, ilmu tauhid (kalam, usul al-din, al-fiqh, al-akbar, ilmu al-tauhid, wa'lsifat).
- b. Yang praktis (amaliyyah) atau ilmu fiqh terdiri atas:
 1. Ilmu tentang dasar-dasar fiqh;
 2. Ilmu fiqh.

b. Usul al-Din

Selain aturan hukum dalam syariat, maka asas-asas agamapun dijadikan tiang pokok oleh hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar setiap pembuatan yang akan dilakukan wajib selalu dipertimbangkan melalui akalnya akan lebih dahulu berdosa atau tidak. Karena itu kegiatan yang ditunjukkan dengan tingkah laku tertentu bagi seorang muslim tidak terlepas kaitannya antara ibadat agama dengan hubungan sesama manusia sehari-hari. Jadi tingkah laku itu memerlukan kehati-hatian dalam sikap keterbukaannya.

Dari kata usul al-din berarti pokok dari agama. Dan sebagai ilmu dinamakan ilmu Al-Kalam yaitu menguraikan tentang asas-asas agama, juga disebut ilmu al-tauhid, yaitu ilmu keesaan Allah: atau ilmu aqa' id al-iman, yaitu ilmu tentang kepercayaan (iman). Usul al-din sebagai ilmu yang menguraikan asas-asas keyakinan

Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman berdasarkan penerimaan akal.

Suatu ilmu agama yang dapat diterima oleh batin sebagai kebenaran akan dapat dipahami kebenarannya kalau penerima melanjutkan dari rasa batin itu dengan menggunakan akal. Kalau penerimaan berdasarkan akal sudah dapat memahami, maka pemahamannya disebut beragama. Dan proses pemahaman itulah yang dimaksud dengan penguraian asas-asas keyakinan Islam dalam usul al-din sebagai ilmu. Dapat dikatakan juga bahwa usul al-din itu sebenarnya memberikan jawaban terhadap pertanyaan “Apakah yang harus dipercayai oleh setiap orang muslim?” Jadi usul al-din sebagai ilmu yang menguraikan asas-asas keyakinan untuk memperoleh pemahaman berdasarkan penerimaan akal seseorang membentuk ikatan batin yang kuat dalam jiwanya. Karena itu usul al-din dinamakan juga “aqidah” artinya ikatan batin yang tertanam di dalam jiwanya sebagai suatu dasar kepercayaan dari keyakinan tentang Allah.

Menjalankan perintah Allah itu mudah; tetapi tanpa aqidah berarti belum Islam. Dan kalau akidahnya sudah kuat akan lebih mudah mencapai kesempurnaan ke-Islaman, karena perkembangan jiwa yang menunjukkan sikap kedewasaan berarti memiliki kepribadian yang mantap. Untuk memperkuat aqidah perlu melatih diri memperteba ikatan hati nuraninya terhadap dasar-dasar kepercayaan dan keyakinan mengenai Allah itu.

Jika seseorang beragama Islam mengaku beriman, tetapi nuraninya menyimpang dari keimanan, berarti orang itu munafik. Kalau mengaku beragama Islam, tetapi tingkah lakunya menyimpang dari ajaran agama Islam, misalnya melakukan tindak pidana kejahatan atau durhaka, maka orang itu dinamakan fasik. Sedangkan bagi seorang beragama Islam meninggalkan agamanya,

keluar dari agamanya yang pindah ke agama lain atau menjadi atheis (kafir), maka orang itu dinamakan murtad. Tetapi bagi seorang pemerias, penindas, atau penganiaya baik bagi dirinya, orang lain, keluarga maupun kepada masyarakat, maka orang itu dinamakan dholim.

Dengan demikian tidak cukuplah mengaku sebagai orang Islam karena mengenal tentang ke-Islaman, membaca peraturan-peraturannya dan senang membaca Al Quran tanpa memahami aqidahnya.

Kepercayaan kepada Allah dirumuskan dalam dua kalimat yang disebut “syahadat”, yaitu “La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah”, artinya “tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah rasul Allah”. Rumusan “tidak ada Tuhan melainkan Allah” ini dicantumkan dalam Al Quran **Surah (37) Ash-Shaffat ayat 35** dan rumusan “Muhammad adalah rasul Allah” dicantumkan dalam **Surah (48) Al-Fath ayat 29**.

Bertitik tolak dari kalimat syahadat ini maka ilmu usul al-din menerangkan keimanan, yaitu keesaan dan sifat-sifat Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan takdir. Keimanan ini dinamakan “al Arkanul iman assittah” (enam keimanan kepada Allah) yang terdiri atas :

1. Kepercayaan (iman) kepada Allah

Kepercayaan kepada Allah ialah percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat sempurna dan bebas dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Sifat-sifat sempurna Allah itu ada dua puluh sifat wajib dan dapat dikelompokkan dalam empat kelompok sebagai berikut :

1.1. *Nafsiah*

Sifat 1, ialah Allah ada (wujud). Yang dimaksud dengan wujud dari Allah itu karena zat-Nya dan bukan sesuatu yang lain.

1.2. *Salbiyyah*

Sifat 2, ialah dahulu Allah tidak bermula (qidam), artinya Allah itu terdahulu dan tidak ada yang terdahulu dari diri-Nya.

Sifat 3, ialah Allah kekal tidak berkesudahan (baqa'), artinya tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyudahi-Nya.

Sifat 4, ialah Allah berlainan dari segala yang baru (mukhalafah lil-hawadits), yaitu selalu berbeda dari makhluk yang diciptakan-Nya.

Sifat 5, ialah Allah berdiri dengan sendirinya (qiyamuhu binafsih), yaitu tidak ada sesuatu apapun yang mendirikan-Nya, karena Allah itulah yang memiliki alam semesta dan segala isinyaserta tidak tergantung kepada siapapun juga.

Sifat 6, ialah Allah Esa (wahdaniyah), artinya Allah itu esa zat-Nya, esa sifat-Nya, dan esa Fa'al-nya.

1.3. *Ma'ani*

Sifat 7, ialah Allah kuasa (qudrat), artinya tidak ada siapapun yang dapat menandingi kuasa-Nya.

Sifat 8, ialah Allah menghendaki (iradat), artinya berkemauan, menghendaki dan tidak ada sesuatu apapun juga tanpa kemauan dan kehendak-Nya.

Sifat 9, ialah Allah mengetahui (ilm), maksudnya mengetahui segala sesuatu yang terjadi.

Sifat 10, ialah Allah hidup (hayat), maksudnya hidup dalam kesempurnaan-Nya.

Sifat 11, ialah Allah mendengar (sama'), maksudnya mendengar segala sesuatu yang diucapkan yang diucapkan oleh makhluk-Nya.

Sifat 12, ialah Allah melihat (basar), maksudnya tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyikan, karena Allah selalu akan melihat-Nya.

Sifat 13, ialah Allah berkata (kalam), maksudnya berkata dengan segala kesempurnaan-Nya.

1.4. *Ma'nawiyah*

Ma'nawiyah ini bergantung kepada Ma'ani, maksudnya kalau pada Ma'ani sifat 7 Allah kuasa, maka ma'nawiyahnya Allah yang kuasa. Karena ketujuh sifat Allah dalam ma'nawiyah terdiri atas :

Sifat 14, ialah yang kuasa (qadirun).

Sifat 15, ialah yang menghendaki (muridun).

Sifat 16, ialah yang mengetahui (alimun).

Sifat 17, ialah yang hidup (hayyun).

Sifat 18, ialah yang mendengar (samiun).

Sifat 19, ialah yang melihat (basirun).

Sifat 20, ialah yang berkata-kata (muttakalimun).

2. Percaya (iman) kepada Malaikat Allah

Malaikat Allah adalah makhluk halus yang dijadikan oleh Allah dari cahaya (nur). Sifat malaikat itu tidak makan dan tidak minum.

Di dalam Al Quran **surah (21) Al-Anbiya' ayat 26** dinyatakan bahwa "Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan". Dan **Surah (66) At-Tahrim ayat 6** menyatakan

bahwa ‘Malaikat itu taat kepada perintah dan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya’.

Dari dua ketentuan ini menunjukkan adanya suatu pengabdian murni yang dilakukan oleh para malaikat atas perintah Allah. Kejujuran dan pentaatannya terhadap perintah-perintah Allah yang wajib dilakukan sebagai tugasnya tidak dapat dilihat oleh manusia melainkan hanya dapat diyakini dari setiap peristiwa sehari-hari yang dihadapinya sebagai makhluk hidup ciptaan Allah.

Misalnya: Kematian seseorang tidak dapat ditunda melainkan atas perintah Allah yang ditugaskan kepada malaikat Izrail.

Setiap malaikat mempunyai tugas sendiri-sendiri yang satu sama lain berbeda sesuai derajat dan tingkat tugasnya. Ada empat malaikat yang mempunyai derajat tinggi, yaitu :

- Malaikat Jibrail (Jibril) bertugas menjadi penuntun wahyu Allah kepada para Nabi dan para Rasul Allah,
- Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa,
- Malaikat Izrafil bertugas meniupkan nafiri pada hari kiamat,
- Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan membagikan rezeki.

Malaikat lainnya yang dikenal, ialah Munkar dan Nakir bertugas sebagai pemeriksa manusia di kubur. Sedangkan malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat perbuatan baik dan buruk manusia semasa hidupnya.

Selain menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan makhluk halus dari cahaya yang dinamakan jin. Dan jin itu menjadi iblis/setan akibat kutukan karena durhaka (tidak menurut perintah) kepada Allah. Kejadiannya itu ketika Allah menciptakan Adam sebagai makhluk manusia, maka

diperintahkan supaya semua makhluk halus bersujud kepada Adam. Para malaikat mentaati perintah itu, tetapi jin tidak mentaati. Dirinya membantah dan berkata, “Apakah saya akan sujud kepada makhluk yang Kau jadikan dari tanah”. (**Al Quran Surah (17) Bani Israil 61**). Karena itu kemudian jin dimarahi, diberhentikan dari tugasnya dan mendapat azab Allah. Permintaannya untuk mengganggu manusia sampai kiamat dikabulkan oleh Allah.

3. Percaya (iman) kepada Kitab-kitab Allah

Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada Nabi/Rasul-Nya. Isi kitab-kitab suci itu adalah firman Allah baik sebagai perintah dan larangan-Nya maupun janji dan ancaman-Nya. Kitab-kitab Allah yang terkenal ada empat yang terdiri dari :

- 3.1. Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa Rasul Allah.
- 3.2. Zabur, diturunkan kepada Nabi Isa rasul Allah.
- 3.3. Injil, diturunkan kepada Nabi Isa rasul Allah.
- 3.4. Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasul Allah.

Keempat kitab suci ini arti terjemahnya terdiri atas :

- Taurat yang dikenal sebagai perjanjian lama berarti hukum (undang-undang),
- Zabur berarti renungan,
- Injil berarti berita gembira,
- Quran berarti bacaan suci.

Quran yang kepada Nabi Muhammad merupakan kitab suci terakhir dari kitab-kitab suci yang ada dan sebagai pengganti dari semua kitab suci terdahulu.

4. Percaya (iman) kepada Rasul-rasul Allah

Allah mengirimkan urusan diantara makhluk hidup manusia sebagai tanda kemurahan-Nya, utusan itu disebut Nabi. Dan diantara para Nabi ada yang dijadikan Rasul.

Nabi ialah orang yang menerima wahyu Allah, tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada sesama manusia. Tujuan mengirimkan utusan yang disebut Nabi itu untuk memberikan keteladanan dalam bertingkah laku agar manusia lain memiliki tingkah laku yang sama.

Setiap Nabi memiliki *mukjizat*, yaitu hal luar biasa yang dimiliki seorang Nabi dan dilakukan olehnya atas izin Allah untuk membuktikan kebenaran ucapan-Nya yang tidak akan terjadi bagi orang biasa.

Misalnya :

- Nabi Idris dengan mukjizat menjahit.
- Nabi Nuh sebagai arsitek pembuat perahu.
- Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya dapat menyibak laut Merah, membuat sumber-sumber air di padang pasir, dan mendadak dapat berubah menjadi ular besar ketika menghadapi Firaun yang kemudian merasa sangat ketakutan sehingga melarikan diri.
- Nabi Isa dengan mukjizat dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang telah meninggal dunia dan dapat berjalan santai diatas air.
- Nabi Muhammad dapat memberikan air kepada beratus-ratus tentaranya di padang pasir dan air itu keluar dari celah-celah jari tangannya yang digunakan untuk minum, mandi, dan wudhu (mengambil air shalat), mukjizat kesusasteraan dengan bahasa yang indah seperti tentara dalam Quran.

Bagi orang biasa ada juga pemilikan serupa mukjizat sebagai tanda kuasa Allah, tetapi bukan mukjizat. Dan hal luar biasa yang dimiliki oleh orang biasa yang serupa mukjizat itu dinamakan keramat. Selain mukjizat juga setiap Nabi memiliki empat sifat yang terdiri atas :

- 4.1. Siqd (benar) yaitu segala perkataannya sesuai dengan kenyataan sehingga tidak pernah bohong.
- 4.2. Amanah (kepercayaan) yaitu semua masalah yang dikemukakan memiliki kebenaran yang diridhoi Allah.
- 4.3. Tabliqh (penalar) Yaitu menyampaikan dan menerangkan dengan sebenarnya hal-hal yang diperintahkan Allah tanpa mengurangi atau menambah.
- 4.4. Fatanah (cerdik) yaitu sebagai makhluk manusia tajam dalam berfikir dan pandangannya.

Disamping mukjizat dan empat sifat itu, maka dalam segala tindakannya seelalu mendapat ma'sum dan suci dari Allah yaitu perlindungan istimewa.

Jumlah Nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad tidak diketahui secara pasti. Tetapi yang dicantumkan dalam kitab-kitab suci sebanyak dua puluh lima Nabi yaitu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lud, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, shu'aib, Musa, Harun, Dzu'lkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Dan Muhammad. Keduapuluh lima Nabi ini juga diangkat menjadi Rasul, yang berkewajiban menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada manusia. Dan yang mempunyai kedudukan Rasul tertinggi ada enam yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad.

5. Percaya (iman) kepada adanya Hari Kiamat

Hari kiamat adalah suasana kebangkitan semua makhluk manusia setelah alam semesta hancur. Terjadinya ditandai dengan peniupan nafiri oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Pada hari itu penuh dengan hal-hal yang menakutkan seperti terlihatnya anak-anak berambut putih semua, setiap mayat bangun dari kubur dan mereka akan digiring kesuatu lapangan luas yang dinamakan “makhsyar”. Di lapangan itulah setiap manusia wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatan semasa hidup dengan menimbang baik-buruk pada suatu misan (timbangan). Kalau amal baiknya lebih berat akan masuk surga dan kalau perbuatan buruknya lebih berat akan masuk neraka. Bagi mu'min (orang yang beriman) dan tidak taat kepada perintah-perintah Allah masih akan dapat pembelaan (syafaat) dari nabi-nabi atau rasul-rasul yang mendapat izin Allah. dan selain itu juga masih ada ujian berjalan diatas jembatan (sirat) sebesar rambut dibelah tujuh dengan api neraka di bawahnya. Bagi orang muslim yang taat kepada perintah-perintah Allah akan dapat melaluinya dengan mudah dan masuk surga. Sedangkan orang kafir dan tidak mentaati perintah Allah akan tergelincir dan masuk neraka.

6. Percaya (iman) kepada adanya Takdir

Takdir (qadar) ialah segala sesuatu yang terjadi bagi manusia telah ditentukan oleh Allah baik mengenai baik-buruknya, kegunaanya maupun akibat lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak mampu menentukan hal yang akan terjadi. Karena itu melalui akalnya harus berusaha (ikhtiar) seoptimal mungkin untuk menghindarkan dari akibat-akibat negatif yang mungkin akan terjadi dengan memahami hal baik dan hal buruk. Dalam usahanya itu harus dilakukan dengan

penuh kesabaran dan keteguhan hati. Jadi karena takdir itu telah ada, walaupun tidak diketahui lebih dahulu oleh manusia, tetapi selama hidupnya tidak boleh putus asa dan menyerah tanpa usaha.

Keenam rukun iman ini merupakan tiang utama bagi seseorang untuk mendirikan Islam secara kebersamaan atau kemudian menjalankan rukun-rukun Islam dengan menjauhkan perintah larangan Allah. Tanpa memiliki keimanan belum tentu ke-Islaman-nya dapat dijalankan dengan baik.

c. Tasawwuf

Tasawwuf berasal dari kata suf artinya kain wol kasar yang dipakai oleh orang muslim. Suf itu dipakai dalam mencari kesembunyian dan meninggalkan keduniawian untuk bertemu Allah. Zaman dahulu orang muslim yang memakai suf disebut sufi, menyendiri dan menghindarkan dari kehidupan material dalam mendekatkan diri mencari pertemuan dengan Allah. Ilmu yang dilakukan oleh sufi itu dinamakan “Tasawwuf”. Dan untuk melaksanakan tasawwuf diperlukan beberapa proses kegiatan yang mantap supaya tujuan menjalankan ilmunya itu dapat dicapai.

Semula orang itu melakukan *tobat*, yaitu berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Janji ini harus ditepati, karena kalau melanggar berarti tobatnya tidak berlaku lagi. Dan setelah tobat dapat dipenuhi dengan baik, maka dilanjutkan *melakukan melarat* dengan menjauhkan diri dari nafsu keduniawian. Dirinya menerima apa adanya, yaitu hal yang ada itulah ada dan miliknya adalah apa adanya. Melakukan melarat dalam kehidupan sehari-hari diiringi dengan *tariqat* (jalan) tetap, biasanya menjalankan penyempurnaan rukun Islamnya, dan

beribadat kepada Allah sebagaimana keharusan seorang muslim. Proses melakukan melarat seiring dengan tariqatnya pada suatu saat akan menjadi seorang *ma'rifat* (pengetahuan) yaitu memiliki ilmu. Kema'rifatan itu diikuti kemudian dengan menemukan *haqiqat* (kebenaran yang tinggi) tentang Allah, dan akhirnya akan sampai menjadi seorang *arif* (yang mengetahui).

Seorang arif itu berarti telah menyelesaikan tasawwufnya.

Dan tasawwuf itu tidak dapat dilakukan dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu dari proses kegiatannya, karena kemungkinan akan menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang sangat berat, yaitu menyatakan diri sebagai seorang yang maha mengetahui. Sedangkan kearifan seseorang tidak pernah dinyatakan oleh dirinya dan hanya orang lain yang mengetahuinya.

Ketiga tiang pokok hukum Islam yang terdiri dari hukum syariat, usul al-Din, dan tasawwuf ini menjadi pengayaan yang kuat untuk tetap berdirinya hukum Islam dalam kedudukan yang sangat kuat. Bahkan dalam perkembangannya menjadi perhatian bangsa-bangsa terutama dunia ilmu pengetahuan untuk mempelajari, mengetahui, mengerti, memahami dan memperdalam pengetahuan hukum Islam.

3. Rukun Islam dan Perintah Agama

Menyatakan diri sebagai orang Islam tidak cukup hanya meyakini rukun imannya saja melainkan juga melaksanakan rukun iman itu dengan baik. Sebagai tanda bukti adanya kepercayaan itu dinyatakan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diajarkan oleh rukun imannya. Dan tanda bukti kepercayaan yang diajarkan oleh rukun iman merupakan satu kesatuan dari rangkaian kewajiban yang lazim dinamakan 'Rukun Islam'.

Rukun Islam yaitu rangkaian pokok ketentuan Islam sebagai prinsip dalam beribadat. Dalam rangkaiannya ada lima bagian rukun Islam dan disebut “al Arkanul Islam al-Hamzah” terdiri atas:

1. Syahadah (sahadat)

Syahadah adalah suatu kesaksian/pengakuan yang diucapkan secara jelas dengan keyakinan akan kebenarannya, sehingga mengikat jiwa sebagai pegangan hidup dan pedoman rohaniah/jasmaniah seseorang. Syahadah yang lazim di Indonesia disebut sahadat ini terdiri dari dua kalimat yang diucapkan menjadi satu dan disebut ‘sahadatain’. Bunyi ucapan dua kalimat sahadat itu ialah : **“Asyhadualla ilaha illAllah, wa asyhadu anna Muhammadar-Rasulullah”**. Terjemahnya : Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah.

Dengan mengucapkan dua kalimat sahadat ini berarti adanya ikatan jiwa untuk tetap berpegangan kepada makna sahadat dan sekaligus menjadi pedoman hidup lahir batin dalam kehidupan sehari-hari.

2. Salat (sembahyang)

Salat dalam pelaksanaannya merupakan beberapa ucapan rumus dan gerakan anggota-anggota badan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan menghentikan larangan-larangan selama menjalankannya. Pelaksanaan salat menurut jadwal waktu secara tertib, teratur, terarah, terpadu, dan disiplin. Setiap salat diawali dengan pembacaan takbir (takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar) dan diakhiri dengan ucapan salam (assalamu alaikum) dalam proses bacaan dan gerakan tertentu.

Ucapan takbiratul ihram sebagai awal mulai salat adlah pujian ataskeagungan Allah. Bagi yang mengerjakan salat setelah selesai mengucapkan ‘Allahu Akbar’ dilarang berkata-kata,

tertawa, makan, minum dan gerakan lain yang tidak ada hubungannya dengan rukun-rukun dan bacaan dengan konsentrasi penuh hanya kepada Allah. Larangan dan keharusan dalam salat berlaku sampai selesai mengucapkan salam. Kalau larangan salat dilanggar dan keharusan tidak dipenuhi, maka salat itu wajib diulang dari awal dengan memulai dari ucapa takbiratul ihram lagi.

Salat yang lazim juga disebut sembahyang itu wajib dijalankan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan sejak usia tertentu dan telah dapat membedakan antara baik dan buruk. Salat wajib bagi setiap orang muslim itu sebanyak lima kali dalam sehari sesuai waktu dan cara-cara yang ditentukan. Dan kelima salat wajib itu adalah :

2.1. *Salat Al Zuhur (lohor)*

Waktu salat dimulai saat matahari tegak lurus dan bergeser kebarat sampai saat panjang bayangan sama dengan panjang badannya.

2.2. *Salat Al Asr (asar)*

Waktu salat mulai saat habis waktu salat lohor dan berakhir pada saat matahari terbenam.

2.3. *Salat Al Magrib*

Waktu salat mulai matahari terbenam selama cahaya merah di sebelah barat belum hilang.

2.4. *Salat Al Isya*

Waktu salat mulai hilangnya cahaya merah disebelah barat sampai fajar menyingsing.

2.5. *Salat Al Subb (subuh)*

Waktu salat mulai saat fajar menyingsing sampai saat matahari terbit.

Kelima salat wajib ini dikerjakan sesuai waktunya dan mempunyai panjang raka'at sendiri-sendiri. Satu raka'at terdiri dari proses berdiri, rukuk (membungkukkan diri), berdiri, sujud dan berdiri lagi dengan bacaan tertentu.

Salat Lohor ada empat raka'at, salat Asar empat raka'at, salat magrib tiga raka'at, salat Isya' empat raka'at, salat subuh dua raka'at. Dan sebelum mengerjakan salat harus berwudhu (mengambil air salat) lebih dahulu. Saat mau mulai salat sampai selesai wajib menghadap kiblat, yaitu berdiri menghadap Baitullah di Mekah dengan mengerjakan bacaan dan gerakan anggota tubuh sesuai rukun-rukunnya.

3. Zakat

Zakat artinya kesucian atau kebersihan, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan dengan maksud suci (bersih). Sebagai salah satu fundamental dalam agama Islam, kata zakat itu mempunyai arti luas, sebab arti zakat tidak terletak pada pemberian yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian harta kekayaannya melainkan lebih banyak terletak pada kehendak Allah. Maksudnya, perbuatan yang dilakukan sebagai zakat itu adalah wajib karena kehendak Allah.

Jadi berzakat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam dalam keadaan mampu untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya kepada orang yang memerlukan bantuan (fakir dan miskin).

Dilihat dari pengertian zakat ini, maka ada orang yang wajib berzakat, besarnya zakat dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki dan ada orang yang berhak menerima zakat. Dan untuk jelasnya marilah lihat dari bagian-bagian yang dimaksud.

3.1. *Orang yang wajib berzakat*

Yang wajib berzakat ialah setiap orang Islam yang masih hidup dan mempunyai kelebihan harta kekayaan. Kewajiban ini tidak terkecualikan, berarti berlaku bagi setiap orang Islam yang mampu dan masih hidup untuk melakukan zakat. Dalam arti seorang Islam mempunyai kelebihan harta kekayaan, maksudnya ia dalam kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih ada simpanan dari harta kekayaan yang dimiliki. Untuk hal ini dirinya wajib membayar zakat harta kekayaan. Dan selainitu juga selama hidup diwajibkan membayar zakat jiwa (fitrah).

3.2. *Besarnya zakat dari harta kekayaan*

Seorang Islam berkewajiban membayar zakat selama hidupnya. Dan zakat yang dibayarkan itu mempunyai dua kategori kewajiban dilihat dari kekayaan yang dimiliki dan orangnya masih hidup. Dengan demikian kemungkinan berzakat bagi seorang Islam dapat terjadi dua segi, yaitu membayar zakat karena mempunyai kelebihan harta kekayaan yang dimiliki di samping membayar zakat karena dirinya masih hidup.

Pembayaran zakat harta kekayaan itu besarnya tergantung pada batas jumlah minimal (nisab) yang ditentukan. Karena itu untuk mengetahui nisab harta kekayaan seseorang lebih dahulu harus mengetahui jumlah seluruh harta kekayaan yang dimiliki dalam lokasi-lokasi tersendiri, dari lokasi-lokasi inilah kemudian pembayaran zakatnya juga tersendiri. Adapun wujud-wujud pemilikan harta kekayaan yang dikenakan zakat kalau seseorang memiliki emas dan perak (uang), barang dagangan, buah-buahan (padi-padian), hasil tambang dan ternak.

Besarnya zakat dai masing-masing kepemilikan harta kekayaan itu sebagai berikut :

1. Zakat karena memiliki barang berharga

1.a. Zakat emas dan perak

Setiap orang Islam yang memiliki emas batangan atau perhiasan setelah 1 tahun lamanya wajib membayar zakat kalau nisabnya sampai dengan 93,6 gram. Bagi emas campuran, hendaknya ditimbang dahulu dalam memisahkan emas murni dengan campurannya yang kemudian dari emas murni itu dilihat nisabnya.

Contoh: Seseorang memiliki perhiasan emas seberat 200 gram terdiri atas emas murni 50 gram dan 150 gram campurannya. Berat emas 50 gram tidak mencapai nisab. Berate ia tidak berkewajiban membayar zakat.

Bagi pemilik perak batangan atau perhiasan setelah 1 tahun kepemilikannya wajib membayar zakat kalau memenuhi nisab perak sampai dengan 624 gram. Kurang dari nisab yang ditentukan tidak berkewajiban membayar zakat. Jumlah besarnya pembayaran zakat emas atau perak itu sebanyak $2\frac{1}{2}\%$ dari berat benda.

1.b. Zakat uang

Uang yang sering disimpan oleh seseorang dapat terdiri atas uang emas, perak atau kertas. Kepemilikan uang emas atau perak zakatnya sama dengan emas atau perak batangan/perhiasan, yaitu dengan nisab emas 93,6 gram dan untuk perak 624 gram dan berkewajiban membayar zakat $2\frac{1}{2}\%$ dari berat bendanya. Tetapi kekayaan yang berbentuk uang kertas sebagai ukuran nisabnya sebesar

Rp. 100.000,00 dengan kewajiban membayar zakat $2\frac{1}{2}\%$. Pembayaran zakat uang ini dilakukan setiap tahun.

2. Zakat barang dagangan

Kewajiban membayar zakat barang dagangan diambil dari modal awal setelah 1 tahun menjalankan usahanya. Besar zakat sebanyak $2\frac{1}{2}\%$ dengan perhitungan aktiva dipisahkan dari pasiva (modal awal).

Contoh : Pada tanggal 1 Maret 1985 seseorang berdagang dengan modal Rp. 10 juta. Selama 1 tahun usaha menjadi Rp. 20 juta. Maka zakat yang wajib dibayar sebesar $2\frac{1}{2}\%$ dari Rp. 10 juta (modal awal).

3. Zakat buah-buahan (padi-padian)

Yang termasuk buah buahan (padi-padian) ialah beras, gandum, sagu hasil kebun/lading dan atau makanan pokok dari daerah masing-masing. Nisab hasil produksi tanaman ini 10 kwintal dan zakatnya sebesar 10% dari setiap panen. Zakat sebesar ini wajib dibayarkan kalau pengelolaan tanaman dilakukan dengan hasil yang diperoleh dengan hasil menggunakan air tanpa membayar. Bagi hasil panen yang menggunakan air dengan membeli, zakatnya sebesar 5% setiap panen dari nisab 10 kwintal.

4. Zakat hasil tambang

Penggalian barang-barang tambang yang menghasilkan bagi penggalinya diwajibkan untuk membayar zakat sebesar $2\frac{1}{2}\%$ setiap tahun. Penemuan emas atau perak yang ditanam oleh orang-orang sebelum agama Islam zakatnya dibayar hanya satu kali sebesar 20%. Tetapi penemuan benda-benda purbakala seperti piramida fir'aun, candi atau gapura dalam wujud jumlah keseluruhan zakatnya juga hanya satu kali sebesar 40%.

5. *Zakat ternak*

Pemilik hewan yang merupakan ternak peliharaan sertiap tahunnya diwajibkan membayar zakat. Tetapi ternak peliharaan yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk membayar zakat itu ada tiga jenis ialah unta, sapi/kerbau, dan domba/kambing.

a. Pembayaran zakat bagi pemilik unta

Unta sebagai hewan peliharaan nisabnya antara 5-6 ekor. Pembayaran zakat yang wajib dilakukan setiap tahun adalah :

Memiliki :

5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau 1 ekor domba berumur 1 tahun.

10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 tahun lebih atau 2 ekor domba berumur 1 tahun lebih.

15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 tahun lebih atau 3 ekor domba berumur 2 tahun lebih.

20-24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing berumur 2 tahun lebih atau 4 ekor domba berumur 1 tahun lebih.

25-35 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 1 tahun lebih.

36-45 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih.

46-60 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih.

61-75 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 4 tahun lebih.

79-90 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih.

91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih.

Lebih dari 121 ekor unta dihitung setiap 40 ekor unta zakatnya 1 anak unta berumur 2 tahun lebih atau setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih.

b. *Pembayaran zakat bagi pemilik sapi/kerbau*

Sapi/kerbau sebagai hewan peliharaan nisabnya antara 30-39 ekor. Pembayaran zakat yang wajib dilakukan setiap tahun dalam jumlah hewan yang sejenis, yaitu memiliki :

30-39 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/1 ekor anak kerbau berumur 2 tahun lebih.

40-59 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/1 ekor anak kerbau berumur 3 tahun lebih.

60-69 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/1 ekor anak kerbau berumur 2 tahun lebih.

70 ekor lebih sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/1 ekor anak kerbau berumur 1 tahun dan 1 ekor anak sapi/1 ekor anak kerbau berumur 2 tahun lebih.

c. *Pembayaran zakat bagi pemilik domba/kambing*

Domba atau kambing sebagai hewan peliharaan nisabnya antara 40-120 ekor. Pembayaran zakat yang wajib dilakukan setiap tahun dalam jumlah hewan yang sejenis, yaitu :

Memiliki :

40-120 ekor domba/kambing zakatnya 1 ekor domba betina berumur 1 tahun lebih/1 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih.

121-200 ekor domba/kambing zakatnya 2 ekor domba betina berumur 1 tahun lebih/2 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih.

201-399 ekor domba/kambing zakatnya 3 ekor domba betina berumur 1 tahun lebih/4 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih.

- Lebih dari 400 ekor domba/kambing zakatnya 4 ekor betina berumur 1 tahun lebih/4 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih.

- Kelipatan setiap 100 ekor domba/kambing zakatnya 1 ekor betina berumur 1 tahun lebih/1 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih.

6. Zakat jiwa (fitrah)

Selain zakat harta kekayaan seperti disebutkan di atas, maka bagi setiap orang muslim diwajibkan membayar zakat jiwa (selama hidup) yang lazim dinamakan “zakat fitrah”.

Zakat fitrah ialah pemberian yang dilakukan pada setiap akhir bulan Ramadhan selesai menjalankan saum (puasa).

Pembayaran zakat fitrah adalah wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang mampu baik laki-laki maupun perempuan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Pelaksanaan dilakukan sebelum salat Idul Fitri dibayarkan kepada orang yang berhak menerima.

Di Indonesia pelaksanaannya pembayaran wajib zakat fitrah oleh setiap jiwa sebesar 3,1 liter ($2\frac{1}{2}$ kg) beras. Dan pembayaran itu boleh dilakukan dalam bentuk uang, tetapi pengumpul zakat fitrah dengan uang itu akan membelikan beras yang diserahkan oleh pembayar zakat.

3.3. *Orang yang berhak menerima zakat*

Orang yang berhak menerima zakat baik zakat harta kekayaan maupun zakat fitrah ialah :

- a. Fakir yaitu orang yang mempunyai penghasilan terlalu sedikit untuk membiayai keluarganya
- b. Miskin itu yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan.
- c. Muallaf yaitu orang yang telah berobat dan masuk agama Islam tetapimasih lemah imannya.
- d. Orang yang terlibat hutang karena berbuat amal.
- e. Orang yang berjuang (berperang) untuk kemajuan Islam..
- f. Orang bepergian (musafir) untuk tujuan baik dan kehabisan biaya.
- g. Budak belian (kalau ada) yang ingin merdeka untuk menebus diri kepada majikannya.
- h. Amil yaitu orang yang diangkat sebagai pengumpul dan membagikan zakat.

4. Saum (puasa)

4.1. *Arti dan fungsi saum (puasa)*

Saum (puasa) ialah menahan diri dari makan dan minum dan dari sesuatu yang membukakan (membatalkan) sejak fajar sampai matahari terbenam pada bulan Ramadhan (bulan ke 9 tahun muslim).

Sebagai perbuatan ibadat kepada Allah, puasa merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, berpikiran sehat dan berada dalam bulan Ramadhan untuk melakukannya. Mengerjakan puasa berarti mencegah diri dalam berbuat dosa, membersihkan hati nurani, meningkatkan daya tahan mental, memperteguh iman dan taqwanya kepada Allah. Dan puasa itu sebenarnya suatu ibadat berat, karena bagi setiap orang muslim berarti melatih disiplin supaya taat, sanggup menaggulangi segala cobaan, rintangan dan hambatan sampai selesai. Hanya walaupun termasuk ibadat berat kalau sudah terlatih sejak masa remaja tentu akan sangat besar manfaatnya bagi pembinaan jiwa dan daya tahan diri terutama dalam menghadapi masa dewasa. Adapun dasar tujuan utama berpuasa itu mematangkan tauhid mutlak ialah keesaan Allah dalam segala kesempurnaan-Nya dengan memusatkan pikiran dan perasaan dalam membulatkan tekad agar hidupnya lebih taqwa, tekun, teratur dalam memiliki keadabab dan kemanusiaan yang luhur.

Firman Allah dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 183** menyatakan :

“Hai orang-orang yang beriman difardhukan atas kamu puasa sebagaimana telah difardhukan atas umat-umat yang terdahulu dari kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa”.

Berdasarkan firman Allah ini ibadat puasa bukan hayna wajib dilakukan oleh muslim saja melainkan juga bagi umat beragama lainnya. Hal ini nampak dari anak kalimat “...puasa sebagaimana telah difardhukan atas umat-umat yang terdahulu dari kamu...” dalam firman Allah itu. Dan

selain itu kewajiban berpuasa mempunyai fungsi ibadah kepada Allah, meningkatkan taqwa dan merasakan penderitaan yang dialami fakir miskin dalam kehidupan sehari-hari.

4.2. *Kewajiban dan larangan berpuasa*

Setiap orang muslim berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa kalau memenuhi rukun-rukunnya, maka kewajiban puasa itu tidak perlu dijalankan karena bukan kemutlakan bagi dirinya. Dan rukun-rukun wajib menjalankan puasa itu sebagai berikut :

1. Beragama Islam, dewasa dan berpikiran sehat. Bagi anak di bawah umur atau yang sakit ingatan tidak diwajibkan puasa.
2. Mengalami bulan Ramadhan. Maksudnya orang itu pada bulan Ramadhan masih hidup dan berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa.
3. Berniat secara bulat dan ikhlas, beribadat puasa karena Allah sebulan penuh. Niat secara bulat dan ikhlas ini diucapkan setiap malam pada waktu buka puasa dan sahur (makan-minum sebelum fajar).
4. Proses puasa dilakukan dilakukan mulai fajar dengan menghindari larangan sampai matahari terbenam.

Sedangkan larangan yang dapat membatalkan puasa kalau dilakukan atau terjadi pada seseorang ialah :

1. Makan-minum.
2. Memasukkan benda kedalam perut melalui lubang-lubang badan kecuali menghirup udara (bernafas)
3. Sengaja memuntahkan isi perut.
4. Mengadakan hubungan kelamin. Hubungan kelamin yang dilakukan pada siang hari (bukan malam hari) selama

menjalankan puasa bagi pelakunya wajib menebus (membayar kifarat) dengan :

- a. Puasa selama 60 hari (2 bulan), atau
 - b. Memberikan fidiyah (makanan Yang mengenyangkan) kepada 60 orang fakir miskin sebanyak $\frac{3}{4}$ liter (2 kati) bagi setiap orang, atau
 - c. Membebaskan budak belain.
5. Selama menstruasi.
 6. Sengaja mengeluarkan sperma.
 7. Ayan, yaitu kejang badan dan mengeluarkan busa dari mulutnya.
 8. Melahirkan.

Walaupun puasa itu wajib dijalankan oleh setiap orang muslim pada waktu bulan Ramadhan, tetapi bagi orang-orang tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban berpuasa kalau :

1. Sakit dan tidak kuat puasa menuntut keterangan dokter. Tetapi setelah sembuh harus berpuasa sebanyak jumlah yang tidak dijalankan.
2. Bepergian dengan maksud baik, tetapi harus membayar kembali dengan berpuasa sebanyak jumlah hari bepergiannya.
3. Hamil dan menyusui, kehamilan dan menyusui ini dapat menggantinya dengan berpuasa bebas (setelah bulan Ramadhan) atau melakukan fidiyah selama bulan Ramadhan setiap hari memberikan 1 kati makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin.
4. Pekerja dan buruh berat dapat diganti dengan melakukan fidiyah.

5. Para jompo yang sakit kronis dapat mengganti dengan melakukan fidiyah.
 6. Anak-anak dibawah umur dan orang sakit ingatan.
- Selama bulan Ramadhan dianjurkan salat sunnat tarawih sebanyak 11 raka'at dilakukan setelah buka puasa dalam berjemaah. Dan pada tanggal 1 Syawal yang dinamakan Hari Raya Fitri (Idul Fitri) diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri.

5. Hajj (ibadat haji)

Ibadat haji ialah menjalankan upacara ibadat atau kebaktian kepada Allah secara tulus karena perintah Allah karena rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Menurut arti bahasa arabnya haji adalah sengaja bermaksud menuju sesuatu dengan keyakinan dan kemantapan. Dan berdasarkan pengertian ini, maka ibadat haji diwajibkan kepada setiap orang Islam laki-laki perempuan yang sudah dewasa, berpikiran sehat, mampu dalam arti rohaniah-jasmaniah, berkemampuan dalam biaya pergi-pulang dan biaya kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama menjalankan haji. Dasar hukum dari kewajiban menjalankan haji itu adalah firman Allah dalam **Surah (3) Al-Imran ayat 97** yang menyatakan : “Allah mewajibkan haji ke rumah suci (Ka’bah) atas semua manusia yang kuasa pergi kesana”.

Dari firman Allah ini walaupun jelas bahwa bagi setiap orang Islam wajib menjalankan haji, tetapi kewajiannya kalau memenuhi syarat-syarat wajib. Hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai tidak sah menjalankan haji dalam susah payahnya sejak awal usaha sampai upacara kebaktian selesai.

Adapun syarat-syarat wajib bagi haji itu sebagai berikut :

1. Islam, artinya bagi setiap orang yang beragama Islam wajib menjalankan ibadat haji. Sedangkan bagi orang yang tidak atau belum beragama Islam bukan merupakan kewajiban bahkan tidak sah kalau menjalankan haji.
2. Berpikiran sehat, maksudnya dapat menggunakan pikiran dengan baik, tidak terganggu ingatan dan tidak tergoncang kewajibannya. Bagi orang sakit ingatan dan tidak dapat menggunakan pikirannya dengan baik tidak wajib menjalankan haji.
3. Baliq, artinya sudah berusia minimal 15 tahun atau telah ada tanda-tanda lain pada dirinya. Ukuran baliq ini sebenarnya hanya sebagai tanda bukti adanya perubahan fisik dari masa anak-anak ke masa remaja dan perubahan psikis dalam cara berpikir terutama dapat membedakan antara baik dan buruk.
4. Merdeka, maksudnya mempunyai kebebasan dalam menggunakan hak yang dimiliki dan tidak ada di bawah kekuasaan orang lain (bukan anggota keluarga).
5. Mampu, maksudnya dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan (diwakilkan) kepada orang lain disamping beberapa hal yang perlu dipenuhi seperti biaya pergi-pulang dan menggunakan angkutan yang pantas. Sedangkan bagi seorang wanita diwajibkan pergi bersama suami, muhrimnya, atau wanita lain yang dapat dipercaya.
6. Bagi orang yang lemah fisik tetapi memiliki biaya cukup diperbolehkan mewakilkan ibadat hajinya kepada orang lain.

Kalau semua syarat ini dipenuhi, maka kewajibannya menjalankan haji dapat dilakukan pada bulan 12 (Dzu'l-hijjah) tahun muslim dengan memperhatikan dan memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun dalam upacara haji itu sebagai berikut :

1. *Ihram*

Setiap orang sebelum menjalankan haji pertama kali diharuskan melakukan ihram, yaitu menggunakan dua lembar kain putih tanpa jahitan, berniat secara ikhlas karena Allah menjalankan haji.

Pakaian ihram ini diselubungkan sekeliling badan. Bagi pria satu helai untuk menutupi tubuh dari pinggang kebawah dan satu helai lagi menutupi badan bagian atas sampai bahu. Sedangkan bagi wanita dipakai untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan.

Selang ihram dilarang menggunting kuku, rambut, bercukur, dan menyisir. Bagi suami istri dilarang melakukan hubungan kelamin. Dan ihram itu tidak boleh ditinggalkan karena kalau ditinggalkan hajinya tidak sah.

2. *Wukuf*

Yang disebut wukuf ialah berhenti di padang pasir Arafah. Wukuf ini prosesnya sejak hukum haji dimulai yaitu pada tanggal 8 Dzu'l-hijjah (satu hari setelah ihram) setelah melakukan perjalanan pertama dari kota Mekah ke Arafah melalui kota kecil Mina dan Muzdalifah. Di kota Muzdalifah orang boleh bermalam. Pada tanggal 9 Dzu'l-hijjah yang disebut 'Hari Arafah' setiap orang wajib berada di padang Arafah dari pukul 12.00 siang sampai matahari terbenam. Dan waktu setengah hari berada di padang Arafah itulah sebenarnya yang dinamakan wukuf. Wukuf wajib hukumnya untuk dilakukan, karena kalau ditinggalkan atau terlambat berarti hajinya tidak sah.

3. *Tawaf*

Setelah wukuf dijalankan umumnya pada malam hari orang-orang meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dan bermalam di sana. Sebelum fajar dilakukan wukuf pendek dan pada pagi harinya mulailah melakukan ifhadah yaitu perjalanan dari muzdalifah ke Mina. Sesampainya di Mina ada 3 upacara yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Upacara melempar batu, dilakukan oleh setiap orang dengan melemparkan 7 buah batu berturut-turut ke tumpukan batu yang disebut Jumratul ‘Aqabah dengan mengucapkan “Bismillahi, Allahu Akbar” (dengan nama Allah, Allah yang maha besar).
- b. Upacara kurban binatang sembelihan, sunnat hukumnya dan hanya bagi yang mampu membeli kambing, domba, unta, atau lembu saja yang boleh berkurban. Dari upacara kurban tanggal 10 Dzu’l-hijjah inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Id-al’qurban, Id-ul-nahr, Id-al-adha (hari raya kurban). Dan pelaksanaan dari penyembelihan binatang kurban itu dilakukan setelah salat Idul Adha. (bagi yang tidak haji)
- c. Upacara mencukur rambut kepala, dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dengan pengguntingan. Dan menggunting rambut itu sekurang-kurangnya tiga helai.

Setelah pengguntingan selesai diperkenankan berpakaian biasa lagi dan boleh melakukan upacara malam di Mina dengan melempar tiga kali jumrah masing-masing sebanyak 7 buah batu kecil atau pergi ke Makah untuk melakukan upacara wajib tawaf dan sa’i.

Upacara tawaf artinya mengelilingi bangunan Ka’bah yang berbentuk kubus sebanyak tujuh kali dan berakhir di batu hitam

(hajaru'l-aswad) yang terletak di dinding sebelah timur bangunan itu. Upacara tawaf ini dilakukan pada tanggal 12 Dzu'l-hijjah dan tidak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan hajinya tidak sah.

4. *Sa'i*

Sa'I artinya berjalan kaki pergi-pulang sebanyak tujuh kali antara bukit Safa dan Marwa. Upacara ini dilakukan setelah selesai menjalankan upacara tawaf.

Selain ibadat haji yang dilakukan pada bulan 12 Dzu'l-hijjah tahun muslim itu ada juga kewajiban ibadat Umrah. Dan ibadat Umrah dasar hukumnya sama dengan ibadat haji, yaitu firman Allah dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 196** menyatakan : Sempurnakanlaholehmu haji dan umrah karena Allah.

Dari firman Allah ini menunjukkan bahwa selain ibadat haji bagi orang muslim diwajibkan juga menjalankan ibadat Umrah, berarti hukum umrah adlah fardhu ain bagi setiap orang muslim. Dan Ihramnya dapat dilakukan setiap dan sepanjang tahun kecuali sedang menjalankan ibadat haji dengan memenuhi rukun-rukun tertentu. Adapun rukun-rukunnya sebagai berikut :

1. *Ihram*

Orang yang menjalankan umrah harus dalam keadaan ihram yaitu memakai pakaian ihram yang terdiri dua helai kain putih tanpa jahitan dan berniat secara ikhlas sengaja umrah karena Allah.

2. *Tawaf*

Berjalan kaki mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali mulai dari hajaru'l aswad (batu hitam).

3. *Sa'i*

Berjalan kaki pergi pulang sebanyak tujuh kali antara bukit Safa dan Marwa.

4. *Bercukur*

Sesampainya di Marwa selesai Sa'I orang harus mencukur (menggunting) rambut sekurang-kurangnya tiga helai.

Pelaksanaan rukun umrah ini wajib dilakukan secara tertib dan menghindarkan larangan-larangan yang sama dengan ibadat haji dalam setiap upacara.

Kelima rukun Islam seperti diterangkan di atasdijalankan sebagai fardhu ain bagi setiap orang muslim, tidak boleh dilakukan oleh satu dua orang saja dalam kelompok, kemudian yang lainnya bebas dan mendapat pahala dengan perkecualian dari beberapa rukun kalau memang benar-benar berhalangan. Dan dari kelima rukun Islam itu ada beberapa rukun Islam selain fardhu ain juga ada hukum sunnatnya. Artinya mengerjakan fardhu ainnya dapat juga setelah itu mengerjakan sunnatnya. Adapun rukun Islam yang mempunyai hukum sunnat yaitu salat dan puasa :

1. *Salat*

Salat sunnat selain salat wajib lima waktu sehari yang dapat dilakukan oleh setiap orang muslim, terdiri dari :

- a. *Salat sunnat tetap*, dilakukan sebelum dan sesudah setiap kali salat wajib. Dan alat sunnat tetap ini panjangnya dua raka'at sebelum salat wajib kemudian dua raka'at lagi sesudah salat wajib.
- b. *Salat sunnat Al-witr (witr)*, dilakukan untuk mengganjilkan raka'at salat sunnat yang genap sesudah salat wajib dan salat tetap. Salat sunnat witr ini dikerjakan dapat 1, 3, 5 raka'at dan seterusnya dengan niat untuk mengganjilkan raka'at yang genap dari salat sunnat sebelumnya.
- c. *Salat Tahajjud*, dilakukan pada malam hari sebelum subuh setelah bangun tidur dengan jumlah raka'at genap. Salat ini

biasa dikerjakan oleh seseorang dalam keinginannya dalam memperoleh jalan petunjuk baik dari Allah.

- d. *Salat sunnat Al-dhuha*, dilakukan pagi hari sekitar pukul 09.00 sampai waktu lohor sebanyak dua raka'at atau lebih dan sebanyak-banyaknya dua belas raka'at.

Keempat salat sunnat ni dalam pelaksanaannya dikerjakan secara individual tidak dapat diwakilkan dan sesuai rukun-rukun salatunya. Sedangkan salat sunnat yang dikerjakan berjemaah (bersama-sama) tetapi tidak mutlak antara lain :

- a. *Salat sunnat At-tarawih (teraweh)*, dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri pada setiap malam pada bulan Ramadhan dengan jumlah raka'at yang diserahkan kepada keyakinan masing-masing.
- b. *Salat sunnat gerhama*, ada dua yaitu :
 1. *Salat al-kusuf* dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu gerhana matahari sebanyak dua raka'at.
 2. *Salat al-khusuf* dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu gerhana bulan sebanyak dua raka'at.
- c. *Salat al-istisqaq*, dilakukan bersama-sama dilapangan sebanyak dua raka'at dengan tujuan meminta hujan.

2. **Puasa**

Puasa sunnat selain puasa wajib bulan Ramadhan dianjurkan pelaksanaannya pada hari-hari tertentu, yaitu :

- a. *Puasa bulan Syawal* dilakukan setelah bulan Rhamadhan sehari setelah Idul Fitri sebanyak enam hari. Dan puasa ini umumnya sebagai penebus puasa bulan Ramadhan yang tidak sepenuhnya dilakukan karena berhalangan.
- b. *Puasa hari Arafah* dilakukan oleh hanya bagi orang yang tidak menjalankan ibadat haji. Waktunya pada tanggal 8 dan 9 Dzu'l-hijjah (dua hari sebelum Idul Adha).

- c. *Puasa hari Asyura* (tanggal 10 Muharam) pada bulan pertama tahun muslim dilakukan untuk menghapus dosa satu tahun lalu.
- d. *Puasa hari Senin dan Kamis* dilakukan untuk tujuan kebaikan.
- e. *Puasa tengah bulanan* dilakukan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Tetapi puasa ini tidak dilazimkan dalam pelaksanaannya.

Dan melihat kepada sifatnya baik salat maupun puasa ini sebagai sunnat, maka bagi mengerjakan akan mendapat pahala dan bagi yang meninggalkan tidak berdosa. Karena itu dianjurkan bagi orang muslim untuk melakukannya.

Mengenai perintah agama dimaksudkan berkenaan dengan tindakan baik yang menyangkut kegiatan rukun Islam maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari antar sesama manusia, kegiatan itu secara individual yang dilakukan berkenaan dengan kebutuhan hidupnya dalam menggunakan petunjuk-petunjuk tertentu. Dan perintah agamanya ini terdiri dari hal yang wajib dilakukan, dianjurkan melakukan, dan dilarang melakukan, karena mempunyai sanksi hukum dari Allah. Sanksi hukumnya terdiri dari memperoleh pahala (ganjaran), dosa, tidak sah dan batal kalau melakukan perbuatan yang termasuk perintah agama itu. Perintah agama yang menyangkut kegiatan rukun Islam dan pergaulan sehari-hari itu terdiri atas :

1. *Wajib (fardhu)*, ialah segala sesuatu yang harus dilakukan bagi setiap orang dewasa dan berpikir sehat. Kalau tidak dilakukan sanksinya berdosa dan kalau dilakukan mendapat pahala (ganjaran) di akhirat.

Wajib (fardlu) ini ada dua, yaitu :

- a. *Fardlu ain* ialah segala sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap orang. Kewajiban itu tidak dapat dilakukan oleh orang

lain atau kelompok orang untuk membebaskan seseorang atau kelompok orang.

Misalnya : salat, puasa, berbakti pada orang tua.

b. *Fardlu Kifayah* ialah segala sesuatu yang menjadi kewajiban bersama. Kalau tidak dilakukan oleh semua orang di tempat itu berdosa dan kalau dilakukan oleh seorang atau sebagian orang, maka semuanya akan terhidar dari dosa dan mendapat pahala.

Misalnya :

- Mengurus mayat sampai penguburan,
- Membuat masjid di kampung,
- Membuat sekolah agama (madrasah),
- Membuat jembatan,
- Membuat bendungan,
- Membuat sumur. Membersihkan sampah dan selokan.

2. *Sunnat* (mandub atau mustahab), yaitu segala sesuatu akan mendapat pahala kalau dikerjakan dan tidak akan berdosa kalau ditinggalkan.

Misalnya :

- Puasa pada hari Senin dan Kamis,
- Salat Idul Fitri/Idul Adha/tarawih,
- Sedekah.

3. *Haram*, ialah segala sesuatu yang dilarang agama. Kalau dilakukan berdosa dan kalau ditinggalkan mendapat pahala.

Misalnya :

- Makan babi, mensuri, meminum minuman keras, mabuk, zinah, memperkosa, berbuat cabul, judi, menipu, korupsi, membunuh, menyiksa, makan darah.

4. *Makruh*, ialah sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang, tetapi kalau dihindarkan (tidak dilakukan) akan mendapat pahala.

Misalnya :

- Merokok,
 - Makan jengkol, petai dan sejenisnya.
5. *Mubah (jaiz atau halal)*, ialah segala sesuatu yang tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan atau tidak dilarang. Sanksi hukumnya bagi yang mengerjakan tidak mendapat pahala atau dosa.

Misalnya :

- Main sepak bola,
- Olah raga,
- Makan nasi dan sebagainya.

Kelima perintah agama yang berkenaan dengan kegiatan rukun Islam dan pergaulan sehari-hari ini perlu selalu diingat, karena tidak ada dosa seseorang yang dapat ditanggung orang lain atau memperoleh pengampunan kecuali dari Allah. Tetapi bagi orang yang belum dewasa (akil baliq) walaupun sehat pikirannya masih ada alasan pengampunan. Hanya saja untuk pembinaannya perlu melakukan sedini mungkin agar tidak menjadi kebiasaan dalam berbuat hal-hal yang dilarang atas perintah agama. Selain dari kelima perintah agama ini juga tidak diabaikan mengenai keadaan kebersihan tubuh manusia. Hal ini terutama yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan salat sebagai salah satu bagian dari rukun Islam. Alasannya ialah kalau dilihat dari kodratnya sejak dilahirkan tubuh manusia itu mengandung kotoran-kotoran sebagai akibat dari sisa-sisa makanan, minuman dan keadaan lingkungan. Kalau kotoran-kotoran itu dibiarkan pada tubuh, pakaian dan di sekitar lingkungan manusia, maka akan

timbul penyakit dari kuman-kuman dan bakteri yang hidup di dalam kotoran itu. Karena itu setiap kotoran manusia dan atau binatang dianggap najis/kotor dan harus dibersihkan dengan air murni yang tidak berubah warna atau berbau.

Tingkat jenis najis ada tiga, yaitu :

1. *Mukhaffafah (najis ringan)* ialah kotoran bayi yang masih menyusu dari air susu ibu. Cara membersihkannya cukup dengan menyiram air sekurang-kurangnya satu kali atau sampai tidak kelihatan bekas kotoran.
2. *Mutawasithah (najis sedang)* ialah kotoran manusia setelah lepas dari minum air susu ibu dan memulai makan makanan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh manusia. Semua yang keluar dari tubuh manusia baik berbentuk cairan seperti air kencing, darah dan nanah maupun yang lunak atau keras merupakan najis sedang. Cara membersihkannya dengan menyiram air bersih berulang kali dan sekurang-kurangnya tiga kali sampai hilang baunya.
3. *Mughalladhah (najis berat)* ialah semua kotoran dari binatang yang diharamkan dan air liur anjing. Cara membersihkannya dengan menyiram air bersih sekurang-kurangnya tujuh kali dan digosok dengan abu bersih sampai hilang segala bentuk dan baunya.

Ketiga tingkatan najis ini kalau tidak dibersihkan sesuai cara membersihkannya selain tidak sah dalam mengerjakan salat juga akan menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Jadi merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan sesuai pelestarian dalam mengerjakan rukun Islamnya secara murni.

4. Hukum Islam dan Hukum Lainnya

Hukum Islam sebagai salah satu bangunan hukum mempunyai persamaan dan perbedaan dengan bangunan hukum lainnya. Bangunan-bangunan hukum itu terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum sebagai norma kewajiban dan larangan bagi setiap orang dalam membatasi tingkah lakunya dan serta membatasi hubungan antar sesama manusia dengan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar. Tetapi pelaksanaan aturan masing-masing bangunan hukum itu dilihat dari sistemnya memiliki konsepsi hukum sendiri yang diterapkan dalam bangunan hukumnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan yang mendasar dan prinsipil antara hukum Islam dan hukum lainnya. Jadi walaupun persamaannya terdiri dari aturan hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia, tetapi konsepsi dari masing-masing hukum yang berbeda berakibat timbulnya perbedaan dalam proses pelaksanaannya.

Konsepsi hukum Islam berorientasi kepada agama dengan dasar-dasar doktrin ‘keyakinan’ (ilmu al-Yaqin). Dasar-dasar doktrin keyakinan ini maksudnya meyakinkan manusia terhadap dogma-dogma dalam hukum syariat untuk membentuk manusia dari merasakan sesuatu dengan menggunakan hati nuraninya dalam memahami persoalan baik dan buruk. Kemudian dirinya akan melaksanakan hal baik itu melalui tingkah laku sesuai hukum syariat dengan penuh kesadaran. Dan kesadaran hukumnya terbentuk melalui akal (rasio) yang secara wajar tidak tergoyahkan, karena telah ada keyakinan terlebih dahulu. Tetapi bagi manusia yang menjalankan Islam tanpa penuh keyakinan tidak akan dapat bertingkah laku dengan menggunakan kesadaran hukumnya, yang timbul dari rasionya, dalam menjalankan hukum syariat. Dan karena syariat merupakan hukum berarti mempunyai sanksi bagi

pelanggarnya. Dalam hukum syariat sanksi itu ada dua, yaitu hukuman yang dijalankan semasa hidup dan hukuman yang akan diterima kelak di akhirat.

Jadi tingkah laku manusia memacu kepada sumber hukumnya yang berintikan hukum syariat. Sumber hukum Islam merupakan satu kesatuan yang berasal dari firman Allah dan diwahyukan hanya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum lainnya yaitu hukum berat dan hukum adat yang ketentuan-ketentuannya dibuat oleh manusia. Konsepsi kedua hukum ini (Barat dan Adat) berorientasikan kepada kelompok sosial dalam hidupnya dengan dasar kesadaran untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukumnya. Timbulnya kesadaran manusia mentaati hukum berasal dari rasio untuk kepentingan pergaulan kelompok sosial dalam mencapai tata tertib.

Dalam hukum barat kesadaran hukum masyarakat selain kerelaan untuk mentaati aturan hukumnya juga dapat dipaksakan agar tujuan tata tertib dapat tercapai. Bagi hukum adat kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan hukumnya agar mencapai tata tertib karena adanya ketakutan untuk melanggar kehendak suci nenek moyangnya. Karena itu bagi seseorang yang tidak pernah rela, tidak takut kepada paksaan atau tidak takut kepada kehendak suci nenek moyangnya kemungkinan untuk mentaati ketentuan hukum yang berlaku tidak pernah terbentuk melalui kesadaran hukumnya. Akibat dari kegiatan-kegiatan yang tidak timbul kesadaran hukum seseorang tentu akan sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi kalau ada dorongan lain dari luar yang tidak pernah akan memiliki kesadaran hukum.

Sebagai hukum, maka hukum barat dan hukum Adat itu memiliki sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi dan dijalankan selama hidupnya. Sumber hukum dari hukum barat berasal dari pemimpin-pemimpin organisasi kelompok sosial atau Negara yang berwenang pada masanya untuk membuat aturan hukum. Dan asal sumber hukum barat semula dari kaisar Justinianus yang dikembangkan melalui kodifikasi di Eropah daratan dan para penegak hukum dalam putusan-putusannya, dan kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan melalui unifikasi dan yurisprudensi sebagai hukum positif di Eropah kepulauan dan Amerika.

Sedangkan sumber hukum dari hukum adat berasal dari kehendak suci nenek moyangnya mengenai hal yang baik dilakukan dan dikembangkan melalui lembaga-lembaga adat, kepala masyarakat dan cerita-cerita yang turun-temurun.

5. Perkembangan Hukum Islam dan Mazhab-mazhabnya

Latar belakang suatu kehidupan akan banyak mewarnai kehidupan lebih lanjut dari seseorang, kelompok orang maupun suatu bangsa. Kemunduran kehidupan atau kemajuannya akan terlihat sebagai hasil proses kehidupan itu pada masa tertentu. Demikian juga bagi hukum Islam lahir sebagai akibat latar belakang kehidupan masyarakat Arab dan berkembang melalui proses kehidupan masa tertentu. Dan lahirnya agama Islam itu tidak berbeda dengan lahirnya agama-agama terdahulu, yaitu dari adanya latar belakang kehidupan masyarakat tertentu yang pada umumnya menjauhkan diri dari keyakinan kepada adanya Allah. Karena itu marilah kita lihat pokok-pokok kehidupan masyarakat Arab sebelum lahir agama Islam, perkembangan agama Islam dan

hukum Islam serta aliran-aliran (mazhab-mazhab) dalam rukun Islam.

5.1. Masyarakat Arab pra-Islam

Masyarakat Arab sebagai suatu bangsa termasuk dalam kesatuan bangsa Semit. Mereka hidup di jazirah Arab yang terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan utara yang disebut kaum Badawi dan golongan selatan bermukim di Yaman, Hadramaut dan Oman. Kaum Badawi pada umumnya bertempat tinggal di tenda-tenda dan berpindah-pindah. Karena itu mereka tidak dapat membentuk kelompok sosial yang teratur dalam suatu kota. Tetapi dalam kesatuan kelompok sebagai suku hubungannya sangat dekat. Hal ini terlihat dari rasa bangga terhadap sukunya yang saling menolong antar anggota kelompok.

Sedangkan golongan selatan hidupnya teratur dalam kota-kota dan banyak yang menjadi pengusaha (pedagang). Hubungan dengan bangsa lain dilakukan dengan berkafilah melalui padang pasir dan juga dengan pelayaran.

Kepercayaan bangsa Arab adalah animisme disamping mempercayai adanya jin sebagai kekuasaan besar. Mereka juga mengenal Allah sebagai pencipta alam semesta dan menghormati mekah sebagai kota suci tempat pertemuan dalam tukar menukar barang kebutuhan sehari-hari.

Dalam kehidupan dan perubahan zaman terjadi suatu kemerosotan. Asas perkawinan poligami mengakibatkan kedudukan wanita menjadi berbeda-beda tergantung pada perlakuan suami kepada istri dalam kehidupan keluarga. Wanita tidak memiliki hak apapun dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam mewaris bahkan dapat dijadikan warisan. Dan dengan pakaian adatnya yang terdiri dari celana panjang, kurbah dan kerudung, kaum wanita itu dilarang bergaul dengan kaum pria.

Kalau ada penyimpangan dari larangan ini sebagai akibat dari kehidupan demokrasi suatu keluarga. Sedangkan kehidupan kaum prianya yang bebas baik dalam memperlakukan kaum wanita, pergaulan dengan bangsa lain maupun kehidupan malam mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan tingkah laku yang tidak manusiawi. Suasana kehidupan masyarakat Arab tidak mempunyai pedoman dan kesatuan dalam hidup itu menjadi pemikiran Nabi Muhammad seorang anak laki-laki yatim piatu dari kaum Quraisy. Dan terjadilah perubahan setelah beliau diangkat sebagai Rasul Allah dalam menyiarkan agama Islam.

Dalam memperjuangkan persamaan hak individu, tegaknya kesatuan mausia sebagai makhluk Allah dan kepercayaan terhadap kebesaran Allah memang tidak mudah. Apalagi rintangannya datang terutama dari kaumnya sendiri dan bangsa Arab, tetapi keyakinan beliaulah yang dapat mewujudkan segalanya.

5.2. *Sejarah singkat Nabi Muhammad*

Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabi'ulawal tahun Gajah (570 M) dari ibu yang bernama Aminah. Pada saat hari kelahirannya itu Abdullah (bapaknya) meninggal dunia di Madinah setelah pulang dari perjalanan dagang ke Syiria. Sejak lahir Muhammad dipersusukan oleh Halimah orang Badawi dari kota kecil Badiyang terletak di luar kota Mekah. Hal seperti itu telah merupakan bagi tradisi bagi penduduk Mekah yang mampu selalu mempersusukan anaknya yang baru lahir kepada orang Badawi.

Setelah Muhammad berusia 2 tahun oleh Halimah dikembalikan lagi kepada ibunya, tetapi Aminah menyuruh membawanya kembali karena di Mekah sedang terjangkit penyakit

menular. Sampai berusia 4 tahun Muhammad berada di bawah asuhan Halimah dan setelah itu dikembalikan kepada ibunya.

Pada usia 6 tahun Muhammad menjadi yatim piatu, ibunya wafat di kota Abwa dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk berziarah ke kuburan Abdullah. Setelah itu berturut-turut diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun, kemudian pamannya Abu Thalib sangat tertarik terhadap tindak tanduk dan sikap Muhammad yang luhur itu.

Pada usia 12 tahun Muhammad oleh pamannya diajak ikut berdagang ke Syiria yang lama kelamaan menjadi pemimpin dari kafilah seseorang pedagang kaya bernama Khadijah. Antara Muhammad dan Khadijah di luar hubungan pemimpin kafilah dan pengusaha terjalin keakraban yang menimbulkan perkawinan. Pada waktu perkawina terjadi Muhammad berusia 25 tahun dan khadijah berusia 40 tahun. Dari perkawinan itu mempunyai keturunan 7 orang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.

Mendekati usia 40 tahun Muhammad sering menyendiri meninggalkan keramaian dan kehidupan keluarga pergi ke gua Hira di luar kota Meka. Suatu malam pada saat perasaan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, terdengar suara malaikat mengucapkan kata “bacalah”, dan dijawab Muhammad “aku tidak bisa membaca”. Ucapan seperti itu tiga kali dilakukan dengan sebelumnya Muhammad dipeluk erat-erat oleh malaikat tersebut. Yang ketiga kalinya malaikat itu berucap “bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang belum diketahuinya.”

Dengan gemetar dan keringat bercucuran Muhammad mulai membaca berulang-ulang. Malam itu juga Muhammad pulang

dengan rasa takut dan cemas, karena untuk pertama kali itulah berhadapan dengan malaikat. Sesampainya di rumah semua kejadian itu disampaikan kepada Khadijah. Keesokan harinya mereka mengunjungi paman Khadijah yang bernama Waroqah bin Naufal seorang ahli al kitab (kitab-kitab suci Taurat, Zabur dan Injil). Setelah mendengar kejadian yang diceritakan Muhammad itu ia membenarkan bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat Gibrail, sebab cirri-cirinya sama dengan cirri-ciri yang datang kepada para nabi sebelumnya seperti Musa, Ibrahim, Yakob, Ismail, Zakaria, Yusuf, Yahya dan Isa. Kemudian ia mengatakan bahwa Muhammad benar-benar menjadi nabi Rasul yang terakhir untuk menyiarkan agama wahyu Allah ialah agama Islam bagi seluruh umat manusia.

Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad itu jatuh pada tanggal 17 bulan Ramadhan tahun 610 yang kemudian dalam sistematika Quran menjadi **Surah (96) Al-Alaq ayat 1-5**. Sedang peristiwanya yang terkenal dalam sejarah Islam dinamakan “Nuzurul Quran”, yaitu turunnya wahyu Quran yang pertama-tama.

Sejak turunnya wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad sadar bahwa tugas dan kewajibannya sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir sangat berat, terutama menghadapi masyarakat Arab khususnya umat manusia umumnya dalam mengembalikan kepercayaan yang besar dan penyerahan kepada Allah.

Pelaksanaan penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad semula dilakukan kepada istrinya dengan menjelaskan tentang ajaran agama itu. Istrinya menerima dan langsung berikrar sebagai seorang Islam yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya. Kemudian Zaid bin Haritham (pembantunya) orang negro menerima dan masuk Islam, setelah itu

Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar (sahabat karibnya). Mereka inilah yang pertama kali menerima ajaran agama Islam dari Nabi Muhammad. Selanjutnya menyusul sahabat lain seperti Usman, Zubair, Abd-al rahman, Bilal dan Ammar bin Yasir.

Bantuan terbesar dalam penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh Waroqah bin Naufal. Dengan sikapnya yang jujur, ucapannya dipercaya, adil, selalu berbuat baik dan penolong sesama manusia sudah lama ia dikenal oleh masyarakat Mekah. Karena itu lama kelamaan pengikut Islam menjadi banyak. Dalam membantu nabi Muhammad digunakan lima pokok bimbingan, yaitu :

1. Memusatkan penyerahan hanya kepada Allah Yang Maha Esa.
2. Tinggalkan persembahan kepada dewa berhala.
3. Berbuatlah baik kepada tetangga, tolong-menolong dan membangun masyarakat dengan baik.
4. Hindarilah perjudian, mabuk, pelacuran, pemerasan dan penindasan.
5. Peliharalah persatuan, kerukunan dan perdamaian.

Ia selalu mengemukakan bahwa kebenaran Allah yang Maha Esa adalah wahyu kepada para nabi yang terdahulu dan Nabi Muhammad, karena itu tidak masuk akal kalau dewa-dewa sebagai Tuhannya, apalagi patung berhala yang dibuat oleh manusia.

Walaupun pengikut agama Islam bertambah banyak, tetapi musuhnya juga tidak sedikit. Mereka terdiri dari penyembah berhala dan dewa-dewa yang dibenarkan oleh pribadi-pribadi pemerintah Mekah. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sofyan. Ketiga tokoh ini dengan kelompoknya menentang ajaran Islam terang-terangan. Penganut agama Islam selalu diancam dengan siksaan-siksaan yang tidak manusiawi. Bilal misalnya, ia mengalami siksaan

pemukulan dengan rotan, dijemur dan ditindih dadanya dengan batu besar. Ammar bin Yasir bersama istrinya, masing-masing diikat tangan kanannya ke seekor unta, tangan kirinyapun kepada seekor unta lain kemudian ditarik pada arah berlawanan dengan ancaman supaya mencabut iman kepercayaan kepada Allah dan kembali menyembah berhala lagi. Kedua orang itu tetap dengan keyakinannya dan wafatlah mereka dalam keadaan yang menyedihkan, karena badannya robek akibat tarikan unta-unta itu. Banyak siksaan lain yang dilakukan oleh kelompok penentang ajaran agama Islam di Mekah. Nabi Muhammad tidak lepas dari siksaan mereka. Tetapi berkat petunjuk Allah dengan wahyu-wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad tidak beranjaklah pengikut ajaran agama Islam itu dari keyakinannya bahkan bertambah banyak.

Sikap keras dari musuh-musuh penentang tidak berhasil melumpuhkan keimanan umat Islam, kemudian di tempuh dengan jalan lunak. Nabi Muhammad dibujuk dan ditawarkan kedudukan yang baik dengan akan diangkat menjadi raja di Mekah, diberi harta kekayaan yang melimpah dan diberi wanita yang paling cantik asalkan berhenti mengajarkan agama Islam. Tawaran itu ditolak nabi. Akhirnya Abu Jahal dan kelompoknya mengambil keputusan untuk menghancurkan umat Islam dan akan membunuh nabi Muhammad. Rencana pembunuhan itu ditetapkan dan kemudian pada malam rencana itu dilakukanlah dengan mendatangi rumah nabi Muhammad. Tetapi gagal karena Allah yang Maha Mengetahui menurunkan wahyu agar nabi malam itu tidak tidur ditempat tidurnya dan diganti oleh keponakannya yang bernama Ali dengan berselimut merah yang biasa digunakan nabi. Setelah wahyu Allah dilaksanakan dan pada malam itu juga nabi mengajak Abu Bakar meninggalkan kota Mekah hijrah ke

madinah. Mereka keluar dari kota Mekah berjalan kaki dan menginap di gua Saur selama tiga hari untuk menghindarkan kejaran Abu Jahal bersama kelompoknya.

Dengan ma'mun Allah pintu gua itu ditutup oleh sarang laba-laba sedangkan bekas telapak kakinya hilanh ditiup angin.

Hijrah (memutuskan hubungan dengan kaumnya dan pindah) ke Madinah dari Mekah itu dilaksanakan dua tahun setelah nabi Menjalankan Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang erjadi pada tanggal 27 malam bulan Rajab, yaitu Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam (Isra') dari Ka'bah (Mekah) ke Baitul Maqdis (Darussalam) yang diiringi oleh malaikat Gibrail dan melanjutkan perjalalan ke lapisan langit ketujuh (Mi'raj). Dari perjalanan mi'raj ini Nabi Muhammad mendapat perintah "salat lima kali dalam semalam".

Perjalanan hijrah dilanjutkan setelah tiga hari berdiam di gua Saur dan pada hari senin, tanggal 12 Rabi'ul awal tahun 622 nabi bersama Abu Bakar tiba di Madinah dan disambut oleh penduduk Islam di sana. Hari sampainya beliau ke Madinah itu kemudian dijadikan awal dari tahun hijrah.

Di Madinah kegiatan yang semula dilakukan oleh nabi Muhammad, yaitu mendirikan Masjid yang akan mengarah ke Darussalam sebagai kiblat. Kiblat itu kemudian diubah ke Ka'bah (Mekah) berdasarkan kepada wahyu Allah yang dalam Quran dinyatakan pada **Surah (2) Al Baqarah ayat 144** berbunyi : "karena itu palingkan mukamu ke mesjid yang mulia di manapun kamu berada". Dengan firman Allah ini bagi setiap muslim dalam menunaikat ibadah salat selalu menghadap dirinya kea rah Ka'bah.

Tindakan lain yang dilakukan setelah itu ialah pembangunan ekonomi. Peningkatan kerjasama bidang ekonomi dilakukan

dengan cara gotong-royong dalam pengembangan perdagangan, perkebunan, peternakan dan lainnya.

Kekuatan ekonomi dengan menggunakan sistem gotong-royong itu menimbulkan perasaan kesatuan, persaudaraan dan pemerataan dalam kehidupan penduduk madinah.

Setelah sistem itu berjalan, maka sejak tahun kedua hijrah (tahun 624) dilaksanakan kewajiban bagi orang yang berada (mampu) untuk memberi zakat dan sedekah kepada orang tidak mampu.

Dengan demikian kehidupan umat Islam di Madinah menjadi baik, pendapatan merata dan kekuatan ekonomi menjadi stabil. Kemudian kegiatan selanjutnya Nabi Muhammad mempersiapkan kekuatan pertahanan rakyat dengan melatih tenaga-tenaga sukarela dalam usaha mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu ada serangan dari musuh baik dari dalam maupun dari luar Madinah. Persiapan itu dilakukan karena pengalaman yang diperoleh pada tahun 2 Hijrah (H) yang diserang oleh kaum musrik Mekah di luar kota Madinah sebagai akibat mereka dilarang masuk kota setelah kembali ke Syiria. Selain itu ada berita bahwa kaum musrik Mekah masih ingin menumpas umat Islam dan akan menyerang madinah.

Tindakan Nabi Muhammad mempersiapkan kekuatan pertahanan rakyat dilakukan berdasarkan adanya firman Allah yang memperkenankan untuk mengangkat senjata dalam memerangi orang-orang kafir yang menyerang orang-orang Islam. Firman Allah itu kemudian dicantumkan dalam Al Quran **Surah (2) Al Baqarah ayat 190** yang menyatakan bahwa “perangi olehmu dengan jalan Allah bagi orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas”. Firman Allah itu datang setelah Nabi Muhammad dan umatnya pada tahun 6 H ditolak oleh orang-orang musrik Mekah untuk berziarah ke Ka’bah. Dan pada saat itu terjadi perjanjian Hudaibiyah yang isinya menyatakan :

1. Tahun ini umat Islam Madinah tidak diperkenankan berziarah ke Ka'bah.
2. Penziarahan ke Ka'bah dapat dilakukan tahun depan.
3. Kalau ada orang Islam Madinah datang ke Mekah tidak akan dikembalikan dan orang Mekah yang datang ke Madinah harus di kembalikan.
4. Hendaknya hormat-menghormati antar umat beragama.
5. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

Tetapi dalam praktek perjanjian Hudaibiyah ini tidak berjalan lama, sebab setelah 2 tahun banyak pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh orang musrik Mekah.

Kegiatan lain yang dilakukan Nabi Muhammad setelah itu ialah pmengelola pemerintahan kota Madinah. Beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah merangkap menjadi kepala Negara dan kepala pemerintahan. Di samping itu ada lembaga musyawarah yang terdiri dari pemuka masyarakat. Semuanya ini didasarkan atas hak dan kewajiban kaum muslimin secara sukarela yang semata-mata dilaksanakan sebagai kebaktian kepada Allah.

Dalam pelaksanaan pemeritahan Nabi Muhammad memberikan suatu pernyataan tentang hak dan kewajiban umat Islam terhadap agama Yahudi, Nasrani dan lainnya bahwa mereka tidak akan diganggu, dinodai, dirugikan dengan menimbulkan kekerasan dalam kehidupan bersama di Madinah. Golongan agama lain itu juga dilarang untuk memperlakukan hal yang sama dengan pernyataan orang-orang Islam.

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh sejak hirah kemadinah atas perlakuan orang-orang Quraisy musrik Mekah yang selalu menekan untuk memusnahkan umat Islam antar lain ialah ;

- a. **Perang Badar** yang terjadi pada tahun 2 H, yaitu orang-orang Quraisy Mekah menyerang orang-orang Islam di dekat kota Badar.
- b. **Perang Uhud** terjadi pada tahun 3 H, di dekat kota Mekah.
- c. **Perjanjian Hudaibiyah** pada tahun 6 H, yang pada pokoknya orang Islam Madinah dilarang ke Mekah.

Berdasarkan pengalaman itu, maka pada tanggal 10 Ramadhan tahun 8 H (tahun 630) Nabi Muhammad dengan kekuatan 10.000 Orang Islam terlatih berangkat ke Mekah. Mereka berhenti di Marr-uz Zahran (sekitar satu hari perjalanan) yang terletak di luar kota Mekah. Melihat jumlah kekuatan orang Islam yang banyak itu kaum Quraisy musrik Mekah menyerah tanpa perlawanan. Abu Sofyan pemimpinnya yang datang ke perkemahan tetara Islam di Marr-uz Zahran diampuni oleh nabi dan kemudian ia masuk agama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad bersama tentaranya datang ke Mekah. Sejak saat itu orang-orang Mekah mulai menginsyafi dirinya dan banyak yang memeluk agama Islam. Nabi Muhammad setelah melakukan salat di Ka'bah dan menyelesaikan kepemimpinan orang-orang Islam di Mekah, maka bersama-sama tentaranya kembali ke Madinah.

Sekembalinya dari Madinah pada tahun 9 H, Nabi Muhammad membuka perjanjian-perjanjian dengan pemimpin-pemimpin Kristen dan Yahudi terutama mengenai perlindungan mereka berdiam bersama-sama orang Islam. Dari perjanjian yang dibuat itu kemudian menunjukkan bahwa mereka dalam kenyataannya selalu hidup bersama dan berdampingan tanpa prasangka dan tanpa mengganggu keimanan yang dimiliki masing-masing umat.

Setelah stabilitas kehidupan masyarakat umat beragama menjadi baik, maka pada tahun 10 H (tahun 636) Nabi Muhammad menjalankan haji ke Mekah. Tahun itu yang menunaikan ibadah

haji berjumlah 124.000 orang yang terbanyak dibanding ibadah haji sebelumnya. Dan bagi nabi perjalanan ke Mekah itu adalah yang terakhir, karena tugasnya telah dinyatakan selesai dengan sempurna dan tibalah waktu untuk mengundurkan diri. Ketika menjalankan haji turunlah wahyu Allah yang terakhir berbunyi “pada hari ini (Arafat) Aku sempurnakan agamamu dan Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu”. Wahyu ini kemudian dalam Al Quran dicantumkan sebagai **Surah (5) Al-Maidah ayat 3 kalimat kedua**.

Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji di Mekah Nabi Muhammad jatuh sakit dan pada hari senin tanggal 12 Rabi’ulawal tahun 10 H (tahun 632) beliau wafat di Madinah dalam usia 63 tahun.

5.3. *Perkembangan agama Islam*

Setelah Nabi Muhammad wafat, maka atas usul Umar pemimpin pemerintahan sebagai pengganti (khalifah) agar dipilih Abu Bakar. Usul itu diterima dan sejak saat itu terjadilah perubahan dalam kedudukan pemerintahannya Islam di Madinah yang sekaligus juga terjadi perkembangan agama Islam.

1. Abu Bakar

Sebagai seorang yang hidup sederhana dan masyarakat mengetahuinya. Abu Bakar menjadi Khalifah hanya 2 tahun (632-634). Dengan sikap yang tegas dan keras ia mempersiapkan usaha untuk pengembangan agama Islam. Jalan yang ditempuh berdasarkan prinsip bahwa setiap unsur yang dirasakan mengganggu bangsa Arab harus ditumpas. Hal ini terjadi misalnya Syiria yang ingin membebaskan dirinya dari kekuasaan bangsa Byzantium dibantunya sampai merdeka. Dan dengan prinsip itu walaupun hanya 2 tahun memerintah banyak

jasanya yang diberikan kepada masyarakat Arab. Jasa-jasanya yang perlu diketahui antara lain :

- a. Menumpas orang-orang yang mengaku nabi seperti Tulaiha dan Musailimah.
- b. Melakukan ekspansi ke Mesopotamia.
- c. Mengumpulkan surah-surah Quran

Setelah 2 tahun menjadi khalifah, maka atas persetujuan para pemuka agama dan para sahabat ia mengundurkan diri dan ditunjuk Umar sebagai penggantinya. Dan pada tahun itu juga (tahun 634) Abu Bakar wafat.

2. Umar

Seperti halnya Abu Bakar, maka Umar pun juga seorang yang sederhana. Sebagai khalifah ke 2 ia melakukan tugasnya selama 10 tahun (634-644).

Suatu gambaran kesederhanaan terlihat dari kehidupan sehari-hari yang tidak pernah menunjukkan prestise kepemimpinan ingin dihormati atau ingin disanjung melainkan menunjukkan diri dengan kemampuan berpikirnya. Terhadap masalah kenegaraan dalam hubungan dengan rakyat, kalau terjadi peristiwa hukum selalu ditangani secara bijaksana, obyektif dan adil dalam memberikan keputusan. Hal inilah yang menimbulkan tetap adanya rasa cinta kasih rakyat terhadap dirinya.

Tujuan untuk memperluas daerah agama Islam dilaksanakan dengan ekspansi. Perluasan daerah itu semula dilakukan ke Damascus, kemudian ke Armenia, Mesopotamia Utara, Georgia dan Azerbaijan. Setelah itu perluasan daerah dilanjutkan ke bagian Timur sampai Irak dan sebagian tentaranya menuju ke Barat dalam usahanya menaklukkan Iskandariah ibukota Mesir. Dengan kemenangan-kemenangan

yang diperoleh dan luasnya kekuatan Arab yang meliputi Balkan, Timur Jauh dan Mesir, maka daerah taklukan itu diberi otonomi pemerintah dengan menempatkan tentara-tentara Arab sebagai penghubung dengan pemerintah pusat di Madinah.

Umar sebagai Khalifah memimpin pemerintahan arab hanya sampai tahun 644, karena pada tahun itu ia meninggal dunia. Ia dibunuh oleh seorang budak bangsa Persia ketika salat di mesjid Madinah.

3. Usman

Untuk menggantikan khalifah Umar yang meninggal akibat pembunuhan, maka dibentuk panitia khusus pemilihan yang terdiri dari Ali, Usman, Abdur-Rahman, Zubir, Sa'ad bin Waqqas dan Tahlah. Tetapi Tahlah tidak datang tepat pada waktunya di Madinah ketika pemilihan berlangsung. Karena itu panitia pemilih hanya terdiri dari 5 orang saja.

Dalam pemilihan itu ternyata Usman yang dipilih menjadi khalifah. Dan sebagai pemimpin pemerintahan ia memerintah selama 12 tahun dari tahun 644 sampai dengan tahun 656.

Usman seorang yang lunak, sikap dan pendiriannya kurang mantap. Dalam menjalankan pemerintahan sering terpengaruh kehendak sukunya yaitu kum Umayyah. Sebagai seorang pemimpin, kelihatan seolah-olah mementingkan satu kelompok tertentu yaitu kaum Umayyahnya dibanding kepentingan umum dengan wilayah yang luas itu. Akibatnya banyak terjadi perlawanan dari kebijaksanaannya baik orang-orang Aisyah, orang Arab di daerah-daerah maupun daerah taklukan baru seperti Persepolis dan Cyprus. Bahkan kemudian timbul ketidakpuasan dikalangan tentara dan timbul kelompok oposisi pemerintah yang menjadi penambah suasana kurang tentram di dalam negeri.

Menyadari adanya kecemasan rakyat di mana-mana, maka Usman berusaha mempersatukan kehidupan umat Islam dengan jalan mengkondifikasikan Al Quran. Tugas pengkondifikasikan itu diserahkan kepada Zaid bin Tsabit yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa orang. Cara yang digunakan dalam pengkodifikasian itu dengan mensistematikan surah-surah yang telah dikumpulkan pada masa khalifah Abu Bakar dan dibicarakan pembetulannya dengan orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan hafal akan ayat-ayat Quran yang diajarkan oleh nabi.

Setelah pengkodifikasian Quran selesai, maka ada tanggapan dari musuh-musuh Usman yang mengakui dan menyatakan tentang kebenaran isi serta cara pengkodifikasian yang dilakukan.

Dengan demikian terbukti bahwa kodifikasi Quran dengan cara yang dilakukan itu tidak dapat disanksikan lagi kebenarannya. Karena itu Usman kemudian memerhatikan agar dibuat salinan-salinan sesuai dengan aslinya dan dikirimkan ke wilayah-wilayah otonomi sebagai taklukan para khalifah supaya disebarluaskan.

Sebelum usaha penyatuan kembali Umat Islam berhasil, maka pada tanggal 17 juli 656 Usman meninggal dunia sebagai akibat pembunuhan. Ia ditusuk oleh seorang Islam yang tidak dikenal ketika sedang membaca Al Quran. Dan setelah peristiwa pembunuhan itu situasi Negara menjadi terpecah dua, yaitu pusat Negara Arab diperintahkan oleh khalifah dan wilayah-wilayah otonomi banyak yang dipimpin oleh pemerintah tentara Arab.

4. Ali bin Abu Thalib

Sesaat setelah peristiwa pembunuhan Usman, maka Ali bin Abu Thalib disumpah oleh rakyat sebagai khalifah pemimpin pemerintahan Negara Arab. Kekhalifahan Ali tidak dikehendaki oleh Tahlah dan Zubir yang menganggap Ali termasuk kelompok pembunuh Usman. Kemudian terjadilah perpecahan dan permusuhan antara kelompok Ali yang didukung oleh golongan Syi'ah dan kelompok Muawiyah (anak Abu Sofyan) dari suku Umayyah yang menjadi pemimpin orang-orang Arab Syria.

Suasana Negara Arab makin lama menjadi labil dan banyak orang menjadi penentang pemerintah. Dengan banyaknya peristiwa maka Ali dan pendukungnya memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah ke kota Sufa dekat Irak. Dari sanalah ia memerintah Negara arab yang sudah mulai kurang bersatu itu. Sebagai puncak konflik antar umat Islam di bawah pimpinan Ali, yaitu terjadi peperangan antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali yang tidak mungkin dapat dihindarkan, karena sama-sama mempunyai pendirian yang kuat. Ali dengan dukungan golongan Syi'ah berpendirian bahwa berhak menjadi khalifah harus keturunan Nabi Muhammad. Sedangkan muawiyah dengan dukungan orang Syria menganggap pemerintahan kaum Umayyah yang sah untuk melanjutkan khalifah Usman.

Peperangan antar dua kelompok itu terjadi dekat kota Siffin berakhir dengan suatu perdamaian dengan akibat dari kecerdikam Muawiyah yang sebenarnya hamper kalah. Pihak penengah dalam perdamaian itu berat sebelah, karena ternyata mendukung Muawiyah, akibat terjadi lagi peperangan.

Pada tahun 661 Ali meninggal dunia dibunuh oleh seorang Islam yang sangat fanatik. Pengikut Ali mengangkat Hasan (anak sulung Ali) menjadi khalifah.

Melihat suasana yang selalu konflik antar umat Islam, maka Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah pada tahun 661 itu juga dan sejak saat itu mulailah pemerintahan Muawiyah dari suku Umayyah bersamua pengikutnya selama 90 tahun (tahun 661-750) sampai 14 kali pergantian khalifah.

Pada masa khalifah Ali sebenarnya dalam suasana masyarakat Islam terpecah belah timbul golongan-golongan politik Islam. Golongan politik itu ada 4, yaitu :

- a. *Golongan Ahli Sunnah*, yaitu golongan yang tetap mempertahankan demokrasi Islam dan setia mengikuti hukum-hukum sesuai perbuatan Nabi Muhammad.
- b. *Golongan Khawarij*, ialah golongan politik bebas yang menentang adanya pemerintahan. Golongan ini senang kalau umat Islam hidup dan berkembang tanpa diatur oleh suatu pemerintah. Sembojannya yang terkenal ialah “Tidak ada hukum kecuali hukum Allah”. Dan dengan sembojannya itu mereka menjalankan politiknya tanpa berdasarkan kepada hukum sosial, sehingga golongannya menjadi kelompok sosial yang fanatik. Dan dalam perjalanan politik Negara Arab kemudian diketahui bahwa golongan Khawarij yang membunuh khalifah Ali.
- c. *Golongan Muktazilah*, yaitu golongan Islam tertentu yang hidup mengisolir, non kooperatif dan menjauhkan diri dari umat Islam lainnya. Dalam membina golongannya digunakan hukum kelompok dengan menafsirkan Quran menurut jalan pikiran dan perasaan sendiri. Dengan membentuk hukum-hukum baru yang diperuntukkan bagi kepentingan

kelompoknya melalui penafsiran Quran sendiri itu tanpa berpaling kepada ahli sunnah.

- d. *Golongan Syi'ah*, yaitu golongan politik keras dan mengakui pemimpin pemerintahannya hanya dari keturunan Ali bin Abu Thalib sebagai pelanjut dari Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwa pemimpin pemerintah terdahulu yang tidak menurunkan Ali sebagai kesatuan keluarganya adalah tidak sah. Selain itu juga menyatakan bahwa hanya agama Islamlah agama yang benar. Dalam perkembangan pemikiran dan kegiatan golongan ini. Maka di bidang agama banyak ayat-ayat Quran yang ditafsirkan. Dan kegiatan politiknya selalu mengadakan pembaharuan dalam perkembangan Islam, sedangkan penentang politiknya selalu ditindak dengan tegas.

5. Khalifah Cordova

Setelah kaum Umayyah berturut-turut memegang pemerintahan sebanyak 14 kali pergantian mulai dari khalifah Muawiyah sampai dengan khalifah Marwan II, maka pada khalifah inilah pada tahun 750 berakhir pemerintahannya. Berakhirnya pemerintahan kaum Umayyah karena digulingkan oleh kaum Abbasiyyah dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum Umayyah. Pemerintahan Abbasiyyah yang berkedudukan di Bagdad berjalan sampai dengan khalifah ke 37 an berakhir tahun 1258 dengan terbunuhnya khalifah ke 37 itu oleh Hulagu bangsa Mongol keturunan Jenghis Khan.

Pada waktu pembunuhan besar-besaran kaum Umayyah oleh kaum Abbasiyyah seorang Umayyah yang bernama Abdur-Rahman dapat melepaskan diri dari kejaran dan ia kemudian membentuk khalifah baru yang berkedudukan di Cordova. Pemerintahan Abdur-Rahman I penuh perjuangan fisik, karena

selain menghadapi kaum Abbasiyyah juga perlawanan dari orang-orang Spanyol.

Cordova mulai mencapai kebesarannya pada masa pemerintahan Abdur-Rahman III yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kedamaian (tahun 912-961). Sejak masa itu Cordova termasuk pusat kebudayaan penting di Eropah dengan pengarang-pengarangnya yang terkenal.

Menurut Dr. Soebardi dan Prof. Harsojo dalam bukunya, "Pengarang yang Namanya Termasyur di Seluruh Eropah" seperti :

a. Ali Ibnu Hazm

Yang hidup dari tahun 944-1064 M. Ia banyak menulis tentang agama Islam. Penulis sejarah mengatakan bahwa Ali Abu Hazm ini telah menghasilkan buah pikiran tentang sejarah, teologi, hadits, logika, puisi, yang tertulis dalam kurang lebih 100 buku.

b. Ibnu Zaidun

Yang hidup dari tahun 1003-1071 M, Seorang penyair yang termashur, mula-mula di asingkan dari kungkungan istana karena Ia jatuh cinta kepada penyair perempuan Al-Waladah, anak khalifah. Akan tetapi kemudian diberi ampun dan diangkat menjadi wazir panglima besar.

c. Ibnu Al-Khatib

Seorang penyair yang ulung dan ahli Negara. Dari tulisan yang berjumlah 60 buah kitab tentang sejarah, ilmu bumi, ketabiban, filsafat, $\frac{1}{4}$ dari padanya sekarang masih ada. Ia mati terbunuh karena pertikaian yang bersifat perorangan.

d. Ibnu Khaldun

Adalah termashur karena mukaddammahnya, yaitu sebuah pengantar dalam ilmu sejarah. Untuk pertama kali ia menyusun teori tentang perkembangan sejarah dengan bahan penyelidikan tentang iklim, geografi, kekuatan kerohanain dan moral. Ia boleh dianggap sebagai orang yang mulai meletakkan dasar-dasar ilmu sosial. Ahli filsafat sejarah ini meninggal pada tahun 1406 M.

e. Ibnu Tufail

Termashur sebagai filsuf yang meninggal pada tahun 1185 M. Karangannya yang berjudul “Hai ibn-Yakzan”, mengemukakan suatu pendapat bahwa perasaan dan pengetahuan manusia akan adanya yang maha tinggi dan kemudian menyerahkan diri kepadanya, datangnya tidak harus dari luar dan diajarkan. Tulisan yang indah kemudian di terjemahkan dalam bahasa Latin, Rusia, Spanyol dan Belanda.

f. Ibnu Rusyd

Seorang filsuf yang mempunyai nama yang harum dalam dunia pengetahuan hingga sekarang ini; orang Eropah menyebutnya **Averroes**. Ia dilahirkan pada tahun 1126 di Cordova. Ia terkenal sebagai ahli bintang, tabib ulung dan juru tafsir pada filsafat Aristoteles. Sebagai ahli kedokteran ia pernah menulis dalam tulisannya bahwa tidak ada orang yang dapat di serang kedua kalinya oleh penyakit cacar anak-anak. Tulisannya tentang filsafat Aristoteles menggoncangkan dunia ilmu pengetahuan Kristen maupun dunia agama Islam. Pengaruh tulisan itu terasa kurang lebih 4 abad lamanya yaitu abad XXI sampai abad XVI. Dari pengarang-pengarang terkemuka ini masih banyak lagi ahli pengetahuan lainnya

yang menyumbangkan pikiran dan tenaganya kepada perkembangan pikiran manusia didunia.

Khalifah Cordova berakhir dengan jatuhnya Cordova pada tahun 1236 dalam perang Salib yang dilancarkan oleh raja-raja Kristen Eropah ke daerah-daerah Islam. Dan sejak saat itu daerah kekuasaan dan pemikiran-pemikirannya makin meluas ke setiap penjuru dunia.

5.4. *Mazhab-mazhab Islam.*

Di dalam menalarkan fiqih, para ahli hukum Islam sependapat dengan menerima idjma' dan qiyas sebagai sumber hukum di samping Quran dan hadits. Tetapi persamaan pendapat itu berbeda dalam penggunaannya. Ada sebagian ahli fiqih yang menambah unsur-unsur lain sebagai sumber hukum Islam yang berakibat timbulnya perbedaan dalam bagian-bagian hukum tertentu walaupun hukum pokoknya tetap sepaham. Di sanalah kemudian menimbulkan macam-macam mazhab fiqih, yaitu aliran-aliran hukum tertentu yang berbeda pandangan.

Ada 4 mazhab yang terkenal dan mempunyai pengikut sampai sekarang yang kemudian dikenal dengan sebutan “Ahli sunnah wal jamaah” (mayoritas umat Islam yang mementingkan sunnah nabi), ialah:

1. *Mazhab Hanafi.*

Mazhab ini dipimpin oleh Abu Hanafiah (699-767). Pandangannya menyatakan bahwa kedudukan qiyas lebih penting dibanding idjma dan hadits dalaif (lemah). Dalam praktek sehari-hari selain empat sumber hukum Islam yang digunakan juga mempunyai sumber hukum kelima yang dinamakan “Istihsan” (mengambil yang baiknya). Dan istihsan itu artinya

mengambil hukum yang lebih praktis walaupun tidak memenuhi syarat-syarat qiyas.

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalau terjadi masalah yang segera memerlukan penyelesaian, cukup kalau keadaan pokok dari masalah itu sudah ada. Dan istihsan itu banyak digunakan dalam bidang perikatan yang mengatur hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Contoh: Dalam perikatan jual-beli, qiyas mensyaratkan harus ada obyek bendanya. Tetapi dengan istihsan walaupun obyek bendanya belum ada (tidak dibawa), maka boleh saja dikatakan transaksi dari pihak.

Penganut mazhab Hanafi ini semula di Turkistan kemudian Buchara, Mesir dan Asia Tengah.

2. *Mazhab Maliki.*

Mazhab ini dipimpin oleh Malik bin Anas al Ashbahi (713-785). Sebagai ahli fiqh dan hadits, Malik bin Anas dalam mazhabnya menggunakan sumber hukum kelima juga yang dinamakan “Mushalih Mursalah” (Kepentingan-kepentingan yang belum diatur dalam syariat).

Dalam praktek sumber hukum ini banyak persamaanya dengan istihsan untuk menyelesaikan masalah yang diperlukan. Maksudnya, kepentingan yang belum diatur dalam syariat kalau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari digunakanlah mushalih mursalah, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh kepentingan umum diatur dengan ketentuan baru walaupun tidak ada dalam Quran dan Hadits supaya jangan sampai menimbulkan penderitaan mayoritas umat manusia.

Contoh: Mengatur lalu lintas jalan umum dengan menggunakan sisi jalan sebelah kiri atau kanan bagi setiap orang.

Pengikutnya banyak di Madinah, Maroko, Aljazair, dan Tunisia.

3. *Mazhab Syafi'i*

Dipimpin oleh Muhammad bin Idris bin Syafi'I (757-820). Sebagai murid dari Imam Maliki pandangannya tidak dapat menerima Mushalih Mursalah dari gurunya yang menolak istihsan dari Imam Hanafi, tetapi menerima qiyas. Syafi'I dalam mengembangkan mazhabnya agak lamban, tetapi paling banyak pengikutnya. Ia sebagai seorang yang luas pandangannya dengan pengalaman berguru kemana-mana dengan mempelajari ajaran-ajaran dari orang-orang tedahulu kemudian menyimpulkan suatu metoda yang mempersatukan sumber-sumber hukum Islam itu. Disanalah tujuan untuk mencari persesuaian antara fiqh dan hadist dapat ditemukan.

4. *Mazhab Hambali*

Dipimpin Oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal (780-855). Ia pengikut mazhab Syafi'I dan kalau kemudian mendirikan mazhab sendiri. Karena mempunyai pandangan lain dalam menggunakan qiyas. Dalam mazhabnya sangat sedikit penggunaan qiyas dan mendasarnya sistemnya terutama pada keterangan ayat-ayat suci Al Quran. Anggapan hadist dlaif (lemah) lebih penting dari qiyas. Karena itulah sangat sulit untuk mengembangkan pikiran-pikiran umum. Jadi tidak mengherankan kalau pengikutnya paling sedikit dan kebanyakan hanya di Saudi Arabia dan Irak.

BAB III

SISTEM HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Islam

Hukum Islam memiliki suatu sistem yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendikia hukum di seluruh dunia. Karena dari sistem hukum Islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat dibanding sistem-sistem hukum lainnya.

Dilihat dari pengertiaanya, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (komponen-komponen, elemen-elemen) dan satu sama lain berkaitan kebergantungan. Setiap komponen terdiri atas bagian-bagian kecil yang berkaitan tanpa dapat dipisah-pisahkan. Antara komponen satu dengan komponen lainnya juga juga serba ketergantungan. Maksudnya tidak dapat dilepaskan dalam kemandiriannya masing-masing melainkan selalu merupakan mata rantai yang terikat. Dalam keadaan lepas antar komponen akan mengakibatkan perubahan wujud dan fungsinya. Kalau dapat diumpamakan seperti kayu, maka potongan-potongan kayu yang terdiri dari potongan besar-kecil dan panjang-pendek, maka wujudnya akan tetap kayu tetapi fungsinya kurang nampak. Bagian-bagian kayu itu baru akan berfungsi kalau dikaitkan dalam suatu kesatuan seperti dalam wujud kursi, meja, lemari dan lainnya.

Jadi, bagian-bagian yang merupakan wujud tertentu, dalam wujud asalnya, kemandirian bagian tidak akan menunjukkan fungsi yang sebenarnya. Sedangkan dalam hal bagian-bagian itu berkaitan satu sama lain karena kebergantungannya dan menjadi satu kesatuan tertentu akan dapat menunjukkan fungsi yang sebenarnya. Dengan demikian berarti juga bahwa bagian-bagian yang tidak

terwujud kesatuan tidak akan dapat berfungsi dalam keadaan sebenarnya.

Pengertian yang berkenaan dengan wujud dan fungsi ini juga identik yang dimaksud dengan sistem. Sesuatu dinamakan sistem kalau merupakan satu kesatuan, memiliki wujud (bentuk) dan berfungsi dalam keadaan sebenarnya.

Dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum juga memiliki sistem. Dan hukum sebagai suatu sistem sampai sekarang yang dikenal ada empat yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon (Amerika), sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat.

Mengenai sistem hukum Islam mempunyai kelengkapan berdasarkan sumber-sumber hukumnya, lapangan dan bidang-bidang hukum tersendiri.

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Dilihat dari sumber-sumber hukumnya adalah sebagai berikut :

Konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat. Sumber hukum merupakan satu kesatuan yang berasal hanya dari firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Melalui cara nabi berkata, berbuat, dan diam (takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Sumber-sumber hukum Islam ada empat yaitu :

1. *Quran*

Quran (Al Quran) adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi

Muhammad Rasul Allah melalui perantaraan malaikat Gibrail. Sebagai asas dan sumber hukum Islam yang utama dan pertama Quran itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia.

Wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu selama jangka waktu 23 tahun, yaitu 13 tahun ketika berada di Mekah dan 10 tahun ketika hijrah ke Madinah. Waktu yang diturunkan di Mekan disebut Makkiyah, isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam masalah kepercayaan (keimanan), seperti Al Arkanul iman assitah. Sedangkan wahyu yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyyah, isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam hal muamalat seperti perikatan, pernikahan dan hukum-hukum pembalasan (jinayah). Makkiyah dan Madaniyyah itu sebagai kodifikasi hukum terdiri atas 30 juz (bagian). Setiap bagian terdiri atas surah-surah (bab-bab) yang seluruhnya berjumlah 114 surah. Dan setiap surah terdiri dari ayat-ayat dalam jumlah ayat setiap surah tidak tentu ada yang panjang dan ada yang pendek. Dari surah pertama “Al Fatihah” sampai dengan surah terakhir “Annas”, jumlah ayat seluruhnya sebanyak 6666 ayat. Tetapi dari jumlah ayat sebanyak ini hanya sebagian yang perlu di tafsir. Yang dimaksud dengan tafsir ialah pemberian keterangan atau arti supaya dapat jelas yang dimaksudkan. Yang dilakukan tafsir yaitu dari ayat-ayat Quran sebanyak 4547, tersebar pada ayat-ayat tertentu.

Contoh tafsir : **Surah (17) Bani-Israil ayat 29** menyatakan “dan janganlah jadikan tanganmu terbelenggu di tengkukmu 1854) dan janganlah engkau ulurkan dia sehabis-habis uluran 1855) karena nanti engkau jadi tercela dan menyesal). 1854) janganlah engkau jadi orang yang kikir dan bathil.

1855) janganlah terlalu mudah dan murah engkau mengeluarkan harta.

Seluruh ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu perintah Allah itu diterimanya tidak sekaligus dalam bentuk quran seperti yang dikenal setiap orang melainkan sedikit demi sedikit dan berurutan dalam ayat-ayat tertentu sesuai kebutuhan yang diperlukan. Setiap ayat yang diterima langsung ditulis oleh penulis dan dihafal oleh beberapa sahabat yang dipercaya nabi. Dan pengumpulannya menjadi kodifikasi dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat yang dilakukan pada masa pemerintahan Usman sebagai Khalifah ketiga. Jadi Quran itu tidak dirubah, ditambah atau dikurangi melainkan di sistematikan dalam satu kitab dari seluruh ayat dari wahyu Allah itu.

2. *Sunnah*

Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (sunnah al-qaul disebut juga sunnah al-qauliyah), perbuatannya (sunnah al-fi'il disebut juga sunnah fi'ilyah) dan keadaan diam (sunnah as-sukut disebut juga sunnah taqririyah) nabi.

Sunnah nabi sebagai sumber hukum kedua bagi hukum Islam setelah quran urutannya itu tidak dibuat oleh manusia tetapi memang dinyatakan secara tegas di dalam Al Quran sendiri. Menurut **Surah (59) Al-Hasyar ayat 7** dinyatakan “Apa-apa yang diperintahkan rasul kepadamu maka kerjakanlah dan apa-apa yang dicegah atasmu maka jauhilah”. Dan di dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 59** (kalimat kedua) dinyatakan bahwa “Jika kamu bersengketa tentang sesuatu maka kembalilah

kepada Allah dan Rasul-Nya”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat ini menunjukkan bahwa sunnah nabi merupakan sumber hukum setelah Quran. Hal ini dilihat dari alasan perkembangan pikiran manusia (sebagai alasan lain) :

1. Quran sudah pasti berasal dari Allah, yaitu wahyu-wahyunya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayatnya tidak dapat dipalsukan dengan jelas. Bahasanya sebagai bahasa sastra tidak dapat ditiru oleh semua orang. Sedangkan sunnah nabi masih dapat diragukan apakah memang berasal dari nabi sendiri, karena pengumpulan catatannya mengenai sunnah itu dilakukan setelah nabi wafat. Bahasanya mudah ditiru dan atau tidak sesuai aslinya.
2. Maksud dari sunnah itu sendiri sebenarnya sudah terkandung dalam Quran. Jadi kedudukan sunnah adalah sebagai pelaksana dari Quran dan bukan pengganti atau pengoreksi terhadap Quran.

Semua cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad menjadi contoh keteladanan dalam hubungannya dengan kemasyarakatan dan peribadatan. Kebiasaan dalam bertingkah laku sehari-hari nabi menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali secara meluas yang dalam hal ini dinamakan “hadist”. Jadi hadist, adalah pendukung sunnah sebagai cerita tentang perkataan, perbuatan, dan keadaan diam (takrir) nabi dalam menyaksikan perbuatan-perbuatan orang yang tidak dilarangnya.

Karena lafal hadist itu bahasa Arab biasa (bukan sastra). Maka catatannya dapat dibuat dan diada-adakan oleh siapapun juga. Hal itulah kemudian pada abad pertama Hijrah dalam perkembangan hukum Islam terjadi pemalsuan hadist melalui penyebaran yang tidak sesuai aslinya.

Untuk menghindarkan meluasnya pemalsuan hadist yang tambah lama bertambah versinya, maka pada abad ketiga Hijrah kalangan ulama Islam melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan hadist yang asli dan memisahkan hadist yang keliru dan palsu. Hadist yang asli itu dinamakan “hadist sahih” dan dapat disebarluaskan. Sedangkan hadist yang keliru dan yang palsu dinamakan “hadist dilaif” (lemah) dilarang untuk beredar.

3. *Idjma*

Idjma adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Quran dan Hadist Sahih. Dan apabila telah ada idjma maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Quran dan Hadist Sahih, karena idjma tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri. Dalam merumuskan hukum baru dan kemudian memperoleh konsensus sebagai :

1. *Idjma qauli* kalau konsensus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dengan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama atau sejumlah ulama tentang perumusan hukum baru yang telah diketahui umum. Atau dianggap ada konsensus terhadap pendapat seorang ulama atau sejumlah ulama tentang hukum baru kalau seorang ulama besar menyatakan hal itu dalam tulisan kitabnya, majalah atau plakat yang diumumkan. Idjma Qauli itu disebut juga idjma qath’i.
2. *Idjma Sukuti* kalau konsensus terhadap pendapat hukum baru dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan).

Kedudukan idjma qauli lebih kuat dari idjma sukuti, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap pendapat hukum baru dari ulama lain itu belum tentu berarti setuju.

Idjma termasuk sumber hukum Islam selain Quran dan sunnah memiliki pasal hukum di dalam Quran, **Surah (4) An-Nisa ayat 59** kalimat pertama menyatakan bahwa “ hai orang-orang mukmin patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul dan patuhlah kepada Ulil Amri di antara kamu”. Ulil Amri ialah para ulama dan atau orang-orang pemerintah. Dengan dasar surah ini menunjukkan bahwa adanya perintah Allah untuk mematuhi Ulil Amri berarti pendapat mereka merupakan sesuatu yang mengandung kebenaran.

4. Qiyas

Pengertian Qiyas dapat dilihat dari 2 segi, yaitu :

1. Menurut Logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (syllogisme).
2. Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.

Dalam ilmu hukum qiyas itu dinamakan analogi :

Contoh : Menurut Quran dan Hadist, minuman arak hukumnya haram karena memabukkan. Dianalogikan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram, seperti wiski, vodka, bir dan lainnya.

Qiyas termasuk sumber hukum Islam berdasarkan kepada Quran **Surah (59) Al-Hasyar ayat 2** menyatakan bahwa “Maka ambillah I’tibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan

pikiran”. Mengambil I’tibar ialah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu atau ada hukumnya.

Dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 83** dinyatakan bahwa “Jika mereka serahkan masalah itu kepada Rasul dan orang-orang cerdik pandai (Ulil Amri) di antara kamu niscaya akan diketahuilah masalah itu oleh mereka orang-orang yang pandai mengeluarkan ilmu”.

Dari kedua surah ini ternyata bahwa qiyas merupakan sumber hukum yang diperuntukkan bagi menjaga perkembangan pergaulan hidup manusia.

Dengan 4 sumber hukum yang diuraikan secara singkat ini maka hukum Islam secara luwes dan kuat akan tetap dapat berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup masyarakat.

3. Lapangan dan Bidang-bidang Hukum Islam

Agama Islam yang sengaja diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bertujuan menyusun ketertiban, keamanan dan keselamatan seluruh umat manusia. Karena itu hukum Islamnya yang bersumber kepada Al Quran, sunnah, Idjma dan Qiyas dalam sistem hukumnya mempunyai lapangan dan bidang-bidang hukum yang sangat luas meliputi pelbagai segi dalam mengatur kehidupan manusia. Maksudnya, melalui dasar-dasar hukum Islam yang memiliki 4 sumber hukum mencakup mengenai pengaturan bidang pembangunan, politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya, di samping hukum-hukum pokok mengenai kepercayaan (keyakinan), keimanan dan kebaktian kepada Allah.

Setiap bidang dalam pelaksanaannya tidak langsung diterapkan kepada masyarakat sebelum mereka memperoleh

pembinaan dan pendidikan mental rohaniyah untuk memiliki keyakinan diri sebagai manusia mandiri dalam menjalankan perintah Allah dan menghindarkan larangan-Nya.

Para ahli hukum Islam merintis jalan dan menyusun hukum dalam satu sistem yang praktis dan mudah dipelajari untuk memperoleh pemahaman setiap manusia pada zamannya. Perintis jalan dan penyusun sistem hukum Islam yang terkenal dan tertua ialah “Abu Hanifah”. Melalui mazhab Hanafi yang dipimpinnya sistem hukum Islam terdiri dari empat lapangan pokok, yaitu :

1. *Lapangan Ibadat*, ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian kepada Allah, meliputi bidang-bidang :
 - Tata cara salat,
 - Tata cara berpuasa,
 - Tata cara berzakat,
 - Tata cara menjalankan haji, dan lain-lain ibadat sebagai tanda bukti keyakinan yang dijalankan dengan kesadaran hukumnya dalam penyerahan diri kepada Allah.
2. *Lapangan Muamalat*, ialah tata tertib hukum dan peraturan hubungan antar sesamanya, meliputi bidang jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, pinjam-meminjam, perburuhan/pengupahan, hukum tanah (pembukaan tanah baru) dan hukum hak milik tentang kebendaan (pemberian, wakaf) yang berkaitan dengan perekonomian pada umumnya.
3. *Lapangan Munakahat*, ialah hukum kekeluargaan dalam hukum nikah (perkawinan) dan akibat-akibat hukumnya, meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri mengenai pemberian nafkah rumah tangga, pendidikan anak, hak dan tuntutan tentang putusnya perkawinan dari pihak suami atau istri, dasar-dasar pokok perkawinan

monogami, rasa keadilan dalam perkawinan poligami dan hukum waris.

4. *Lapangan Jinayat*, ialah tindak pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara. Lapangan jinayat ini meliputi bidang pelanggaran terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan yang pada umumnya memperoleh ancaman hukuman berat, sedang, dan ringan.

Dalam perkembangan hukum Islam, maka sistem hukum yang dikemukakan oleh Abu Hanifah ini menimbulkan lapangan-lapangan hukum lain sebagai tambahan. Dan lapangan hukum itu mengatur mengenai penyelesaian masalah hukum yang dihadapi masyarakat berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang termasuk bagian lain dalam sistem hukum Islam sebagai perkembangan hukumnya ialah :

- *Lapangan Aqdhiyah*, yaitu peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak peradilan dan cara-cara memerdekakan budak belian.
- *Lapangan Al Khilafah*, yaitu mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, kepemimpinan dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain.

Berdasarkan sistematika ini, maka kiranya perlu diurai jelaskan asas-asas pengaturan kehidupan manusia untuk memudahkan pemahaman yang sebenarnya.

BAB IV

MUNAKAHAT

1. Dasar-dasar Pemikiran

Istilah munakahat yang digunakan dalam sistematika hukum Islam oleh Abu Hanifah (mazhab Hanafi) sebenarnya merupakan hubungan hukum keluarga. Dan secara umum kegiatan yang terjadi di dalam hukum keluarga yang tingkah lakunya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan.

Di dalam hukum Islam ketentuan-ketentuan hukum keluarga mengatur mengenai pembentukan keluarga dan berakhir sampai adanya pemindahan hak milik karena putus hubungan hukum antara suami dan istri. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang merupakan masalah “munakahat” mengatur kegiatan individu lain yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk keluarga dalam wujud sebagai rumah tangga, termasuk mempunyai keturunan atau tidak, sampai terjadi peristiwa hukum kematian atau perceraian. Dan proses kegiatan itu dapat dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi ketentuan-ketentuan hukumnya dengan membatasi kegiatan dan tingkah laku tersebut.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antar pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdsarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seorang sebelum melaksanakannya, yaitu :

- 1.1. *Iman*, artinya percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta termasuk manusia yang secara siklus terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dibentuk melalui proses tahapan. Dan proses tahapan itu semula dari gumpalan darah berkembang menjadi daging, kemudian berbentuk tulang dan bercampur menjadi satu serta pembungkus kulit. Proses selanjutnya akan terjadi kehidupan roh/sukma setelah janin dilahirkan menjadi bayi.
- 1.2. *Islam*, maksudnya bahwa bagi setiap calon suami istri wajib mempunyai jiwa penyerahan diri kepada Allah sebagai penciptanya. Kalau keyakinan ini sudah benar-benar dihayati, maka dalam melakukan kewajiban sebagai suami istri tidak akan menimbulkan keraguan, kecemasan dan kekhawatiran. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai kewajiban dan haknya akan dapat dilaksanakan sesuai proses.
- 1.3. *Ikhlas*, artinya pada diri masing-masing calon suami istri memiliki tekad yang bersih dan terbuka untuk membentuk keluarga sebagai kebaktian kepada Allah. Asas ini akan menghilangkan kecemasan atau ketidakpuasan dalam melaksanakan kehidupan keluarga yang akan menerima godaan dan cobaan, musibah atau kesengsaraan dalam menjalankan tugas sebagai kewajibannya secara sadar dan bertanggung jawab. Selain itu juga akan menutup kekurangan-kekurangan kedua belah pihak dalam membina kesatuan untuk mencapai kesempurnaan hidup rumah tangga.

Sedangkan kalau dilihat dari dasar-dasar pemikiran sosialnya, maka perkawinan itu tidak mungkin akan berlangsung dengan sendirinya tanpa memperhatikan situasi dan suasana masyarakat. Secara sosiologis kehidupan suami istri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat politis, ekonomi dan berkebudayaan akan berkembang bersama-sama antara kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dilihat dari aspek pemikirannya, maka suatu perkawinan itu memberikan cerminan yang berifat abadi bahkan berlanjut dalam kehidupan akhirat. Maksudnya ikatan perkawinan itu dibentuk dengan kesungguhan hati nurani dalam wujud yang baik antar suami dan istri. Perwujudannya akan terlihat baik bagi hubungan antara dua keluarga besar pihak suami istri yang juga dapat menghindarkan segala bentuk penyimpangan dan nafsu individu.

Berdasarkan penglihatan itu semua, maka Islam memandang perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga berdasarkan hukum yang kuat. Dan secara yuridis perkawinan ini bukan sekedar persetujuan hidup bersama melainkan kehidupan bersamanya didasarkan kepada aturan yang diperintahkan Allah.

2. Arti dan Tujuan Perkawinan

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj, kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan “ziwaj” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengaitkan diri dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan

perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al Quran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.

Pengertian ini identik hukum nasional yang dicantumkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan menyatakan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat makna yang identik ini nampak bahwa suatu perkawinan menggunakan asas monogami agar kebahagiaan dan kekekalannya berwujud dengan baik.

Firman Allah dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 3** menyatakan : “Kawinlah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah seorang saja”.

Dilihat dari ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar ideal perkawinan menurut hukum Islam menganut asas monogamy, yaitu seorang pria harus menikah dengan hanya seorang wanita dalam waktu yang sama. Prinsip dasar ini dapat menjamin persamaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan antar suami istri. Dan asas monogamy itu didasarkan kepada hukum bilateral, artinya setiap orang dari pihak suami istri mempunyai hak dan kewajiban sama termasuk keluarga para pihak. Asas bilateral ini menjamin hak masing-masing kalau suatu saat dari salah satu pihak meninggal dunia, maka bagi yang masih

hidup mempunyai kewajiban menanggung kelangsungan hidup anggota keluarga itu.

Tetapi dimungkinkan juga menggunakan asas poligami. Sedangkan pelaksanaannya kalau suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 4 orang. Karena itu sebelum dilaksanakan perlu dipertimbangkan lebih dahulu makna kata adil yang dimaksud.

Untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dan yang selanjutnya supaya adil, maka langkah pertama wajib mendapat izin dari istri dengan mengemukakan alasan-alasan yang rasional. Karena itu pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan menyatakan : Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan pihak-pihak yang dimaksud yaitu selain suami juga istri atau istri-istri sah dari perkawinan terdahulu. Dan pasal 5 ayat 1 sub a Undang-undang perkawinan secara tegas menyatakan: “Ada persetujuan dari istri/istri-istri dalam mengajukan permohonan izin ke pengadilan”. Hal ini juga dipertegas oleh pasal 40 dan 41 peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 40 menyatakan : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Sedangkan pasal 41 huruf b menyatakan : Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Tetapi persetujuan istri atau istri-istri itu bukan satu-satunya syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang berkeinginan untuk poligami. Syarat-syarat yang lainpun wajib juga dipenuhi,

yaitu alasan yang tepat, kemampuan untuk menjamin keperluan hidup untuk sehari-hari, dan yang penting perlakuan adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Dan isi ketentuan-ketentuan ini nampak walaupun bahwa seorang laki-laki menurut hukum Islam dalam waktu yang sama boleh beristri lebih dari seorang dan tidak lebih dari 4 orang, tetapi di atas monogami lebih menjamin kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tidak diperkenankan mempunyai istri lebih dari seorang.

Kalau dalam kenyataannya ada yang menyimpangkan peraturan itu, maka akan dikenakan sanksi hukum kepadanya. Sedangkan istri terdahulu dapat menuntut haknya sebagai seorang ibu rumah tangga melalui pengadilan untuk membatalkan perkawinan suaminya dengan perempuan lain. Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari :

1. Berbakti kepada Allah,
2. memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan,
3. Mempertahankan keturunan umat manusia,
4. Melanjutkan perkembangan dan ketrentaman hidup rohaniah antara pria dan wanita,
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Quran **Surah (30) Ar-Rum ayat 21** yang menyatakan bahwa “Ia dijadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia jadikan di antara kamu

pencintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berpikir”.

Karena itu para pihak perlu meneliti dahulu lain jenisnya sebalum melangsungkan perkawinan terutama mengenai agama dan keimanannya, moralitas, keturunan, keelokan dan daya pikirnya. Meneliti lebih dahulu termasuk unsur penting, karena agama dan iman merupakan unsur pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup baik bagi keluarga yang tidak mengalami perbedaan pendapat bahkan konflik antar suami istri kadang-kadang terjadi. Kalau dasar agama dan keimanan tidak mantap, maka suatu konflik yang terjadi mungkin dapat berakibat timbulnya perceraian. Sedangkan penelitian dari segi lainnya dimaksudkan agar tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dapat dinilai baik oleh masyarakat, karena keturunan yang baik dan pandai akan membawa kebaikan dalam pergaulan. Para sarjana hukum memandang perkawinan Islam itu sebagai berikut :

1. *Saleh atau Muwah*, yaitu setiap pria atau wanita Islam boleh memilih atau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan yang sanggup memelihara kehormatannya.
2. *Sunnat*, maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapat pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang tetap ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
3. *Wajib*, maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami istri, maka kewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang

telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.

4. *Haram*, maksudnya kalau seorang pria dan wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu, memeras atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.

3. Proses Perkawinan

3.1. Peminangan

Membentuk suatu keluarga tidak semudah seperti yang dilakukan dalam muamalat walaupun perkawinan merupakan suatu aqad. Tetapi pengertian aqad perkawinan dibangun dalam proses kegiatan yang terus-menerus berlangsung.

Karena itu menurut Joseph Schasht dalam bukunya menyebutkan bahwa “The family is the only group based on cosanguinity or affinity which Islam recognizes”. Dari pengertian ini dan dalam kaitannya dengan akad menunjukkan bahwa ikatan hukum yang dibentuk berlangsung terus menerus seumur hidup dengan menghalalkan pergaulan dalam membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk mewujudkan ikatan hukum yang berlangsung terus menerus itu diperlukan suatu ketelitian dengan berpegangan kepada dasar pikiran yang menjadi pokok pangkal dalam pembentukan keluarga melalui suatu perkawinan.

Ketelitian memilih dan menetapkan calon sebagai pasangan hidup itu tugasnya terletak di tangan pihak pria, suatu pilihan akan menghasilkan yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari yang dipilih. Alasannya karena hidup berumah tangga

itu tidak dalam waktu singkat melainkan langsung selama hidup di dunia dan di akhirat. Disamping itu kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga secara baik.

Karena itu sebelum melangsungkan niat berumah tangga lebih dahulu perlu memahami seluk beluk kehidupan wanita yang baik. Dan wanita yang baik kalau dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga bersama.

Petunjuk Nabi Muhammad mengemukakan ada tiga cirri yang dimiliki wanita yang baik yaitu :

1. Hadist Nabi yang diriwayatkan Muslim dan Tarmidzi menyatakan : “Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama”.
2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai menyatakan : “Kawinlah dengan orang yang dikasihi dan berkembang”.
3. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Jamaah ahli hadist menyatakan : “Alangkah baiknya jika engkau kawin dengan perawan, engkau dapat menjadi hiburannya dan diapun menjadi hiburan bagimu”.

Dari ketiga hadist ini mencerminkan cirri-ciri kehidupan wanita yang baik kalau :

- Beragama dan melaksanakannya,
- Dari keturunan yang sehat,
- Masih perawan bukan janda.

Jadi dalam memilih calon istri hendaknya mempedomankan kepada tiga petunjuk ini. Dan kalau sudah sesuai dengan pilihannya, maka dapat dilakukan suatu peminangan. Peminangan melalui proses yang dapat dilakukan sendiri atau perantaraan orang

lain. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang pria kepada seorang wanita atau melalui perantara orang yang dipercaya.

Dilihat dari arti pinangan ini menunjukkan bahwa bagi seorang pria yang sudah mempunyai putusan atas pilihannya kepada seorang wanita, maka ia boleh memberikan pernyataan kepada wanita itu secara terus terang atau pernyataan itu dilakukan atas perantaraan seseorang yang dipercaya. Pinangan dapat juga dilakukan dengan sendirian kalau wanita itu dalam masa iddah. Karena firman Allah tidak melarangnya perbuatan sendirian seperti yang dicantumkan dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 235** menyatakan : “Dan tidak ada larangan atas kamu tentang peminangan yang kamu sindirkan kepada wanita-wanita itu”.

Sebelum melakukan peminangan kalau dimungkinkan hendaknya melihat sendiri wanita yang akan dijadikan calon istrinya. Tetapi kalau seandainya tidak dapat melihat sendiri, maka tidak ada halangan melalui seorang wanita yang dapat dipercaya. Ia akan menjelaskan kebenaran tingkah laku dan kehidupan sehari-hari akan keadaan wanita yang telah menjadi pilihannya dan kemudian kepercayaannya itu akan melakukan peminangan.

Bagi orang yang beragama Islam diberi kebebasan untuk melihat wanita Islam yang akan dipinangnya sampai batas muku (wajah) dan telapak tangannya. Hadist nabi diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menyebutkan : “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang wanita sekiranya dapat melihat wanita itu lakukanlah supaya bertambah keinginan perkawinan”.

Dengan hadist ini dimaksudkan agar melalui penglihatan sendiri akan timbul suatu pikiran untuk segera melangsungkan keinginan perkawinan. Tetapi sebelum melangsungkan perkawinan ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang wajib dipenuhi oleh

pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perkawinan tersebut.

3.2. *Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan*

3.2.1. *Syarat-syarat perkawinan*

Yang dimaksud dengan *syarat*, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seorang sebelum melangsungkan perkawinan itu ada enam, ialah :

a. *Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan*

Calon suami isrti mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

b. *Dewasa*

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tanda-tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (*baliqh*) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksud

bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

c. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan merebutkan atau mengalahkannya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu.

Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang wanita lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat dan bersedia memeluk agam Islam.

d. Tidak ada hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertical maupun horizontal tidak dikendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu, sedangkan dari segi psikologi banyak terlihat adanya

kelainan psikis dan mental kalau sampai dilangsungkan perkawinan dalam satu hubungan darah.

e. Tidak ada hubungan rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoah ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara, suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya.

f. Tidak semenda (mushoharoh)

Artinya kedua calon suami istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu ialah :

- a. Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang ketika akan melangsungkan perkawinan. Kalau pria itu telah beristri empat orang, maka perkawinan yang kelima tidak sah.
- b. Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara istri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, seperti kakak beradik dalam kebersamaan menjadi istri-istri seorang pria.

- c. Tidak ada perceraian li'an, artinya antar suami istri terdahulu tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh istri berbuat serong atau tuduhan istri bahwa suami berbuat serong. Kalau tuduhan itu tidak terbukti dan tidak mempunyai saksi lengkap, maka penyelesaian tuduhan terhadap para pihak harus bersumpah sebanyak empat kali dan sumpah yang kelima dilakukan dengan memohon kutukan bagi yang berbohong. Setelah sumpah itu selesai diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka hakim akan memutuskan cerai li'an untuk selama-lamanya. Dan mereka tidak boleh melakukan perkawinan kembali antar sesamanya.
- d. Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan. Artinya kalau ia masih dalam hubungan perkawinan walaupun tidak sebatas atau tidak diketahui domisili suaminya, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang pria lain. Dan dalam keadaan lepas bergaul (*scheiding van tafel en bed*) pun harus ada perceraian dahulu karena statusnya masih seorang istri.
- e. Calon istri dalam masa iddah, artinya ia tidak dalam jangka waktu tunggu. Dan dalam jangka waktu tunggu itu terdiri atas :
- Ditinggal suami karena meninggal dunia selama 4 bulan 10 hari tidak dalam keadaan hamil. Kalau ada tanda kehamilan sejak ditinggal suami, maka harus menunggu kelahiran bayinya.
 - Cerai biasa, iddahnya tiga kali suci bagi wanita yang masih menstruasi. Kalau wanita itu hamil, maka iddahnya sesudah melahirkan.

- Iddahnya tiga bulan lamanya bagi seorang wanita yang telah berhenti menstruasi. Sedangkan bagi wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam perkawinannya, maka tidak ada iddah.

Hikmah dari iddah ini sebenarnya untuk menentukan kebersihan wanita selama menjadi ibu rumah tangga, sehingga kalau melahirkan anak setelah putusnya perkawinan akan menjadi keyakinan bahwa anak itu sebagai keturunannya.

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat yang sama dengan hukum Islam kecuali syarat usia yang ditentukan batasannya. Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan itu dicantumkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11.

3.2.2. *Rukun-rukun perkawinan*

Yang dimaksud dengan *rukun* ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun rukun perkawinan mewajibkan adanya :

a. *Calon pengantin pria dan wanita*

Untuk melangsungkan suatu perkawinan diperlukan kehadiran kedua calon suami istri. Dan kedudukannya sebagai calon suami istri baru, disebut juga calon pengantin. Mereka sebagai calon pengantin diwajibkan hadir, karena untuk pengukuhan dalam membentuk keluarga baru. Tetapi dalam keadaan berhalangan yang tidak mungkin kehadirannya saat itu seperti karena sakit

keras mendadak, berada diluar negeri atau tempat lain tanpa dapat meninggalkan tugas dan tidak dapat hadir dengan alasan-alasan yang meyakinkan, maka dapat diwakilkan untuk sementara itu kepada seorang lain yang memenuhi syarat-syarat perkawinannya.

b. Wali

Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang wali ialah :

- a. Islam,
- b. Dewasa,
- c. Berpikiran sehat,
- d. Jujur,
- e. Baik tingkah lakunya,
- f. Mengetahui asas-asas dan tujuan perkawinan,
- g. Mengetahui dengan jelas asal-usul calon suami istri sebagai pengantin.

Di dalam hukum Islam walaupun seorang telah memenuhi syarat-syarat menjadi wali, tetapi belum tentu dapat menjadi wali perkawinan kalau tidak termasuk pada macam-macam wali. Ada tiga macam wali dalam perkawinan Islam ialah :

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertical maupun horizontal. Adapun wali nasab ini menurut para mazhab urutannya yang berhak mendapat prioritas menikahkan ada perbedaan. Perbedaan urutan wali nasab itu sebagai berikut :

- a. Mazhab Syafi'i memberikan urutan :*

1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya keatas.
 2. Saudara laki-laki kandung seapak seibu.
 3. Saudara laki-laki seapak lain ibu.
 4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
 5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.
 6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung.
 7. Paman seapak, yaitu saudara dari seapak lain Ibu.
 8. Anak laki-laki paman kandung (saudara sepupu)
 9. Anak laki-laki sepaman seapak.
- b. Mahzab Hanafi memberikan urutan :*
1. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah.
 2. Bapak, kakek dan seterusnya keatas.
 3. Sampai dengan 9 sama dengan mazhab Syafi'i.
- Selain itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa kalau wali pri seperti disebutkan dalam urutan di atas tidak ada (sudah meninggal atau jauh). Maka perkawinan itu dapat dilaksanakan oleh wali wanita dengan urutannya sebagai berikut.
1. Ibu,
 2. Ibu dari bapak (nenek),
 3. Anak perempuan,
 4. Anak perempuan dari anak laki-laki(cucu),
 5. Anak perempuan dari anak keponakan perempuan,
 6. Anak perempuan dari cucu laki-laki,

7. Anak perempuan dari cucu perempuan,
8. Bapak dari ibu (kakek),
9. Saudara perempuan kandung,
10. Saudara perempuan seabapak,
11. Saudara seibu dan anak-anaknya,
12. Bibi,
13. Saudara laki-laki dari ibu,
14. Saudara perempuan dari ibu,
15. Anak perempuan dari paman atau bibi dan seterusnya kebawah.

c. Mahzab Maliki memberikan urutan :

1. Bapak,
2. Washi, penerima wasiat dari bapak yang meninggal dunia dan tidak ada hubungan darah,
3. Anak laki-laki walaupun dari zinnah,
4. Cucu laki-laki,
5. Saudara laki-laki,
6. Saudara laki-laki seabapak,
7. Anak laki-laki dari saudara kandung,
8. Anak laki-laki dari saudara bapak,
9. Kakek (bapak dari bapak),
10. Paman kandung,
11. Anak dari paman kandung,
12. Paman seabapak,
13. Anak dari paman seabapak,
14. Bapak dari kakek,
15. Paman dari bapak
16. Orang yang mengasuh calon pengantin wanita.

d. Mahzab Hambali memberikan urutan :

1. Bapak,

2. Washi sesudah bapak meninggal,
3. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas,
4. Anak laki-laki,
5. Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah,
6. Saudara laki-laki kandung
7. Saudara laki-laki sebapak
8. Anak laki-laki dari saudara kandung
9. Anak laki-laki dari saudar sebapak.
10. Paman kandung
11. Paman sebapak
12. Anak laki-laki dari paman sekandung
13. Anak laki-laki dari paman sebapak.
14. Paman dari kakek
15. Anak laki-laki dari paman kakek.
16. Paman bapak {saudara kakek} dan seterusnya ke bawah.

2. *Wali hakim*

Wali hakim adalah wali yang ditugaskan oleh kepada Negara yang yang beragama Islam intuk menikahi seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya. Penugasan wali hakim itu dimaksudkan karena bagi setiap wanita yang mau menikah merupakan syarat mutlak pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. Kalau wanita itu yatim piatu yang tidak mengetahui dan diketahui asal keturunannya, maka hukum Islam mnegaskan bahwa wali perkawinannya ialah Kepala Negara. Tetapi sebagai seorang kepala Negara, tidak mungkin setiap hari menikahkan wanita disetiap bagian wilayah negaranya. Karena itu ditetapkan sebagai wali

pengantin dan berwenang ialah Pejabat Kantor Urusan Agama.

3. *Wali muhakkam*

Wali Muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercaya oleh kedua belah pihak (calon suami-istri) untuk menikahkan di tempat itu asal memenuhi syarat. Penunjukan itu dilakukan dalam keadaan darurat, artinya tidak diperoleh wali nasab dan tidak mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim. Hal ini dapat terjadi, misalnya pernikahan turis, mahasiswa/I yang sedang studi di luar negeri atau tentara dalam peperangan.

c. *Saksi*

Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan ijab Kabul. Tugasnya dalam perkawinan hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan tegas tidanya ijab Kabul diucapkan.

Kesaksian dalam perkawinan Islam didasarkan kepada hadits nabi yang menyatakan “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi”. Dengan hadits nabi selain wali diperlukan juga kehadiran dua oaring saksi untuk sahnya perkawinan. Dan kedua orang saksi dibawa oleh masing-masing pihak asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang diwajibkan kepada wali. Dua oaring saksi khendaklah laki-laki; tetapi kalau tidak ada wanitapun diperkenankan hanya jumlahnya harus 4 orang. Dasar hukum perbandingan jumlah itu kalau dilihat dari makna anak kalimat terakhir dari **Surat (2) Al-Baqarah**

ayat 228 yang menyatakan : “Perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tetapi laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan”. Melalui pernyataan inilah ditetapkan perbandingan saksi laki-laki dan perempuan dimintakan menjadi saksi dalam suatu perkawinan.

d. Akad nikah

Akad nikah, ialah pengukuhan janji perkawinan (pernikahan) sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan, dan tidak meragukan. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul).

Ijab Kabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi, sedangkan jarak waktu antara ijab ke Kabul sekitar 1-2 detik. Kalau jarak waktu itu tidak dipenuhi atau calon pengantin pria diam, merenung atau masih memikir-mikir, akibatnya akad nikah itu harus diulang. Pengulangan dapat juga terjadi kalau Kabul tidak sama bunyinya dengan ijab, pengantin pria gemetar, gugup atau berdebar sebelum mengucapkan Kabul. Dan untuk pengulangannya calon pengantin pria harus ditenangkan dahulu supaya kabulnya diucapkan dengan mantap dan meyakinkan.

Lafaz nikahnya sebagai berikut :

Wali akan menyatakan : Saya nikahkan A bin R dengan anak saya B binti S dengan maskawin Rp. 12.500.00 tunai. Calon suami (A) segera mengucapkan kabul begitu

selesainya kata terakhir dari ijab wali dengan : Saya terima nikahnya B binti S dengan maskawin Rp. 12.500,00 tunai. Lafas nikah ini tidak perlu diulang lagi kalau benar-benar diucapkan dengan tepat, tegas dan jelas yang kesemuanya dinyatakan oleh para saksi setelah selesai ijab Kabul diucapkan. Berarti bahwa para saksi tidak meragukan ijab Kabul itu. Dari lafaz nikah ini terdapat kata-kata mengenai mas kawin, ialah pemberian mutlak pengantin pria kepada pengantin wanita. Pemberian itu dilakukan sesaat upacara ijab kabul. Di dalam perkawinan Islam tidak ditetapkan batas pemberian mutlak yang harus dilakukan baik mengenai jumlah, nilai maupun bentuknya. Tetapi walaupun demikian mas kawin itu selalu merupakan benda yang mempunyai nilai sebagai tanda kasih dan menjadi hak milik mutlak pengantin wanita setelah diserahkan. Selain itu dilarang pemberian mas kawin yang ditentukan jumlahnya dan tidak terjangkau oleh pada umunya anggota masyarakat seperti mas kawin 20 ekor kerbau atau 1 kg emas.

Kalau syarat-syarat dan rukun perkawinan itu telah dipenuhi, maka sahlah perkawinan dan para pihak saat itu berubah status sebagai suami istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Dan sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami istri.

4. Kewajiban Hak Suami Istri

Surah (4) An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa : "Laki-laki itu pengurus atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab (nafkah) yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka".

Dari surah ini sebenarnya terlihat bahwa tanggung jawab kedudukan suami istri pada dasarnya mempunyai kewajiban yang seimbang. Dan tanggung jawab keluarga baik mengenai kehidupan, pembiayaan, pendidikan sekolah, maupun agama sehari-hari terletak kepada kedua orang tuanya.

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan memelihara kelangsungan hidup keluarga. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tanggung jawabnya lebih dititik beratkan kepada suasana rumah terutama bidang perbelanjaan. Tetapi kalau istri mempunyai penghasilan sendiri walaupun tidak sebagai kewajibannya mencari nafkah, maka dalam pembiayaan dan pendidikan anak yang dilakukan dengan penghasilannya akan mendapat pahala.

Seperti halnya telah dikemukakan terdahulu bahwa antara suami dan istri mempunyai derajat yang sama termasuk dalam kedudukan hukumnya. Dengan kedudukan yang sederajat ini dalam persengketaan yang timbul untuk mendapat keputusan hakim dari pengadilan, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan. Tetapi dalam perbedaan pendapat mengenai perbelanjaan, maka keputusannya ada di tangan istri. Dan terhadap besarnya pembiayaan rumah tangga hukum Islam tidak menentukan batasannya. Hal itu tergantung kemampuan suami dan sekurang-kurangnya sanggup memberikan makan, pakaian, dan perumahan.

Nafkah (pembiayaan) sebagai kewajiban suami untuk diperolehnya dalam kegunaan semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Maksudnya semua perbelanjaan rumah tangga dicukupkan sekedar keperluan dan kebutuhan dan mengingat keadaan kekuatan wajar. Untuk memperoleh penghasilan tidak perlu iri kepada keluarga orang lain atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Dan dalam hal ini **Surah (65) At-Talaq ayat 7** menyatakan bahwa : “Orang yang mempunyai kemampuan hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya”.

Dari surah ini jelas bahwa sikap wajar suami dalam memelihara kelangsungan hidup keluarga jangan sampai tergoda oleh nafsu keduniawian yang mendorong dirinya melakukan kegiatan larangan Allah. Kewajiban nafkah itu disebabkan :

1. Keturunan

Wajib bagi suami dan Istri kalau suami tidak ada untuk memberikan pembiayaan kepada anak dan cucu kalau tidak ada bapaknya. Dan anak yang wajib dibiayai itu meliputi semua keturunan baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah dewasa selama belum mampu berusaha sendiri. Tetapi sebaliknya bagi anak yang sudah dewasa dan sudah mempunyai penghasilan sendiri berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang tidak kuat lagi berusaha serta tidak mempunyai harta untuk kelangsungan hidupnya.

2. Perkawinan

Kewajiban bagi suami memberikan pembiayaan kepada istrinya yang taat berupa makanan, pakaian dan tempat kediaman sesuai dengan tingkat kemampuannya. Banyaknya pembiayaan itu ukurannya menurut kebiasaan ditempat masing-masing dengan mengingat tingkatan dan situasi yang sama menurut keadaan

suami. Dan seperti halnya telah dinyatakan dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 228** menyatakan : “Hak istri yang dapat diterima dari suami itu dengan baik”. Dari surah ini jelas bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Berarti juga bagi istri yang tidak taat kepada suami, maka ia tidak berhak meminta nafkah kepada suaminya.

3. *Binatang peliharaan*

Diwajibkan memberi makan kepada binatang peliharaanya termasuk juga menjaga jangan sampai memberi beban atasnya yang tidak sesuai dengan kekuatannya.

Selain dari nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, anggota keluarga dan seisi rumah termasuk binatang peliharaan itu, maka bagi orang tua mempunyai hak mendidik (hadanah). Hak mendidik itu terletak di tangan bapak dan ibu. Mendidik adalah menjaga, memimpin dan mengatur kepentingan anak dan mengatur dirinya sendiri.

Dalam hal mendidik anak itu orang tua memberikan bimbingan dengan pembinaan yang baik mengenai sopan-santun, pentaatan terhadap hukum Negara dan pengajaran agama. Sedangkan dalam mengatur diri sendiri dimaksudkan sebagai orang tua jangan sampai memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya dalam tingkah laku sehari-hari. Kalau sampai terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka hadanah dilakukan sebagai berikut :

1. Diberikan kepada ibu.

Diutamakan hadanah kepada ibu bagi anak yang belum mumayiz (belum mengerti keadaan dirinya) sampai mampu membedakan baik dan buruk.

Ibu yang berhak mendidik anak itu disyaratkan sampai dengan belum kawin lagi. Hal ini dimaksudkan bahwa sebelum kawin

lagi akan mempunyai konsentrasi pikiran penuh dalam mendidik anak, sedangkan dalam keadaan mempunyai suami akan ada kewajiban lain untuk mentaati hidup bersama.

2. Diberikan kepada bapak.

Dalam keadaan anak sudah mumayiz dapat dipilih antara ibu dan bapak yang lebih pandai mendidik anak. Tetapi kalau ibu sudah kawin lagi, maka bapak akan dapat menerima hadanah kepada anaknya dengan syarat mempunyai tingkah laku baik dan bertanggung jawab atas terwujudnya pendidikan anak melalui bimbingan yang baik pula. Kalau bapak tidak mungkin menerima hadanah karena tidak memenuhi syarat, maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan.

3. Diberikan kepada orang lain dari pihak keluarga.

Orang lain dari pihak keluarga yang dapat menerima hadanah kalau kedua orang tuanya tidak mungkin melaksanakan terletak di tangan para wanitanya. Tetapi para pendidik itu dapat juga dari pihak laki-laknya kalau para wanita tidak mungkin dapat melakukan hadanah.

Kalau pendidikan para wanita secara berurutan mulai dari ibu, nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas. Dan dalam keadaan dari pihak istri ini tidak dapat melakukan hadanahnya, maka anaknya dapat diberikan kepada para wanita dari pihak suami dengan urutan nenek, saudara perempuan dan seterusnya ke atas. Demikian seterusnya dari para pihak yang termasuk para wanitanya.

Pendidik laki-laki secara berurutan mulai dari bapak, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dan terakhir paman. Dalam hal kedua keluarga para pihak tidak ada, maka hadanah dapat diberikan kepada keluarga jauh dengan syarat-syarat :

- a. Berakal,
- b. Merdeka,
- c. Menjalankan agama Islam,
- d. Dapat menjaga kehormatan dirinya,
- e. Dapat dipercaya,
- f. Tetap membawa anak didiknya,
- g. Diutamakan para wanita yang tidak kawin,

Para pendidik itu menjalankan hak mendidiknya bagi anak yang masih belum berusia 15 tahun atau baliq. Kalau anak itu sudah lewat usia 15 tahun kelangsungan dalam menerima bimbingan dan pembinaan diri diserahkan kepada anak itu untuk memilih pendidikannya. Dan selama anak belum dapat berdiri sendiri pembiayaan diberikan oleh bapaknya walaupun orang tuanya itu telah kawin lagi.

5. Putusnya Perkawinan

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami istri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik.

Tanpa dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu fungsi orang tua di dalam kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukkan oleh seorang anak dalam pergaulan sehari-hari.

Tetapi walaupun Islam menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebagai sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali, bahkan kadang-kadang kalau

kehidupan suami istri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis niscaya akan ada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegiatan individu. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa :

1. Kematian salah satu pihak.
2. Putus akibat perceraian, karena adanya :
 - a. Talak atas inisiatif suami,
 - b. Khuluk, yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (iwadl),
 - c. Fasakh, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan Hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak sengaja,
 - d. Syiqoq, yaitu konflik antar suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi,
 - e. Melanggar talak-taklik, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

5.1. Putus perkawinan karena kematian salah satu pihak

Suatu kematian itu merupakan takdir Allah yang telah dikodratkan bagi setiap manusia untuk mengalaminya dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sendiri. Kadang-kadang melalui proses sakit dahulu dan berakhir dengan kematian, tetapi ada kalanya tanpa diketahui, dalam arti keadaan sehat, ternyata terjadi peristiwa kematian. Dengan demikian menunjukkan bahwa manusia itu hidup tidak kekal (abadi).

Kalau terjadi kematian dari salah satu pihak antara suami dan istri mengakibatkan perkawinan itu putus. Seorang istri yang kematian suaminya tidak terikat lagi dengan keluarga suami atau kerabat suami dan dirinya bebas menentukan pilihan lebih lanjut. Kalau ia memilih tidak akan kawin lagi, maka selama itu akan memegang status janda, dan kalau memilih akan kawin lagi, diwajibkan menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah masa iddah itu dilalui untuk perkawinan selanjutnya dapat dilaksanakan. Dan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai anak dilahirkan. Masa iddah karena kematian suaminya itu dinamakan “iddah wafat”.

Kalau suami kematian istrinya, selain tidak terikat lagi dengan keluarga istri dan kerabatnya, maka ia bebas melakukan pilihan mendudua atau akan kawin lagi. Kalau akan kawin lagi tidak ada larangan untuk segera mewujudkan, karena bagi pria tidak ada jangka waktu tunggu (iddah) seperti diwajibkan kepada wanita yang kematian suaminya.

5.2. *Perceraian*

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami istri dalam hubungan keluarga. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perceraian itu dalam beberapa hal, yaitu :

5.2.1. *Talak*

Talak artinya cerai. Pelaksaaannya dilakukan atas inisiatif suami dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja.

Maksudnya dalam suatu pertengkaran kalau terjadi ucapan talak dari suami kepada istri sudah cukup ucapan itu memutuskan hubungan perkawinan. Karenanya, suami tidak boleh mengucapkan kata-kata yang terlalu mudah untuk menceraikan isrti tanpa disadari sepenuhnya.

Menurut fiqh, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sah hukumnya seorang suami menjatuhkan talak atau ucapan cerai kepada istrinya walaupun tanpa pemeriksaan atau mengemukakan alasan-alasan. Cerai dalam pengertian ini akan sangat mudah terjadi tanpa adanya pembelaan dari istri. Karena itu untuk menjamin kedudukan yang sama antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga fiqh membagi talak dalam tiga kategori, yaitu :

1. Talak Sarihah (jelas dan tegas)

Talak sarihah merupakan ucapan suami kepada istri dilakukan dengan bahasa yang terang dan tidak meragukan bahwa yang dimaksud dari ucapannya itu adalah perceraian.

Contoh : Istriku karena karena kita tidak cocok sebagai suami istri, maka aku ceraikan kamu.

2. Talak Kinayah (sendirian)

Talak kinayah ini merupakan ucapan suami dengan kata-kata tidak jelas kepada istri, tetapi mengandung maksud cerai. Dan karena ketidakjelasan kata-kata yang diucapkan, maka istri berhak menyatakan maksud ucapan suami itu terlebih dahulu.

Contoh : Istriku, pulang sajalah kamu ke rumah orang tuamu supaya bahagia.

3. Talak dalam keadaan marah

Suami dalam keadaan marah dapat menjatuhkan talak kepada istri. Kemarahan suami dalam mengucapkan talak

itu dapat dibedakan dalam tiga tingkatan kemarahan yaitu :

- a. Marah dalam keadaan disadari dan tahu terhadap kata-kata yang diucapkan, maka talak ini sah hukumnya.
- b. Marah dalam keadaan disadari, tetapi kalau dinyatakan tidak tahu kata-kata yang diucapkan maka talak itu hukumnya tidak sah.
- c. Marah yang memuncak dan kelihatan seperti orang sakit ingatan, tidak menyadari kata-kata yang diucapkan, maka talaknya tidak sah.

Selain itu ada dua bentuk talak yang tidak sah hukumnya kalau dilakukan oleh seorang suami, yaitu :

- Talak ancaman atau paksaan,
- Talak main-main atau bergurau.

Berdasarkan bentuk-bentuk peristiwa talak tersebut diatas, maka dapat dibedakan ketetapan hukumnya yang dinamakan hukum talak. Dan hukum talak talak itu ada lima, yaitu :

1. Talak Wajib

Wajib hukumnya melakukan talak kalau konflik antara suami dan istri terus menerus terjadi dan tidak dapat dipertemukan lagi baik oleh keluarga maupun oleh Pengadilan Agama. Dan selain itu juga bagi salah satu pihak yang melakukan perbuatan kejahatan atau mejadi seorang residivis tidak perlu mempertahankan kesatuan hidup dalam keluarga, Karena wajib hukumnya melakukan talak.

2. Talak Haram

Diharamkan hukumnya bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab yang sah. Sebab yang sah itu menurut mazhab hanafi berkenaan dengan dijatuhkannya talak oleh suami yang tidak sehat pikirannya.

Menurut mazhab Syafi’I dan mazhab Hambali suatu talak yang dijatuhkan oleh suami tidak sehat pikirannya tidak haram melainkan makruh. Hal ini berdasarkan prinsip perkawinan Islam yang tidak menghendaki kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

3. Talak Mubah (boleh)

Menceraikan istri tidak dianjurkan, tidak diwajibkan atau tidak diharamkan asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat buruk bagi para pihak setelah terjadi perceraian itu.

4. Talak Sunnat

Sunnat hukumnya menceraikan istri kalau ia tidak mau merubah kebebasan bergaulnya semasa belum kawin atau tidak mau menjaga harga diri sebagai seorang istri.

5. Talak Haram Ringan

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan menstruasi yang sebelumnya tidak pernah digauli termasuk talak haram ringan. Kalau talak itu dilakukan kewajiban suami merujuk atau menyatakan sebagai istrinya kembali.

Karena itu supaya jangan sampai terjadi kesalahan dalam menjatuhkan talak kepada istrinya perlu diketahui lebih dahulu tingkah laku istri secara benar dan ada bukti yang dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak. Tingkah

laku istri yang dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak oleh suaminya berkenaan dengan perbuatan zina yang diakui dan diketahui, kedurhakaan dan tidak mau mentaati, pemabuk dan melakukan perbuatan yang tidak mungkin dapat menciptakan kehidupan harmonis seperti tidak mau mendidik anak dalam ajaran agama dengan baik bahkan memberikan contoh-contoh yang asusila. Tetapi walaupun demikian hanya suami atau wakilnya yang berpikiran sehat tanpa ada paksaan dari siapapun yang dapat mengajukan dan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan pelaksanaan talak itu dapat ditempuh dengan melihat pada jenis-jenis talaknya, yaitu :

1. Talak Rojai

Talak Rojai adalah talak suami kepada istri dengan hak suami kembali lagi kepada bekas istrinya tanpa melakukan akad nikah baru. Hak kembali itu disebut rujuk atau rojai. Talak rojai dapat dilakukan secara bertingkat secara pernyataan talak kesatu atau untuk yang kedua dengan pernyataan talak kedua dari suami. Maksud dijatuhkan talak bertingkat kesatu atau kemudian yang kedua supaya dapat dilakukan rujuk dari suami. Dan rujuk itu dapat dilakukan kalau ternyata perceraianya ada penyesalan dari kedua pihak. Dalam masa iddah mereka dapat kembali sebagai suami istri.

Melakukan rujuk akan mendapat pahala dan hanya diperkenankan setelah jatuhnya talak kesatu atau sebagai berikut :

- a. Bekas suami istri selam perkawinan pernah melakukan hubungan seksual.

b. Talak dijatuhkan kepada istri tanpa uang ganti rugi (tebusan).

c. Caranya harus dinyatakan dengan lisan.

Menurut mazhab Syafi’I dapat juga dilakuakn dengan perbuatan langsung mengajak bekas istrinya mengadakan hubungan seks.

Rujuk yang dinyatakan dengan lisan sudah cukup kalau diucapkan dengan kata-kata ‘Aku kembalikan engkau sebagai istriku’ atau ‘Aku rujuk kepadamu’. Dan dengan kata-kata jelas itu kedudukan kedua belah pihak kembali menjadi suami istri.

2. Talak Bain

Talak bain ialah talak suami yang dijatuhkan kepada istri dan suami tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak bain ini ada 2 macam yaitu:

a. Talak Bain Kecil (talak bain sughra)

Talak bain kecil ialah pernyataan talak satu atau dua disertakan tebusan atau uang ganti rugi dari istri. Tebusan itu dapat berupa benda atau uang yang dinamakan uang pengganti atau uang iwadl (khuluk).

Dalam talak bain kecil ini masih dimungkinkan bagi bekas suami untuk mengambil bekas istrinya kembali melalui akad nikah baru.

b. Talak Bain Besar (talak bain kubra)

Talak bain besar adalah talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Bagi kedua belah pihak tidak boleh rujuk atau melakukan akad nikah baru. Tetapi kalau seandainya mereka masih ada keinginan untuk bersatu kembali sebagai suami istri ada kewajiban

husus yang harus dipenuhi oleh bekas istrinya. Kewajiban khusus itu merupakan jalan keluar yang wajib ditempuh, yaitu setelah jatuh talak ketiga dan bekas istri selesai menjalankan masa iddah, maka ia harus melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Kalau perkawinan itu putus Karen perkawinan atau suami meninggal, maka ia dapat melakukan perkawinan dengan bekas suami yang pertama.

Alasan hukum bagi orang seorang wanita wajib melakukan perkawinan dengan laki-laki lain setelah jatuh talak ketiga untuk dapat menikah dengan laki-laki yang menalaknya, ialah :

1. Janda diberi kesempatan menikah dengan laki-laki lain itu agar mencoba mencari pengalaman dalam kehidupan rumah tangga baru. Dari pengalamannya dapat membandingkan laki-laki yang mempunyai tingkah laku lebih baik. Dan dari pengalaman itu dapat dipikirkan apakah dirinya akan kembali kepada bekas suami atau tetap berumah tangga dengan suami yang baru.
2. Kalau dalam perkawinan pertama tidak memperoleh keturunan dan dalam pernikahan kedua mendapatkannya, berarti ia dapat membuktikan ketidakmandulan yang mungkin menjadi alasan suami untuk menceraikannya.

Dengan kedua alasan hukum ini, sebenarnya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan suami dengan tergesa-gesa menjatuhkan talak bain besar kepada istrinya. Sedangkan proses perkawinan dengan laki-laki

lain setelah talak bain besar dijatuhkan suami dinamakan *nikah sela (muhallil)*.

5.2.2. *Khuluk*

Khuluk artinya tebusan. Talak khuluk merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami atas inisiatif istri agar ia diceraikan dengan baik-baik dan akan diberikan ganti rugi atau tebusan. Ganti rugi atau tebusan itu diberikan oleh istri kepada suami berupa benda atau sejumlah uang. Talak ini tidak boleh rujuk dalam masa iddah atas kehendak suami saja. Mengenai besarnya jumlah khuluk mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istri boleh melakukan kawin yang diterima kalau istri tidak taat kepada suami. Kalau dilihat dari pelaksanaannya talak khuluk dan suami tidak boleh rujuk, berarti dalam keadaan ingin menarik kembali bekas istrinya itu wajib melakukan proses perkawinan baru.

5.2.3. *Fasakh*

Fasakh sebagai suatu perceraian suami istri yang dilakukan melalui proses pengadilan dengan keputusan hakim, karena syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan itu tidak dipenuhi, tetapi perceraian dilakukan atas permohonan. Dan alasan-alasan yang dapat diterima dalam perceraian ini adalah :

a. Menderita sakit

Alasan menderita sakit hanya ditujukan kepada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan terdiri atas :

1. Sakit ingatan,
2. Sakit kusta,
3. Tidak sanggup melakukan hubungan seks karena impotent.

Tetapi dalam perkembangan dunia kedokteran sekarang ketiga macam penyakit ini sudah banyak yang dapat disembuhkan. Karenanya suatu perceraian dengan alasan suami menderita sakit tergantung atas permohonan istri. Maksudnya, istri sebelum mengajukan permohonan cerai wajib mempertimbangkan dan mengusahakan penyembuhannya lebih dahulu atas derita yang menjadi beban suami kecuali ada alasan lain untuk pbenarannya.

b. Keadaan ekonomi

Kalau suami tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga dalam kelangsungannya seperti makan, sandang dan perumahan, maka istri dapat mengajukan permohonan cerai. Tetapi alasan inipun perlu dipertimbangkan lebih dahulu terutama dalam ketidakcukupan kalau tidak mengganggu kelangsungan hidup keluarga sehari-hari bahkan ada suatu harapan dalam menambah penghasilan, maka tidak perlu dilakukan perceraian.

c. Sosio-psikologis

Yang dimaksudkan dengan alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri dalam menanggung beban kehidupan tanpa harmonisasi psikis yang banyak diketahui tetangga atau lingkungannya.

Alasan yang dapat dikemukakan oleh istri dalam mengajukan permohonan cerai karena :

1. Suami meninggalkan istri tanpa memberiyahukan atau tidak diketahui lagi tempat kediamannya lagi. Menurut khalifah Umar lamanya istri menunggu kedatangan suami sampai 4 tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan cerai. Tetapi dalam perkembangan hukum

sekarang sebelum istri mengajukan permohonan cerai harus ditempuh pemanggilan sebanyak tiga kali. Dan kalau tidak ada jawaban dilanjutkan dengan mengajukan permohonan cerai.

2. Suami sering menyeleweng, pemabuk, penjudi, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu psikis istri dan kehidupan rumah tangganya.

5.2.4. *Siqoq*

Siqoq artinya sengketa atau konflik. Dalam kehidupan rumah tangga suatu pertengkaran antara suami istri tidak mungkin dapat dihindarkan. Hal ini dapat dipahami, karena dua pikiran dan pendapat terhadap suatu hal sering tidak dapat dipertemukan dalam suatu pendapat dengan segera yang berakibat timbulnya pertengkaran. Dan pertengkaran itu mempunyai hikmah tersendiri kalau terjadi titik temu dari dua pendapat yang berbeda dan akan menjadi pegangan dalam menghadapi masalah yang sama. Tetapi kalau pertengkaran dibangun dengan kuat oleh masing-masing pihak tentu tidak akan menimbulkan suatu titik temu bahkan akan terjadi suatu persengketaan (konflik).

Pada umumnya suatu konflik terjadi karena para pihak berbeda sikap terhadap suatu hal dan mempertahankan pendapatnya dalam menjaga prestise, atau adanya suatu fitnah, cemburu yang berlebihan, atau prasangka individu. Konflik yang sering terjadi di dalam kehidupan suatu rumah tangga dan tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berakibat timbulnya gangguan psikis dan tidak dapat tentram dalam hidupnya. Situasi itu kalau berlangsung terus dengan

diselingi konflik-konflik lainnya, berarti tidak mencerminkan kehidupan rumahtangga yang baik. Karena itu pada puncak konflik dan apalagi terjadi lepas bergaul (*scheiding van tafel en bed*) diizinkan istri mengajukan permohonan cerai melalui Pengadilan Agama.

Untuk menyelesaikan masalah konflik yang tidak dapat ditemukan titik pengertian antar keduanya, maka hakim akan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Setelah itu diusahakan seoptimal mungkin dalam memberikan pengertian supaya konflik itu diakhiri dengan damai. Dan kalau tidak berhasil, maka hakim mengangkat ‘hakam’, yaitu perwakilan dari para pihak yang secara jujur ditugaskan mencari data-data timbulnya konflik. Setelah itu keduanya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang dianggap baik demi kepentingan para pihak yang berselisih. Proses penyelesaian itu dilakukan oleh istri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan melalui cerai gugat dan disertakan alasan yang utama ialah salah satu, sebagian atau semua taklik yang diucapkan suami telah dilanggar.

Kalau keputusan hakam dapat diterima oleh para pihak dan dapat berdamai, maka mereka itu wajib mentaati hasil keputusan dan hidup sebagaimana layaknya suami istri. Tetapi kalau keputusan hakam ditolak, maka dianjurkan bagi kedua belah pihak menempuh talak khuluk.

5.2.5. Taklik-talak

Taklik adalah suatu janji dari suami kepada istri yang didasarkan kepada syarat-syarat tertentu. Lembaga taklik itu timbul kalau ada penilaian istri bahwa suaminya menunjukkan gejala-gejala akan menyia-nyiakan atau akan

meninggalkannya dikemudian hari. Karenanya wajar bagi mereka menentukan suatu janji demi kebaikan hubungan suami istri.

Taklik fungsinya untuk menjaga kerukunan hidup suami istri dan mengimbangi hak talak atas inisiatif suami.

Syarat-syarat taklik yang perlu diperhatikan sebelum dibuat dan dibacakan sesaat selesai akad nikah, yaitu isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, tertera dengan jelas dan tegas, tetapi tidak boleh tanpa dalam keadaan nyata, seperti “Kalau matahari terbit dari barat, maka jatuhlah talak saya”. Pada umumnya taklik itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab Kabul dengan lafaznya sebagai berikut : Taklik talak akan jatuh, sewaktu-waktu saya,

1. Meinggalkan istri tersebut 2 tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 bulan lamanya.

Kalau suami telah mengucapkan janji itu dengan tegas dan dalam kenyataan dilanggar, maka jatuhlah talak taklik atas tuntutan istri. Jadi talak taklik itu adalah perceraian sebagai akibat pelanggaran janji yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah.

6. Akibat-akibat Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan yang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan menimbulkan pewarisan. Ketentuan-ketentuannya

diatur dalam hukum waris Islam. Tetapi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian, suami istri masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut :

- a. Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya. Walaupun hukum Islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban memberikan jaminan itu mutlak.

Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya akan mendapat dosa besar. Dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui Pengadilan Agama sesuai kemampuan bekas suaminya.

Kalau laki-laki itu tidak mampu sama sekali, maka keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama wajib membiayai janda dan anak-anaknya atau anak-anak itu dipungut oleh saudara kandung bekas suaminya. Jalan yang ditempuh ini termasuk wajib “kifayah”, yaitu secara bersama-sama dari keluarga bekas suaminya menanggung biaya.

- b. Selama bekas istri menjalankan iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan “mut’ah” yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti istri selama perkawinan berlangsung. Mut’ah ini jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, kedudukan bekas istri dan lamanya mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi bagi anak-anak tetap menjadi tanggungan bekas bapak sampai dewasa atau dapat mandiri.
- c. Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidaktaatan istri kepada suami, seperti penyelewengan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, pemabuk, penjudi dan lainnya, maka

bekas suaminya tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali bantuan selama iddah dan mut'ah.

Dalam perkembangan pergaulan hidup yang lebih meluas dan adanya sarana komunikasi yang lebih singkat, maka pelaksanaannya sering duda tidak mau memenuhi kewajiban hukum itu, supaya jangan sampai terjadi penyimpangan dari aturan hukum yang dilakukan oleh dudanya, maka dalam proses penyelesaian cerai oleh hakim Pengadilan Agama jaminan bagi janda dimintakan secara tegas dan jelas. Dan hakim wajib mempertimbangkan secara obyektif.

Demikian juga sebaliknya hak hukum janda yang dimintakan jangan sampai dipengaruhi oleh siapapun juga dan tidak masuk akal. Artinya baik orang tua maupun wakilnya wajib mempertimbangkan kemampuan suami atau sanak keluarganya yang berakibat tidak menyengsarakan kehidupan mereka dikemudian hari.

Semua proses mengenai penyelesaian perceraian sejak lakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dilakukan di Pengadilan Agama sesuai wilayah wewenanganya.

BAB V

HUKUM WARIS

1. Pengertian dan Pemikiran Hukum Waris

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Kematian itu bagi makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.

Maksudnya kalau ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya sesuatu yang tidak terwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak dalam benda tetap. Nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.

Bagaimanakah pembagiannya dan terhadap siapa dibagikan harta peninggalan itu? Hal inilah yang merupakan akibat hukum dari suatu kematian.

Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian itu ketentuannya diatur dalam ‘hukum waris’.

Jadi hukum waris adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Dan menurut arti katanya “waris” berasal dari bahasa arab “warosta” artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka.

Dilihat dari rumusan-rumusan ini menunjukkan adanya unsur-unsur subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu pewarisan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Timbulnya subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu pewarisan itu kalau terjadi peristiwa kematian. Yang dimaksud dengan subyek hukum dan obyek hukum itu adalah :

Subyek hukum dalam pewarisan :

1. *Pewaris* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Orang yang meninggal dunia dimaksudkan baik pria/wanita maupun yang belum berkeluarga, meninggalkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan untuk dipindahtangankan kepada yang berhak dan masih hidup.

Yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam keadaan bersih, ialah sisa dari hak-hak yang didahulukan seperti kewajiban yang ditinggalkan dan perlu diselesaikan, kemudian orang yang berhak menerima bagian benar-benar menerimanya tanpa memikul beban kewajiban pewaris.

2. *Ahli waris* adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang pewaris. Dan orang yang berhak menerima bagian dari pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisnya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain ada empat sebab, yaitu :

a. *Hubungan darah (nasab)*

Yang dimaksud hubungan darah, adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun-temurun baik laki-laki maupun perempuan.

Hubungan darah ini secara umum disebut juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan pewaris. Karena itu bagi

embrio yang masih ada di dalam kandungan ibunya akan memperoleh bagian harta warisan bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia. Tetapi kalau anak itu lahir dan meninggal dunia dianggap tidak pernah ada. Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan : “Apabila menangis anak yang baru lahir ia mendapat pusaka”.

Berdasarkan pengertian hubungan nasab yang menyatakan hanya kesatuan dalam darah secara turun-temurun, maka bagi anak angkat yang bukan keluarga sedarah tidak memiliki hak mewaris.

Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam **Surah (33) Al Ahzab ayat 4** yang menyatakan : “Allah tidak membenarkan anak angkat kamu menjadi anak yang sebenarnya, demikian hanya perkataan yang dimulut kamu saja, tidak dengan sebenarnya, yang berkata benar ialah Allah dan Dia-lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”.

Selain dari kesatuan dalam darah, maka hubungan nasab itupun termasuk saudara-saudara pewaris dan keturunannya bersama-sama orang tuanya.

b. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam

Suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu. Dan hal ini termasuk juga perkawinan yang menggunakan asas poligami dengan maksimal empat orang istri asalkan masih berdasarkan kepada kebenaran hukum perkawinan.

Dilihat dari sahnya suatu perkawinan, maka salah satu akibat hukumnya bahwa kalau terjadi kematian suami atau istri akan

menimbulkan suatu pewarisan. Dan pewarisannya menyangkut keluarga sedarah dari pihak pewaris dalam pembagian harta warisannya.

c. *Pemberi kemerdekaan kepada hamba (budak belian)*

Pembudakan merupakan suatu pemerasan (eksplotation) tenaga, pikiran dan hak orang lain. Seorang budak (hamba) tidak dapat menggunakan haknya secara leluasa dalam bertindak kecuali atas kekuasaan majikannya. Dan bagi seorang majikan yang beriman, maka pikiran dan perasaan budak tentu dapat dirasakan seperti dirinyasebagai budak. Karena itu kalau seorang majikan dapat menyelami perasaan budak kemungkinan dengan kerelaan hati mau memerdekakan budaknya. Kalau tindakan itu terjadi, maka majikan sebagai pemberi kemerdekaan akan mempunyai hubungan derajat itu berdampingan kedudukannya seolah-olah merupakan juga satu keturunan antar keduanya. Dilihat dari kedudukan seolah-olah sebagai satu keturunan itulah, maka dalam pewarisan bagi pemberi kemerdekaan akan menjadi ahli waris dari penerima kemerdekaan.

Kedudukan sebagai ahli waris ini dinyatakan secara jelas dalam hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Chuzaimah, Ibnu Habban dan Hakim, menyatakan : “Hubungan orang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan turunan dalam arti turunan tidak dijual dan tidak diberikan”.

Dengan demikian berarti juga bahwa kalau bekas hamba itu meninggal dunia, maka pemberi kemerdekaan menjadi salah satu ahli warisnya.

d. Hubungan kesamaan agama Islam

Yang dimaksud dengan hubungan kesamaan agama Islam yaitu kalau terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab, berarti nasib harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan pemiliknya kepada yang berhak. Dalam keadaan ini untuk menghindarkan ketidagunaan dari harta warisan yang ditinggalkan, maka diserahkan kepada Baitulmal untuk umat Islam.

Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menjelaskan bahwa : sabda Rasulullah “Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris”.

Dari hadist ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima pusaka untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan umat Islam. Dan dilihat dari kenyataan yang melibatkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang menerima harta warisan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris walaupun hanya untuk kepentingan umat Islam, di sini menunjukkan adanya kaitan dalam hubungan kesamaan agama Islam antara pewaris di satu pihak dan Nabi Muhammad di lain pihak.

Bagi ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan kedudukannya tidak mutlak menerima bagiannya kehilangan hak mewaris kalau hal tertentu dapat mewariskannya. Dan hal tertentu yang dapat menghilangkan hak mewaris terhadap seorang ahli waris, ialah :

a. **Murtad**, yaitu keluar dari agam Islam

Orang yang keluar dari agam Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota keluarganya yang masih tetap beragama

Islam. Dan murtad dirinya bukan pewaris terhadap keluarganya yang beragama Islam.

b. Bukan pemeluk agama Islam

Bagi anggota keluarga yang tidak memeluk agama Islam akan kehilangan mewaris dari keluarga yang beragama Islam. Dan keluarga yang beragama Islam itu tidak dapat mewaris harta warisan dari anggota keluarga yang tidak beragama Islam.

c. Pembunuh

Anggota keluarga yang membunuh keluarganya baik dengan maksud supaya dapat menerima warisan maupun maksud lain, maka dirinya sebagai pembunuh tidak dapat menerima bagian dari harta warisan orang yang dibunuhnya.

d. Budak belian

Seorang budak belian (hamba) tidak mendapat bagian harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia, karena kedudukannya bukan sebagai orang yang merdeka.

Keempat ketentuan ini merupakan larangan mewaris, karena ahli warisnya menjadi kehilangan hak menerima bagian dari harta warisan yang semula ada hak untuk itu. Kalau keturunan sedarah tidak kehilangan hak mewarisnya dan demikian juga bagi seorang yang mempunyai hak mewaris yang tidak kehilangan hak mewarisnya, maka mereka akan diketahui termasuk ahli waris sesuai pengelompokannya. Yang termasuk ahli waris ada dua kelompok, yaitu :

a. Kelompok pria, terdiri atas :

1. Anak laki-laki dari yang meninggal dunia,
 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus dalam garis lurus ke bawah asalkan laki-laki,
 3. Bapak dari yang meninggal dunia,
 4. Kakek dari pihak bapak dan terus dalam garis lurus ke atas,
 5. Saudara laki-laki seibu seapak,
 6. Saudara laki-laki seapak,
 7. Saudara laki-laki seibu,
 8. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak,
 9. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak,
 10. Paman dari pihak bapak yang seibu seapak,
 11. Paman dari pihak bapak yang seapak,
 12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seibu seapak,
 13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seapak,
 14. Suami,
 15. Orang laki-laki yang membebaskan jenazah.
- Kalau kelompok pria ini ada semua, maka yang akan memperoleh harta warisan (pusaka) dari pewaris hanya anak laki-laki, bapak dan suami.

b. Sedangkan **kelompok ahli waris wanita** terdiri atas:

1. Anak perempuan,
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus dalam garis lurus ke bawah asal ikatan dari laki-laki,
3. Ibu,
4. Nenek dari pihak bapak,
5. Nenek dari pihak ibu dan terus dalam garis lurus ke atas asal tidak diselang laki-laki,

6. Saudara perempuan seibu seapak,
7. Saudara perempuan seapak,
8. Saudara perempuan seibu,
9. Istri.

Kalau kelompok wanita ini ada semua, maka yang akan memperoleh harta warisan (pusaka) dari pewaris ialah :

1. Istri,
2. Anak perempuan,
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki,
4. Ibu,
5. Saudara perempuan seibu seapak.

Dan kalau kedua kelompok itu ada semua, maka yang akan memperoleh harta warisan, ialah salah seorang dari suami-istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan ahli waris lainnya tidak memperoleh bagian harta warisan.

Obyek hukum dalam pewarisan :

3. *Harta warisan (pusaka)*

Harta kekayaan yang ditinggal oleh seseorang saat setelah meninggal dunia menjadi harta yang diwariskan. Tetapi harta kekayaan yang menjadi harta yang diwariskan itu harus dalam keadaan bersih. Maksudnya ahli waris yang menerima bagian akan memperolehnya tanpa menanggung beban hutang dari pewaris dan hak-hak lainnya yang didahulukan. Hak-hak yang didahulukan sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli warisnya ialah :

- a. Hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan seperti zakat dan sewanya. Hak ini diambil lebih dahulu jumlah harta peninggalan.
- b. Biaya untuk keperluan jenazah seperti harga kain kafan dan ongkos penggalian tanah kubur. Setelah kedua biaya diambil

dari harta peninggalan dan dibayarkan, maka kemudian dipisahkan biaya untuk mengurus jenazah.

- c. Hutang, artinya kalau yang meninggal dunia itu semasa hidupnya meninggalkan hutang, maka harus dilunasi dari harta peninggalannya.
- d. Wasiat, artinya kalau yang meninggal dunia mempunyai wasiat, maka wasiat itu harus dibayar dari harta peninggalannya. Wasiat, ialah amanat (pesan) untuk suatu kebaikan yang akan dijalankan setelah orang itu meninggal dunia. Sebagai hukum sunnat, maka wasiat itu mempunyai empat rukun, yaitu :
 - 1. orang yang berwasiat disyaratkan agar keadaan wasiatnya bersifat mutlak dan rela, berhak berbuat kebaikan dan kehendaknya.
 - 2. yang menerima wasiat (maushilah) hendaknya melaksanakan dengan jujur, tidak pernah berbuat maksiat dan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun mesjid, sekolah atau lainnya. Dalam keadaan tertentu hendaknya bagi penerima memang seseorang yang boleh memiliki. Dan menerima wasiat itu disyaratkan :
 - a. Islam,
 - b. Sudah baliq,
 - c. Berpikiran sehat,
 - d. Orang merdeka,
 - e. Amanah, artinya dapat dipercaya,
 - f. Cakap untuk menjalankan tindakan hukum sesuai kehendak yang berwasiat.
 - 3. Sesuatu yang diwasiatkan hendaknya dapat dipindatangankan kepada orang lain.

4. Lafaz (kalimat) wasiat merupakan kalimat yang jelas dan dapat dipahami.

Wasiat itu ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Karenanya kalau ada wasiat yang ditujukan kepada salah seorang ahli warisnya berarti tidak sah kecuali direlakan oleh semua ahli waris sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan besarnya wasiat yang dibenarkan hanya sepertiga harta, artinya sepertiga dari seluruh kekayaan yang ditinggalkan setelah dikurangi zakat dan sewanya, biaya untuk keperluan jenazah dan mengurusnya, hutang yang keseluruhannya itu harus didahulukan. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka yang diberikan hanya sepertiga saja kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.

Setelah keempat rukun yang didahulukan itu dipenuhi, maka sisanya merupakan satu kesatuan harta waris yang dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai faraid (pembagian harta pusaka) yang telah ditentukan Allah.

Dari uraian pengertian hukum waris diatas, maka dapat ditarik suatu makna bahwa asas pewarisan menurut hukum Islam yaitu *bilateral* dengan :

1. Mendudukan anak bersama-sama orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris.
2. Dalam hal pewaris tidak mempunyai keturunan, maka saudara-saudaranya bersama-sama orangtua menjadi ahli waris.
3. Suami istri saling mewaris.
4. Mengenal faraid, yaitu bagian tertentu bagi ahli waris tertentu.

Asas bilateral itu secara prinsipil menunjukkan bahwa harta warisan harus dibagi kepada ahli waris yang berhak baik pria maupun wanita dengan adil. Dan *Adil* yang dimaksudkan sesuai

kodratnya bahwa harta warisan dibagikan untuk setiap anggota keluarga yang berhak menerima dan dalam kepentingan keseluruhan dan supaya terjamin kelangsungan hidup yang sejahtera.

Sedangkan kegunaan harta warisan itu untuk melanjutkan kehidupan agama yang baik dala bertaqwa kepada Allah, sebab kekayaan yang dimiliki seseorang berasal dari Allah. Dan dalam penggunaannya wajib sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum Allah.

Mengenai pembagian harta warisan sebagai suatu amanat menunjukkan adanya kepercayaan yang diberikan Allah untuk digunakan dengan baik supaya para ahli waris yang berhak menerima ikut menikmatinya. Karena itu pewarisan dalam hukum Islam tidak saja hanya untuk kepentingan pria dan wanita yang berhak menerima melainkan juga bagi kepentingan setiap orang yang berhak menerimanya. Bahkan kalau ada wasiat yang mengenyampingka ahli waris, maka wasiat itu berlaku hanya sepertiga bagian dan duapertiga bagian lainnya menjadi hak dari para ahli waris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran hukum waris ini selain berasaskan bilateral juga bertujuan untuk kepentingan orang lain di luar ahli waris kalau ada wasiat.

2. Pembagian Harta Warisan

2.1. Penggolongan dari kelompok ahli waris

Membicarakan mengenai pembagian harta warisan lebih dahulu harus diketahui hukum-hukum dasar penggolongan dari kelompok ahli waris yang diutamakan. Kemudian barulah akan dapat mengenal bagian-bagian tertentu harta warisan yang dapat dihaki oleh ahli waris. Penggolongan ahli waris yang diutamakan

secara berurutan dan lazim digunakan diberikan oleh ahli sunnah dengan dasar-dasar hukum Al Quran dan Hadist. Menurut ahli sunnah menggolongkan hak-hak mewaris dari para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan menghabiskan sisa terdiri atas :

1. *Dzawil Furudh*

Dzawil furudh ialah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. *Bagian tertentu* dimaksud bahwa bagian (porsi) yang diterima oleh ahli waris itu telah ditentukan Allah dalam Al Quran dan wajib diserahkan/diterimakan sebagai hak yang dapat dimilikinya.

Dan *dalam keadaan tertentu*, maksudnya kalau ahli waris itu masih hidup saat pewaris meninggal dunia, maka dirinya akan memperoleh bagian dari harta warisan setelah harta peninggalannya dikurangi hak-hak yang didahulukan dan tidak ada penghalang dari ahli waris lainnya. Penggolongan dzawil furudh terdiri atas :

1. Suami,
2. Istri,
3. Anak perempuan,
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus dalam garis lurus kebawah asal ikatan dari laki-laki,
5. Bapak,
6. Kakek dari pihak bapak dan terus dalam garis lurus ke atas,
7. Ibu,
8. Nenek dari pihak bapak,
9. Nenek dari pihak ibu dan terus dalam garis lurus ke atas asal tidak diselang laki-laki,
10. Saudara perempuan seibu seapak
11. Saudara perempuan seapak,
12. Saudara perempuan seibu,

13. Saudara laki-laki seibu.

Dari dzawil furudh ini walaupun dalam satu kelompok, tetapi harta warisan yang yang dihaki tidak merupakan bagian mutlak yang dapat diterima oleh setiap ahli waris melainkan wajib memperhatikan ahli waris lain, kalau menjadi penghalang, berarti tidak akan memperoleh bagian atau ikut bersama-sama dan bagiannya akan menjadi berkurang.

2. *Asabah*

Asabah ialah ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada dzawil furudh dan akan memperoleh sisa kecil dari dzawil furudh kalau masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari dzawil furudh yang tidak ada sisa. Asabah terdiri atas :

- a. *Asabah binafsihi* ialah laki-laki yang mewaris (menjadi asabah) karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek (dalam keadaan tertentu).
- b. *Asabah bilghairi* ialah perempuan yang mewaris (menjadi asabah) karena didampingi oleh asabah binafsihi yang sederajat seperti :
 - Anak perempuan didampingi (bersama-sama) anak laki-laki (saudara kandung).
 - Cucu perempuan dari anak laki-laki didampingi (bersama-sama) cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - Saudara perempuan didampingi (bersama-sama) saudara laki-laki.
- c. *Asabah ma'alghairi* ialah saudara perempuan pewaris yang mewaris (menjadi asabah) bersama-sama keturunan perempuan pewaris dalam garis perempuan seperti :

- Saudara perempuan pewaris bersama-sama anak perempuan pewaris.
- Saudara perempuan pewaris bersama-sama cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris.
- Saudara perempuan pewaris bersama-sama anak perempuan pewaris dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris.

Dilihat dari macam-macam asabah seperti disebutkan diatas, maka yang menjadi pegangan utama bagi asabah binafsihi dalam pembagian harta warisan adalah anak laki-laki. Hal ini terutama selain dapat merubah kedudukan saudara perempuannya dari dzawil furudh menjadi asabah juga bagiannya menjadi kecil. Kalau anak laki-laki bersama-sama anak perempuan mewaris, maka sebagai ahli waris asabah bersama-sama memperoleh semua harta warisan atau sisa sebagai ketentuan yang berlaku. Pembagian antar keduanya, yaitu ntuk laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Pasal hukum pembagian harta warisan anak laki-laki dua kali lebih banyak dari perempuan itu dicantumkan dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 11**.

Contoh : Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Anak perempuan menjadi assabah bilghairi karena bersama-sama saudara laki-lakinya. Harta pusaka (warisan) akan dibagi kepada ahli waris kedua anak itu dengan perbandingan 2 : 1 bagi anak laki-laki dibanding anak perempuan.

Maka pembagiannya adalah :

$$1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ untuk anak laki-laki.}$$

$$1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ untuk anak perempuan.}$$

Asabah yang menghabiskan harta warisan kalau tidak ada dzawil furudh atau semua sisa kalau ada dzawil furudh yang masih memberikan sisa, adalah :

1. Anak laki-laki,
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
3. Bapak,
4. Kakek dari pihak bapak,
5. Saudara laki-laki seibu seapak,
6. Saudara laki-laki seapak,
7. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak,
8. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak,
9. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak dan kemudian yang seapak,
10. Anak laki-laki paman dari pihak bapak,
11. Orang yang membebaskan jenazah.

3. *Dzawil Arham*

Dzawil ahrām ialah ahli waris dalam hubungan nasab (keluarga sedarah) yang tidak termasuk dzawil furudh atau asabah. Keluarga sedarah yang merupakan dzawil ahrām itu dapat :

- Saudara perempuan bapak,
- Saudara perempuan dari kakek, atau
- Keturunan laki-laki dari anak perempuan pewaris yang kawin endogam,
- Keturunan laki-laki dari saudara perempuan pewaris yang kawin endogam.

2.2. *Bagian yang dapat diperoleh dzawil furudh*

Dzawil furudh sebagai kelompok penggolongan ahli waris yang akan menerima bagian tertentu berdasarkan ketentuan bagiannya itu tidak mutlak harus diperuntukkan kepadanya. Hal ini dimaksudkan kalau ada keluarga sedarah yang dapat mengubah

bagian menjadi kecil atau kedudukannya menjadi asabah. Tetapi bagian yang telah ditentukan itu hendaknya dijadikan pedoman, karena ditentukan Allan termasuk perolehan yang menjadi kecil atau menjadi asabah. Dan bagian-bagian yang telah ditentukan itu terdiri atas pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. bagian yang dapat diperoleh dzawil furudh berdasarkan ketentuan itu sebagai berikut :

- a. Yang memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) harta warisan adalah :
 1. Anak perempuan tunggal tanpa mempunyai saudara,
 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak perempuan,
 3. Saudara perempuan tunggal seibu seapak atau seapak saja,
 4. Suami kalau istri yang meninggal dunia tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- b. Yang memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) harta warisan adalah :
 1. Suami kalau istri yang meninggal dunia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Istri baik seorang maupun berbilang (lebih dari seorang) kalau suami tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan dan juga tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal istri berbilang, maka seperempat bagian yang diteriam itu dibagi rata antar istri-istrinya.
- c. Yang memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) harta warisan adalah :

Istri baik seorang maupun berbilang kalau suami yang meninggal dunia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Yang memperoleh dua pertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan adalah :

1. dua orang anak perempuan atau lebih dengan syarat kalau tidak ada saudara laki-laki sebagai ahli waris dari bapaknya yang meninggal dunia.
 2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki yang tidak mempunyai saudara perempuan. Cucu perempuan sebagai ahli waris dari kakek yang meninggal dunia.
 3. Saudara perempuan seibu seapak kalau berbilang.
 4. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seapak kalau saudara perempuan seibu seapak tidak ada.
- e. Yang memperoleh sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan adalah :
1. Ibu kalau yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, cucu dari anak laki-laki, dua orang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu seapak atau seibu.
 2. Dua orang saudara atau lebih yang seibu baik laki-laki maupun perempuan.
- f. Yang memperoleh seperenam ($\frac{1}{6}$) harta warisan adalah :
1. Ibu dari anak yang meninggal dunia kalau bersama-sama anak atau cucu dari anak laki-laki atau bersama-sama dua saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang seibu seapak atau seapak saja atau seibusaaja.
 2. Bapak kalau yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
 3. nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak kalau ibu tidak ada.
 4. Cucu perempuan tunggal atau berbilang kalau bersama-sama anak perempuan. Tetapi cucu perempuan itu tidak memperoleh bagian kalau anak perempuan (bibinya) berbilang.
 5. Kakek dari pihak bapak bersama-sama anak atau cucu dari anak laki-laki kalau bapak tidak ada.

6. seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.
7. saudara perempuan tunggal atau berbilang yang seapak kalau bersama-sama saudara perempuan seibu seapak. Tetapi saudara perempuan seapak tidak memperoleh bagian kalau saudara perempuan seibu seapak berbilang.

2.3. *Ahli waris kakek bersama-sama saudaranya*

Kalau kakek bersama-sama saudara seibu seapak atau saudara seapak saja, maka cara pembagian harta warisan tidak diatur dalam Quran atau Hadist. Karena itu para sahabat dan imam berbeda pendapat dengan alasan yang tidak dapat dipersatukan.

Pendapat Abu baker, Abbas, dan beberapa sahabat lainnya menyatakan bahwa “kakek dianggap seperti bapak, berarti kakek menghalangi saudaranya sehingga saudaranya tidak memperoleh bagian dari harta warisan”. Pendapat ini kemudian digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Pendapat Ali, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Masud menyatakan bahwa ‘Kakek bersama-sama saudaranya memperoleh bagian harta warisan (pusaka)’. Pendapat ini dijalankan oleh Imam Syafi’I, Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Dari pendapat tersebut memberikan suatu gambaran pembagian harta warisan kepada kakek bersama-sama dengan saudaranya dalam dua cara pokok pembagian yang dapat dipakai, yaitu :

a. *Pokok yang pertama*

Kalau ahli waris hanya terdiri dari kakek dan saudaranya saja dan tidak ada ahli waris lain, maka kakek dapat memilih yang lebih menguntungkan satu diantara dua cara pembagian harta warisan itu ialah :

1. Dibagi rata antara kakek dan saudaranya, tetapi kakek dianggap sebagai saudara laki-laki, berarti memperoleh dua kali lebih banyak dari bagian perempuan, atau

2. Mengambil sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta warisan.

Contoh :

1. Dibagi rata antara kakek dan saudaranya

Dibagi rata lebih menguntungkan kakek dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan :

- a. Kakek bersama-sama satu, dua atau tiga saudara perempuan, maka harta warisan :
 1. Dibagi tiga kalau bersama-sama seorang saudara perempuan dengan :
 - Kakek memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan
 - Seorang saudara perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.
 2. Dibagi empat kalau bersama-sama dua orang saudara perempuan dengan :
 - Kakek memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dan
 - Dua orang saudara perempuan memperoleh masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian.
 3. Dibagi lima kalau bersama-sama tiga orang saudara perempuan dengan :
 - Kakek memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dan
 - Tiga orang saudara perempuan memperoleh masing-masing $\frac{1}{5}$ bagian.
- b. Kakek bersama-sama seorang saudara laki-laki, maka harta warisan dibagi dua dengan pembagian :
 - $\frac{1}{2}$ bagian untuk kakek dan
 - $\frac{1}{2}$ bagian untuk seorang saudara laki-laki kakek.
- c. Kakek bersama-sama seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka harta warisan dibagi lima dengan pembagian :
 - Kakek memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian,
 - Seorang saudara laki-laki memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dan

- Seorang saudara perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian.

Dibagi rata dalam sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian yang sama.

- a. Kakek bersama-sama dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan, maka harta warisan dibagi enam dengan :
 - Kakek memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian,
 - Seorang saudara laki-laki memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian dan
 - Dua orang saudara perempuan masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian.

2. Mengambil sepertiga lebih menguntungkan kakek

- a. Kakek bersama-sama tiga orang saudara laki-laki, maka harta warisan kakek dalam pembagian rata-rata akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Tetapi dalam mengambil $\frac{1}{3}$ lebih menguntungkan kakek, maka harta warisan dibagi :
 - Kakek mengambil $\frac{1}{3}$ bagian lebih menguntungkan,
 - Tiga orang saudara laki-laki memperoleh masing-masing $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$ bagian.
- b. Kakek bersama-sama dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka harta warisan kakek dalam pembagian rata-rata akan memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian. Tetapi dalam mengambil $\frac{1}{3}$ lebih menguntungkan kakek, maka harta warisan dibagi :
 - Kakek mengambil $\frac{1}{3}$ bagian lebih menguntungkan,
 - Dua orang saudara laki-laki memperoleh masing-masing $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{4}{15}$ bagian dan
 - Seorang saudara perempuan memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5}$ bagian = $\frac{2}{15}$ bagian.

b. Pokok yang kedua

Kalau ahli waris bukan saja kakek dan saudaranya melainkan bersama-sama ahli waris yang memperoleh bagian tertentu

berdasarkan ketetapan, maka ahli waris itu mengambil lebih dahulu bagiannya. Sisa harta warisan akan dibagi antara kakek dan saudara-saudaranya. Dan dalam membagi harta warisan itu kakek akan memperoleh bagian yang menguntungkan dengan tiga cara pembagian yaitu :

- a. Dibagi rata,
- b. Seperempat lebih menguntungkan atau,
- c. Sepertiga dari sisa lebih baik.

Contoh :

a. Dibagi rata

Kakek bersama-sama nenek dan seorang saudara laki-laki, maka harta warisan dibagi :

- Nenek memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian yang didahulukan,
- Kakek bersama-sama seorang saudara laki-laki masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$ bagian = $\frac{5}{12}$ bagian.

b. Seperempat lebih menguntungkan

Akek bersama-sama istri dan dua orang anak perempuan serta seorang saudara laki-laki kakek, maka harta warisan dibagi :

- Dua orang anak perempuan memperoleh masing-masing $1 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{8}{12}$ bagian,
- Istri memperoleh $1 \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{3}{24}$ bagian,
- Kakek memperoleh seperempat lebih menguntungkan yaitu $1 \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{1}{6}$ bagian = $\frac{4}{24}$ bagian dan
- Saudara laki-laki kakek memperoleh $1 - (\frac{8}{24} + \frac{8}{24} + \frac{3}{24} + \frac{4}{24})$ bagian = $\frac{1}{24}$ bagian.

c. Sepertiga dari sisa lebih baik

Kakek bersama-sama nenek dan lima orang saudara laki-laki kakek, maka harta warisan dibagi :

- Nenek memperoleh $1 \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{1}{6}$ bagian,
- Kakek memperoleh sepertiga dari sisa lebih baik = $(1 - \frac{1}{6}) \times \frac{1}{3}$ bagian = $\frac{5}{18}$ bagian dan
- Lima orang saudara laki-laki masing-masing memperoleh = $(1 - \frac{1}{6} - \frac{5}{18}) \times \frac{1}{5}$ bagian = $\frac{1}{9}$ bagian.

2.4. Keadaan terhalang tidak memperoleh harta warisan

Setiap orang yang termasuk dalam kelompok pria dan kelompok wanita adalah ahli waris. Tetapi pengertian ahli waris di sini tidak mutlak memperoleh bagian harta warisan melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maksudnya apakah ahli waris itu termasuk dzawil furudh, asabah atau dzawil arham telah ada ketentuannya dan kemudian dengan urutan itu mereka memperoleh sisa kalau masih ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan pertalian terdekat kepada pewaris akan memperoleh bagian harta warisan lebih dahulu dan kemudian hubungan pertalian yang agak jauh atau lebih jauh akan memperoleh bagian atau tidak karena terhalang ahli waris yang mempunyai hubungan pertalian terdekat kepada pewaris. Ahli waris yang terhalang dan tidak akan memperoleh bagian harta warisan adalah :

1. Nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak dan atau kakek
Nenek akan terhalang keadaannya kalau masih ada ibu dari pewaris dan tidak memperoleh bagian harta warisan. Selama ibu masih ada berarti kedudukan lebih dekat daripada nenek kepada pewaris. Demikian juga keadaan kakek selama masih ada bapak pewaris keadaannya terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan.
2. Saudara seibu akan terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau masih ada :
 - a. Anak baik laki-laki maupun perempuan,

- b. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki,
- c. Bapak,
- d. Kakek.

Keempat orang ini hubungan darah dengan pewaris lebih dekat dibanding saudara seibu kepada pewaris. Karena itu saudara seibu selam masih ada keempat orang itu tidak akan memperoleh bagian harta warisan. Ketentuan yang mengatur tentang pewarisan saudara seibu dicantumkan dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 12** menyatakan bahwa “Saudara seibu memperoleh pusaka kalau yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau bapak”.

Dengan demikian berarti bahwa kalau ada anak atau bapak, maka saudara seibu tidak akan memperoleh bagian harta warisan. Sedangkan bagi kakek hukumnya disamakan dengan bapak, cucu dari anak laki-laki sama dengan anak laki-laki.

3. Saudara seapak akan terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau ada salah satu dari empat orang ahli waris :
 - a. Bapak,
 - b. Anak laki-laki,
 - c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - d. Saudara laki-laki seibu seapak.
4. Saudara seibu seapak terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau ada salah satu dari ketiga ahli waris :
 - a. Anak laki-laki,
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - c. Bapak.

Contoh :

Kalau A meninggal dunia meninggalkan harta warisan, empat orang ahliwaris terdiri dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki, bapak dan cucu laki-lakidari anak laki-laki.

Pembagian harta warisannya :

- Saudara laki-laki seibu seapak tidak memperoleh bagian harta warisan, karena terhalang oleh anak laki-laki dan bapak,
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak memperoleh bagian harta warisan, karena terhalang oleh anak laki-laki.

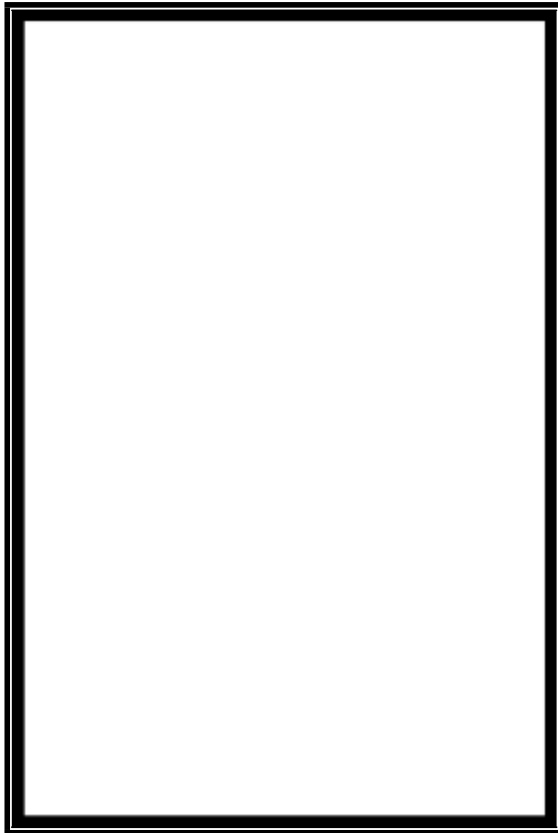
Jadi yang memperoleh bagian harta warisannya adalah bapak dan anak laki-laki dengan bagian masing-masing :

- Bapak memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dan
- Anak laki-laki menghabiskan sisa berarti memperoleh $\frac{5}{6}$ bagian.

Keadaan terhalang bagi pihak wanita, karena saudara laki-lakinya yang terjadi dalam garis ke samping, ke atas dan ke bawah pada tingkat laki-laki sebagai berikut :

1. Saudara laki-laki dari pihak bapak memperoleh bagian harta warisan, tetapi saudara perempuannya tidak memperoleh bagian harta warisan.
2. Anak laki-laki dari saudara laki-laki pihak bapak (saudara laki-laki sepupu anak paman dari pihak bapak) memperoleh bagian harta warisan, tetapi saudara perempuannya tidak memperoleh bagian harta warisan.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) memperoleh bagian harta warisan, tetapi saudara perempuannya tidak memperoleh bagian harta warisan.

Untuk mengetahui ahli waris yang mempunyai bagian harta warisan, ahli waris yang memperoleh bagian lebih kecil dari bagian yang ditentukan karena keadaan bersama dan ahli waris yang tidak memperoleh bagian karena terhalang, maka dapat dilihat dari skema tentang pembagian harta warisan dibawah ini.



Ahli waris pria (angka arab) :

1. Anak laki-laki,
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
3. Bapak,
4. Kakek dari pihak bapak,
5. Saudara laki-laki seibu seabapak,
6. Saudara laki-laki seabapak,
7. Saudara laki-laki seibu,
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seabapak,
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seabapak,
10. Saudara laki-laki dari bapak (paman) seibu seabapak,

11. Saudara laki-laki dari bapak (paman) sebak,
12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sebak,
13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sebak,
14. Suami,
15. Laki-laki yang memerdekakan jenazah.

Ahli waris wanita (angka romawi) :

- I. Anak perempuan,
- II. Cucu perempuan dari anak laki-laki,
- III. Ibu,
- IV. Nenek dari pihak bapak,
- V. Nenek dari pihak ibu,
- VI. Saudara perempuan sebak sebak,
- VII. Saudara perempuan sebak,
- VIII. Saudara perempuan sebak,
- IX. Istri,
- X. Perempuan yang memerdekakan jenazah.

Catatan :

1. Kalau terjadi pembagian harta warisan dengan jumlah ketentuan lebih banyak dari harta warisannya, maka harus dihitung/dibagi menurut *jumlah pembilang* setelah terdapat *ganda persekutuan yang terkecil*.
2. ABG perempuan karena tarikan saudara laki-lakinya.
3. AMG karena bersama-sama orang lain derajat.

2.5. Cara menghitung bagian harta warisan

Diatas lebih dikemukakan tentang ahli waris yang menghabiskan bagian harta warisan berdasarkan ketentuan, ahli waris yang menghabiskan sisa, ahli waris kakek bersama-sama saudara dan ahli waris dalam keadaan terhalang yang tidak memperoleh bagian harta warisan.

Bagi ahli waris yang menghabiskan semua harta warisan atau semua sisa, ketentuan bagiannya terdiri atas $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. dari bagian-bagian ketentuan ini menurut ilmu berhitung (matematika) angka di atas dinamakan pembilang dan angka dibawah dinamakan penyebut.

Contoh : $\frac{1}{2}$ angka satu dinamakan pembilang dan angka 2 dinamakan penyebut.

Kalau ada angka pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ berarti penyebutkan 2-3-6-8, maka empat angka penyebut ini perkalian yang dapat membagi adalah 24 dan dinamakan “ganda persekutuan terkecil”. Dengan mengetahui angka sebagai ganda persekutuan terkecil ini akan dapat diketahui secara benar bagian-bagian harta warisan yang diperoleh ahli waris itu kalau ada anggota keluarganya meninggal dunia. Adapun ketentuan cara menghitung bagian harta warisan itu sebagai berikut :

1. Kalau ahli waris terdiri dari anak laki-laki yang hanya dapat menghabiskan harta warisan saja, maka harta warisan dibagi rata. Dan kalau ada anak perempuannya, maka bagian anak laki-laki selalu dua kali bagian anak perempuan.

Contoh : A meninggal dunia meninggal ahli waris dua anak laki-laki. Masing-masing anak akan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Kalau ahli warisnya terdiri atas seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka untuk anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.

2. Kalau ahli waris hanya seorang dan memperoleh bagian berdasarkan ketentuan, maka bagiannya hanya sebanyak yang ditentukan untuk pembagian pertama.

Contoh : A meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu, maka bagian harta warisnya hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Sisanya

yang $\frac{2}{3}$ bagian diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain.

3. Kalau ahli waris yang memperoleh bagian berdasarkan ketentuan dua orang atau lebih, hendaknya dilihat angka penyebut dari setiap bagian tertentu ahli waris. Dalam keadaan penyebutnya sama, maka masing-masing ahli waris akan memperoleh bagian sama banyak.

Contoh : Ahli waris saudara perempuan tunggal yang seibu seapak dan anak perempuan tunggal. Masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sama banyaknya.

Tetapi kalau penyebutnya tidak sama hendaknya disamakan dahulu dengan menggunakan ganda persekutuan terkecil dari beberapa penyebut itu.

Contoh :

- a. Ahli waris terdiri dari ibu dan dua orang saudara laki-laki seibu. Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dan 2 orang saudara laki-laki seibu memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Ganda persekutuan terkecil dari 6 dan 3 adalah 6. Cara pembagian harta warisannya.

$1 \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{1}{6}$ bagian untuk ibu,

$1 \times \frac{2}{6}$ bagian = $\frac{2}{6}$ bagian untuk dua orang saudara laki-laki seibu, dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{2}{6}$ bagian = $\frac{1}{6}$ bagian.

- b. Ahli waris terdiri dari ibu, istri dan seorang anak laki-laki. Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, istri memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dan seorang anak laki-laki memperoleh semua sisa.. ganda persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24. Cara pembagian harta warisannya adalah :

$1 \times \frac{4}{24}$ bagian = $\frac{4}{24}$ bagian untuk ibu,

$1 \times \frac{3}{24}$ bagian = $\frac{3}{24}$ bagian untuk istri,

$1 - (4/24 + 3/24)$ bagian = $17/24$ bagian untuk seorang anak laki-laki.

- c. Ahli waris terdiri dari ibu dan istri, ibu memperoleh $1/3$ bagian dan istri memperoleh $1/4$ bagian. Ganda persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Cara pembagian harta warisannya adalah :

$1 \times 4/12$ bagian = $4/12$ bagian untuk ibu,

$1 \times 3/12$ bagian = $3/12$ bagian untuk istri

$1 - (4/12 + 3/12)$ again = $5/12$ bagian sisa harus diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain.

Dalam hal seluruh ahli waris memperoleh bagian harta warisan berdasarkan ketentuan lebih besar dari kesatuan harta warisannya, maka dinamakan 'AULU', artinya jumlah bagian lebih banyak dari satu kesatuan. Berarti bahwa jumlah pembilang lebih banyak dari penyebut dalam ganda persekutuan terkecil.

Contoh :

- a. Ahli waris terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan seibu seapak. Suami memperoleh $1/2$ bagian dan dua orang saudara perempuan seibu seapak memperoleh $2/3$ bagian. Ganda persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Berarti masing-masing memperoleh $3/6$ bagian untuk suami dan $4/6$ bagian untuk dua orang saudara perempuan seibu seapak, dengan jumlah pembilang 7 yang lebih besar dari penyebut 6. Kalau terjadi masalah seperti ini, maka harta warisan dibagi tujuh bagian dengan pembagi untuk suami 3 bagian dan untuk dua orang saudara perempuan seibu seapak 4 bagian.
- b. Ahli waris terdiri atas istri, ibu dua orang saudara perempuan seibu seapak dan seorang saudara laki-laki seibu. Pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan ialah:

Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian, dua orang saudara perempuan seibu sebak memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, seorang saudara laki-laki seibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Ganda persekutuan terkecil dari 4-6-3 adalah 12, maka jumlah bagian-bagian yang diperolehnya $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{8}{12} + \frac{2}{12} = \frac{15}{12}$. berarti perbandingan adalah pembilang yang berjumlah 15 dan harta warisan harus dibagi 15 bagian. Masing-masing ahli waris akan memperoleh:

3 bagian untuk istri,

2 bagian untuk ibu,

8 bagian untuk dua orang saudara perempuan seibu sebak dan tiap orang memperoleh 4 bagian,

2 bagian untuk saudara laki-laki seibu.

2.6. *Pembagian sisa harta warisan*

Kalau ahli waris dari seorang yang meninggal dunia hanya terdiri atas yang memperoleh bagian berdasarkan ketentuan dan setelah dibagi masih ada sisa, maka sisa harta warisan itu dibagi lagi kepada ahli waris tersebut. Pembagian kembali sisa harta warisan itu berdasarkan bagian dari ketentuan semula dengan syarat suami atau istri tidak berhak memperoleh bagian lagi.

Untuk pembagian sisa harta warisan sebenarnya mempunyai beberapa ketentuan sebagai pegangan supaya dapat dilakukan pembagian yang seadil-adilnya. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

1. kalau yang memperoleh bagian sisa harta warisan hanya seorang saja, maka ahli waris itu akan memperoleh semua sisa. Misalnya : Ahli waris hanya ibu, maka memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian berdasarkan ketentuan dan sisa $\frac{2}{3}$ bagian akan diperoleh ibu sebagai pembagian kembali dari sisa.

2. Kalau yang memperoleh bagian kembali dari sisa itu lebih dari seorang dan tingkat mereka sama, maka harta warisan dibagi rata baik dalam menggunakan ketentuan maupun bagian kembali dari harta warisan sisa.

Ahli waris 3 orang saudara laki-laki seibu, maka mereka akan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan. Dan sisa $\frac{2}{3}$ bagian dibagi rata di antara mereka berarti masing-masing akan memperoleh : $(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3})$ bagian + $(\frac{2}{3} \times \frac{1}{3})$ bagian = $\frac{3}{9}$ bagian atau $\frac{1}{3}$ bagian.

3. Kalau yang memperoleh bagian kembali dari sisa itu lebih dari seorang dan tingkat mereka tidak sama, maka pembagian sisa harta warisan diambil dari jumlah mereka masing-masing. Dan jumlah itu dijadikan “penyebut” sedangkan perbedaan bagian masing-masing dijadikan “pembilang”.

Ahli waris seorang anak perempuan dan ibu. Anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Ganda pereeutuan terkecil dari 2 dan 6 adalah 6. Cara pembagiannya adalah :

$1 \times \frac{3}{6}$ bagian = $\frac{3}{6}$ bagian untuk seorang anak perempuan, $1 \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{1}{6}$ bagian untuk ibu, berarti penyebut 3 dan 1 berjumlah 4, maka pembagian kembali dari sisa $\frac{2}{6}$ bagian itu adalah :

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{6}$ bagian = $\frac{6}{24}$ bagian untuk seorang anak perempuan, $\frac{1}{4} \times \frac{2}{6}$ bagian = $\frac{2}{24}$ bagian untuk ibu. Jadi masing-masing akan memperoleh :

$\frac{1}{2}$ bagian + $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{3}{4}$ bagian untuk seorang anak perempuan,

$\frac{1}{6}$ bagian + $\frac{1}{12}$ bagian = $\frac{3}{12}$ bagian atau $\frac{1}{4}$ bagian untuk ibu.

3. Harta Warisan Rahim

Dalam pewarisan huku Islam ahli waris yang memperoleh bagian belum tentu dapat membagi habis harta warisan sesuai ketentuan, sebab kadang-kadang ahli ahli waris memperoleh bagian hanya sedikit jumlahnya. Dan walaupun sisa harta warisan masih dapat dibagi kembali sesuai besarnya bagian yang ditentukan, tetapi bagi istri atau suami tidak berhak memperoleh bagian lagi kecuali sebanyak bagian yang telah ditentukan. Kalau di dalam suatu keluarga ahli waris hanya seorang suami atau istri dan tidak ada ahli waris lainnya yang termasuk dalam kelompok ahli waris pria dan wanita, maka dalam pembagian harta warisan hanya terbatas pada besarnya bagian menurut ketentuan. Sedangkan sisa tidak boleh diambil sebagai pembagian kembali dari sisa harta warisan.

Sisa harta warisan itu menjadi harta warisan (pusaka) rahim. Yang dimaksud dengan "*rahim*" ialah sanak keluarga yang tidak mewaris seperti ahli waris sebagaimana telah ditentukan. Dari rumusan ini dimaksudkan bahwa walaupun masih termasuk dalam satu garis keluarga besar (famili), tetapi tidak termasuk dalam kelompok ahliwaris pria atau wanita. Tetapi rahim akan memperoleh bagian harta warisan kalau dari suatu peristiwa kematian suami atau istri kedua-duanya tidak mempunyai sanak keluarga sebagai ahli waris sesuai kelompok yang ditentukan.

Adapun pembagian harta warisan rahim mempunyai beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Kalau rahim hanya seorang, maka semua harta warisan atau sisa harta warisan, setelah dikurangi bagian tertentu sebagai bagian suami atau istri, akan menjadi bagiannya.
2. Kalau rahim lebih dari seorang, maka ada dua pendapat dalam pembagian harta warisan itu ialah :

Setiap rahim ditempatkan kepada asal tempat keturunannya dan akan memperoleh bagian tanpa melihat hubungan ikatan yang lebih jauh dari pewaris, kecuali :

- a. Saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu yang ditempatkan kepada garis ibu dan bukan garis kakek.
- b. Saudara laki-laki dari bapak yang seibu, saudara perempuan dari bapak yang seibu seebapak dan anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, kesemuanya itu ditempatkan kepada garis bapak dan bukan garis kakek.

Contoh : Anak perempuan dari cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai rahim akan menerima bagian harta warisan lebih dahulu walaupun lebih dekat pertalian cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan.

Pertalian garis keturunan rahim yang lebih dekat kepada pewaris hendaknya didahulukan.

Contoh : Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan sebagai rahim akan menerima bagian harta warisan lebih dahulu daripada anak perempuan dari cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Kalau semua ahli waris rahim tidak ada, maka harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia akan diterimakan kepada Baitulmal, kalau ada, dan yang menjalankan organisasinya dengan teratur, maka harta warisan di serahkan kepada orang Islam yang pandai, bijaksana, cakap, dan adil supaya membagikan kepada orang-orang miskin dan juga untuk keperluan umum.

BAB VI

MUAMALAT

1. Pengertian Muamalat

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai “tingkah laku”. dan tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Di dalam kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain.

Dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia akan selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain, dan tidak dapat dihindarkan dalam kontakannya akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Allah menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama manusia. Dan hubungan itu dimaksudkan agar dalam hidup akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir dan batin. Tetapi dari minat dan niat yang dimiliki manusia mungkin dalam melaksanakan kegiatan dilakukan untuk kepentingan sendiri walaupun perwujudan kegiatannya dilaksanakan melalui kontak sosial.

Kalau kepentingan pribadi sudah dominant menguasai manusia, maka akan jarang mengingat kedholiman dan haram seperti yang tercantum dalam perintah agama. Dalam pergaulan

sering terlihat penyimpangan tingkah laku yang merugikan orang lain, tetapi menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya saja. Dan untuk menghindarkan penyimpangan tingkah laku yang menyangkut kehidupan sesama manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan sekaligus menanamkan kesadaran rohaninya, maka ada peraturan baik dan membatasi tingkah laku tersebut yang dinamakan “muamalat”. Dan muamalat ini ketentuannya mengatur mengenai hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup agar penyimpangan tingkah laku akan dapat dibatasi. Karena selain bertujuan menjamin kehidupan manusia sebaik-baiknya juga tidak akan menjadi konflik batin atau rasa tidak adil diperlakukan oleh manusia lain. Peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dinamakan muamalat itu mengatur bidang **tukar menukar benda dan sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara tertentu**. Kedua bidang kegiatan dari peraturan yang dimaksud antara lain berkenaan dengan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, pemberian/wakaf dan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia.

Pengaturan dari setiap bidang muamalat mempunyai sasaran tertentu yaitu agar manusia tidak melakukan tindak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam suasana damai. Artinya manusia itu melaksanakan sebagai seorang muslim dalam mengadakan perdamaian antar sesama manusia. Karena itu Haji Sulaiman Rasyid dalam bukunya mensitir nasihat Lukmanul Hakim kepada anaknya yang mengatakan hai anakku, berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal tidaklah dia akan mendapat kemiskinan kecuali apabila dia telah dihindangi tiga macam penyakit :1) tipis kepercayaan agamanya,

2) lemah akalnya, 3) hilang kesopanannya. Nasihat ini mengandung makna yang sangat dalam, karena menggugah keyakinan manusia dalam beragama dan menggunakan akalnya dengan baik untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain. Dan dilihat dari proses kodrat manusia itu sendiri sebenarnya manusia dalam melaksanakan kodratnya hidupnya dan mengadakan hubungan dengan manusia lain supaya dijalankan dengan baik penuh kejujuran yang dikehendaki Allah. Dengan jalan itu tidak akan menjadi kesesatan dan berdosa kecuali tiga faktor dominan yang menguasai diri seseorang dan sulit berubah, yaitu :

1. Tipis kepercayaan agamanya.

Bagi seorang yang mengaku beragama tetapi tidak memiliki dasar-dasar keyakinan kuat dan melaksanakannya.

Selain dirinya kurang mengetahui aturan dan perintah agama juga kurang memahami apa yang dimaksud dengan “berdamai antar manusia sesamanya”. Karena itu segala kegiatan yang dilakukan mengarah kepada kepentingan duniawi pribadi.

2. Lemah akal.

Orang sakit mental atau sakit ingatan tidak mungkin dapat menggunakan akalnya dengan baik. Dikatakan sakit mental kalau tingkah lakunya sering menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku walaupun kadang-kadang dijalankan dengan penuh kesadaran. Untuk menyatakan tingkah laku menyimpang harus diketahui lebih dahulu latar belakang perkembangan hidupnya. Pada umumnya penyimpangan terjadi disebabkan dari kebutuhan pokok sejak masa anak-anak tidak memperoleh pemenuhan.

Sedangkan bagi orang yang sakit ingatan adanya penyimpangan tingkah laku dari norma-norma sosial dijalankan tanpa dapat dirasakan sebagai kesadarannya. Pada umumnya sakit ingatan hanya dapat dilihat dari pengetahuan medis yang kemungkinan disebabkan adanya pengerutan/penyumbatan syaraf otak tertentu, sehingga tidak dapat memberikan respon baik dari stimulus yang diterima. Tindakan-tindakannya sering menyimpang dan dinilai tidak normal, karena di bawah kesadaran akal.

3. Hilangnya kesopanan.

Seseorang yang tidak dapat mengendalikan penyesuaian diri dengan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam lingkungan sering menghalalkan diri dalam kegiatannya. Penyimpangan tingkah laku lebih menonjol dalam kegiatan yang tidak pernah memperhatikan norma kesopanan. Penonjolan itu terlihat dari tindakan kepentingan diri sebagai hal yang benar tanpa sopan santun.

Dari ketiga faktor ini hendaknya dihindarkan dalam melaksanakan kegiatan hubungan antar manusia, karena berarti dirinya termasuk manusia yang “sakit” manusia yang sakit cenderung bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam muamalat.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan muamalat kiranya tidak berlebihan kalau diurai lanjut.

2. Jual Beli

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual beli, ialah menukar suatu barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Rumusan ini mempunyai unsur-unsur pengertian tentang jual beli sebagai berikut :

- a. Menukar suatu barang dengan barang lain.

Artinya hubungan hukum akan terjadi antar manusia kalau masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu obyek tertentu. Kepentingan memenuhi kebutuhan itu diwujudkan dalam menukar barang (benda) yang dimiliki dengan benda lain milik seseorang. Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua. Sedangkan pihak kedua menerima pelepasan hak milik untuk dimilikinya dan melepaskan hak miliknya untuk diserahkan kepada pihak pertama.

Dilihat dari proses ini menunjukkan adanya sifat pengalihan benda yang dimiliki secara timbale balik yang lazim dinamakan “tukar menukar”.

- b. Dilakukan melalui cara tertentu.

Maksudnya dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar-menawar sampai terjadi aqad (perikatan) karena kata sepakat. Akan terjadi aqad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsensus para pihak, karena dianggap sesuai. Dan kesesuaian itu berkenaan dengan barang (benda) sebagai obyek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan.

Dengan aqad itu para pihak mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan kegiatan lain sebagai tindakan hukum yang telah disepakati. Dilihat dari kegiatan tawar menawar yang berakhir dengan adanya aqad, maka terjadilah suatu ikatan hukum.

Dari kedua unsur ini menunjukkan bahwa proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi dengan dicapainya lebih dahulu suatu aqad.

Dan proses itulah timbul istilah jual beli yang dalam hubungan antar manusia secara luas dinamakan juga perdagangan. Terlihat di sini bahwa pengertian jual beli merupakan tukar menukar barang baik barang dengan barang maupun barang dengan uang (yang diartikan sebagai barang). Karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan tanpa kebathilan.

Untuk mengatasi supaya jangan sampai terjadi kecurangan dan kebathilan dalam proses jual beli diatur rukun-rukunnya yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut.

2.1. Rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli

Surah (4) An-Nisa ayat 29 menyatakan “Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan bathil kecuali atas jalan perdagangan dengan ridho diri kamu”.

Dari firman Allah ini jelas bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan membeli atau menerima pembelian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturlah syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli sebagai berikut :

Penjual dan pembeli

- a. Antara penjual dan pembeli keduanya berakal. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar-menukar sebagai penjual dan pembeli hendaknya memiliki pikiran sehat. Dengan berpikiran sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan-penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan

secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka perikatannya tidak sah.

b. Atas kehendak sendiri

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam art ‘suka sama suka’ untuk melakukannya. Maksudnya, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubazir)

Artinya para pihak dapat menjaga hak miliknya ssebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi orang yang masih di bawah perwalian, seperti anak di bawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada ditangan walinya. Karenaitu firman Allah menegaskan dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 5** yang menyatakan “Janganlah kamu berikan mereka yang tidak beres pikirannya harta-harta kamu yang telah Allah jadikan pokok penghidupan bagi kamu, tetapi berikan mereka makan, pakaian dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

d. Dewasa dalam arti baliq

Maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seorang yang belum mencapai usia itu tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil. Dan

barang-barang yang mempunyai nilai kecil itu berkenaan dengan kebiasaan sehari-hari dalam pergaulan hidup, seperti membeli bumbu masak di warung, alat tulis menulis keperluan sekolah, menjual es dan lainnya.

Pengecualian ini dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dengan alasan kalau terjadi pembatalan jual beli barang yang mempunyai nilai kecil akan banyak menimbulkan kesulitan. Sedangkan dalam ajaran agama Islam sama sekali tidak mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

2.1.1. Benda yang dijual-belikan

- a. Benda sebagai obyek jual beli harus suci dan tidak najis, artinya setiap benda yang menurut perintah agama dan kebersihannya tidak ada akan termasuk benda haram dan atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan, tidak boleh diuangkan sebagai obyek jual beli. Larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat materialistis manusia bahwa bagi setiap benda dapat dijual belikan. Tetapi benda yang diharamkan dan dinajiskan kalau bagi seseorang sangat diperlukan, karena ada kegunaannya, seperti untuk pengobatan, pemupukan tanaman dan lain-lain, sedangkan bagi pemilik tidak berguna bahkan harus dibuang, maka benda itu dapat diberikan tanpa tukaran kepada orang yang membutuhkannya. Untuk hal ini hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim menjelaskan sebagai berikut : “Berkata Rasulullah : Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak dan bangkai, ya Rasulullah, sebab lemak itu berguna untuk cat perahu, pelumas kulit dan minyak lampu?”.

Jawab Rasulullah : “Tidak boleh, semua itu haram, maka celakalah orang Yahudi ketika Allah mengharamkan untuk bangkai, mereka masak lemak itu menjadi minyak kemudian dijual dan mereka makan uangnya”.

Dari hadits ini dimaksudkan bahwa termasuk juga hewan yang diharamkan kalau sudah mati, maka bagian-bagiannya yang sudah berubah bentuknya pun tidak boleh dijual belikan.

- b. Benda sebagai obyek jual beli mempunyai kegunaan.

Maksudnya setiap benda yang akan dijual belikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk dijual belikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang menyia-nyiakan harta yang dilarang Allah. Dan menyia-nyiakan harta yang dilarang itu merupakan perbuatan yang tidak ada gunanya bahkan dapat dikatakan sebagai penyimpangan tingkah laku. Suatu kegiatan dikatakan sebagai penyimpangan tingkah laku kalau tindakan itu merugikan orang lain. Misalnya : menjual/menukar barang-barang bekas atau rusak yang tidak dapat digunakan lagi.

- c. Bendanya harus dalam keadaan nyata (konkrit).

Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus benar-benar dapat diserahkan sesaat setelah terjadi aqad. Pemikiran ini sebagai bentuk nyata dari sifat awal jual beli yang merupakan tukar menukar. Tanpa ada bendanya yang dapat diserahkan tidak sah jual belinya. Misalnya :

- Menjual ikan laut,

- Menjual buah-buahan dikebun yang pohonnya sedang berbunga,
 - Menjual benda jaminan dan sebagainya.
- d. Benda ada dalam keadaan pemilikan seseorang.
Artinya benda sebagai obyek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seorang tertentu untuk dijualkan. Tidak sah jual belinya kalau penjual bukan pemilik atau bukan kuasa pemiliknya.
- e. Keberadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli.
Yang dimaksud dengan keberadaan barangnya diketahui oleh kedua belah pihak (penjual-pembeli), yaitu sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini sangat perlu untuk menghindarkan timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan, misalnya dari aqad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian pihak pembeli atau cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

2.1.2. Ijab dan qabul

Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual-pembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata seepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum pemindahan hak milik dilakukan dan disebut “*ijab qabul*”. Ucapan *ijab dan qabul* itu sebagai tanda “jadi” jual beli barang. Jadi, pernyataan *ijab dan qabul* sebagai akhir proses tawar-menawar yang merupakan kata sepakat dalam bentuk ucapan. Karena itu dalam suatu peristiwa hukum jual beli akan terjadi perikatan kalau ada *ijab* dari penjual dan

qabul dari pembeli untuk menyatakan terjadinya aqad (perikatan).

Ijab merupakan perkataan penjual yang menunjukkan tanda “jadi” menjual barangnya dengan harga tertentu melalui pernyataan, seperti “saya jual barang ini seharga sekian”. Sedangkan qabul merupakan perkataan pembeli sebagai tanda ‘jadi’ membeli barang dengan harga tertentu melalui pernyataan, seperti “saya terima (saya beli) dengan harga sekian itu”.

Ucapan ijab dan qabul ini menurut beberapa ulama besar hukum Islam seperti Syafi’I harus tetap ada dan langsung. Artinya antara ijab dan qabul sebagai pernyataan dan dilanjutkan dengan serah terima barang tidak boleh ada tenggang waktu yang lama atau dalam peristiwa jual beli itu tidak boleh ada peristiwa hukum lain sebelumnya.

Yang dimaksud dengan peristiwa hukum lainnya sebelum terjadi peristiwa jual beli itu antara lain :

- a. Syarat tangguh : misalnya saya jual rumah ini kepada saudara setelah menikmati setahun lagi.
- b. Menggunakan syarat hukum lain dalam hubungan hukum tertentu : misalnya saya jual buku ini seharga sekian setelah saya lulus ujian dari mata kuliahnya.

Tetapi menurut pendapat para ulama hukum Islam lainnya seperti Nawawi, Mutawali dan Baghawi berpendapat bahwa lafaz ijab dan qabul dengan bentuk kalimat (ucapan) tidak harus dilakukan. Yang penting dalam jual beli itu sudah cukup kalau dimengerti oleh adapt dan istiadat dan kebiasaan setempat. Alasannya, seetiap daerah mempunyai cara jual beli yang sudah dipahami sebagai hukum dan berlaku terus-menerus. Sekian itu tanpa ucapan pernyataan sebagai ijab dan

qabul akan terjadi peristiwa hukum jual beli kalau sudah ada penyerahan barang masing-masing pihak seperti yang terjadi di tempat penjualan umum (pasar atau took). Sedangkan tulisan yang berisi pernyataan dan penyerahan seperti akte atau saksi-saksi sudah meupakan ijab dan qabul dalam jual beli.

Pendapat para ulama hukum Islam terakhir ini menggunakan qiyas dan menunjukkan keluwesan yang dapat dilaksanakan aturannya sesuai hukum setempat dseperti yang banyak dilakukan sekarang di Indonesia.

Dari syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli yang tertera diatas ini kalau tidak dipenuhi atau kurang, maka tidak sah jual belinya. Dan sebagai contoh bahwa suatu jual beli tidak sah, karena kurang syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya sebagai berikut :

Contoh 1. Mengawinkan hewan betina dan jantan dalam sekali campur dengan harga tertentu, berarti menjual sperma hewan jantan. Cara ini tidak sah, tidak layak dan tidak terjadi penyerahan. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai menyebutkan “Sesungguhnya Rasulullah telah melarang menjual air jantan”.

Kalau tidak memiliki hewan jantan sendiri menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali dapat dilakukan dengan jalan meminjam dalam waktu tertentu, bahkan cara ini justru dianjurkan.

Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban menyatakan ‘Telah berkata Rasulullah “Barang siapa mencampur hewan jantan dengan betina kemudian dengan percampuran itu beranak adalah baginya ganjaran tujuh puluh hewan”.

Contoh 2. Menjual barang yang baru dibeli dan belum diterima tidak sah. Alasannya hak miliknya belum sempurna.

Dalam hukum jual beli suatu barang yang baru dibeli dan belum diterima, maka barang itu masih berada dalam tanggung jawab penjual. Kalau barang itu rusak atau hilang sebelum dipindahtangankan, maka penjual harus mengganti.

Dari hukum jual beli ini jelas bahwa barang yang dibeli oleh seseorang dan belum diterimakan hak miliknya, berarti pemilikan barang itu belum sempurna. Jadi dalam suasana itu belum dapat dipindahtangankan dengan jalan jual beli (membuka perikatan) baru.

Hadits nabi diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi menyatakan “Janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima”.

Contoh 3. Menjual buah-buahan dengan cara ijon tidak sah jual belinya.

Dalam hal ini pembeli akan dirugikan, karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panenkemungkinan akan banyak yang rusak di pohon, sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya.

Kesamaan pendapat ahli hadits terhadap larangan ini atas ucapan “Rasulullah telah melarang menjual buah-buahansampai pantas ambil”.

2.2. Jual beli yang sah tetapi dilarang melakukannya

Rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli kalau dipenuhi akan menimbulkan peristiwa hukum jual beli dalam pelaksanaannya. Dan jual beli menurut hukum Islam bersifat terbuka, artinya siapapun boleh melakukan asalkan rukun-

rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi. Tetapi sifat terbuka dalam jual beli itu tergantung dari cara yang digunakan. Cara yang menimbulkan persaingan antar pihak karena kepentingan tidak diizinkan, sebab dengan cara itu tidak menimbulkan pemerataan pendapat antar para penjual.

Suatu cara yang digunakan tetapi tidak diizinkan itulah akan menjadi cermin perbandingan dalam kehidupan dunia perdagangan dewasa ini, sehingga sering menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dan yang menjadi sebab timbulnya larangan itu antara lain :

- a. Menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli.

Dalam peristiwa hukum jual beli sering dijumpai banyak cara yang digunakan oleh orang khususnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dari banyak cara itu ada yang dilarang untuk dijalankannya kalau menimbulkan perlakuan tidak adil bagi pihak-pihak yang membutuhkan barang atau orang lain yang mengetahuinya. Salah satu cara yang sering menimbulkan perlakuan tidak adil dalam jual beli yang tidak dapat ditawarkan lagi dan kalau dilakukan kemungkinan menimbulkan umpatan-umpatan. Dan tentunya tidak dapat dihindarkan akan terjadi konflik.

- b. Menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat.

Hal ini berkenaan dengan kegiatan tingkah laku dalam jual beli yang menimbulkan naiknya harga walaupun barang banyak tersedia di pasaran tertentu atau turunnya harga di tempat tertentu lainnya.

- c. Merusak kehidupan perekonomian masyarakat.

Maksudnya dengan menggunakan spekulasi dagang dan menumpuk barang dengan harapan pada suatu waktu harga menjadi naik akan menimbulkan keterbatasan peredaran barang.

Ketiga faktor ini kalau terjadi mungkin berakibat stabilitas perekonomian terganggu, sehingga akan dapat menimbulkan jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu terjadi. Karena itu suatu kegiatan yang tidak menunjukkan perdamaian antar sesama manusia dalam jual beli tidak dibenarkan.

Selain dari hal-hal tersebut di atas, maka dalam jual beli setiap syarat yang telah dipenuhi kemungkinan dilarang untuk melakukan kalau dalam kegiatan akan jual beli itu:

- Tidak ada kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi membelinya juga supaya orang yang benar-benar membutuhkan tidak dapat membelinya.
- Membeli barang yang sudah dibeli orang lain tetapi masih dalam keadaan khiyar. Khiyar adalah menentukan antara dua pilihan dalam arti meneruskan aqad atau membatalkannya. Selama khiyar kedua belah pihak (penjual-pembeli) hendaknya berada di tempat terjadinya aqad dengan maksud supaya tidak menimbulkan penyesalan setelah terjadi pilihan dikemudian hari.

Ada tiga macam khiyar yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam jual beli, yaitu :

- a. *Khiyar majlis* ialah pembeli dan penjual boleh memilih satu di antara dua hal (jadi atau batal) sebagai kepastian. Khiyar majlis ini berlaku bagi setiap barang apapun dalam jual beli.
- b. *Khiyar syarat* ialah pilihan dijadikan syarat oleh kedua belah pihak ketika aqad. Khiyar syarat ini berlaku bagi setiap barang apapun yang diantar dalam jual beli kecuali barang

yang diterima ditempat penjualan. Masa khyar syarat selamanya tiga hari.

- c. *Khiyar aibi (cacat)* ialah pilihan bahwa pembeli boleh mengebalikan kalau terjadi suatu cacat tersembunyi setelah barang diterima. Pengembaliannya harus segera dilakukan setelah diketahui cacat. Tetapi dalam keadaan barang ini tidak ada lagi, maka pembeli berhak meminta ganti kerugian sebanyak kekurangan harga barang dalam keadaan tanpa cacat.

Kalau cacat barang dibiarkan oleh pembeli, maka dalam hal ini dianggap ada kerelaan pembeli untuk menerimanyasehingga hilanglah hak mengembalikan dan hak meminta ganti kerugian.

- Membeli barang dari penjual pedesaan sebelum sampai ketempat penjualan umum. Alasannya penjual dari pedesaan itu belum mengetahui harga pasar sehingga pembeli dapat merugikan atau mengecewakan dirinya.
- Menimbun barang dengan maksud dapat menjual kembali di kemudian hari dengan harga lebih mahal.
- Menjual barang secara bebas kepada siapapun dan barang itu dapat digunakan untuk berbuat maksiat bagi pembelinya.
- Membuat kecurangan dalam jual beli, misalnya dalam ukuran, timbangan, mutu, bentuk, harga dan lainnya.

Contoh-contoh ini menunjukkan adanya larangan bagi setiaporang yang melakukan jual beli secara tidak wajar dan tidak jujur yang dapat merugikan orang lain. Kegiatan semacam itu tidak menjadi cermin dalam suasana saling tolong-menolong sebagai manusia.

2.3. Pembatalan aqad jual beli dan akibat hukumnya.

Jual beli akan berakhir kalau terjadi serah terima barang secara timbale balik setelah adanya aqad. Tetapi dalam hal ada

aqad jual beli dan tidak ada serah terima barang secara timbale balik atau tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan alasan ‘menyesal untuk membeli atau menjual barang itu’, maka terjadi batal aqadnya. Penyesalan yang dikemukakan oleh salah satu pihak sebelum terjadi serah terima barang dengan pencabutan aqad itu tidak menimbulkan kewajiban lain bagi pihak yang membatalkan untuk memberikan ganti rugi. Dan para pihak hendaknya dapat menerima keadaan pembatalan aqad jual beli itu tanpa ada perasaan dirugikan/ merugikan, karena kerelaan untuk melepaskan barang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

2.4. Hukum-hukum dalam jual beli.

Jual beli walaupun merupakan aqad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakan, dikenakan hukuman agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak itu ialah :

- a. Mubah (boleh) dilakukan bagi setiap orang yang memenuhi syarat.
- b. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib berlaku juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi harat miliknya).
- c. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama.
- d. Sunnat kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah aqad (perikatan) terhadap sesuatu yang telah diketahui mempunyai kegunaan (manfaat) dengan

menggunakan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Rumusan ini mengandung makna bahwa terjadinya suatu peristiwa hukum sewa menyewa apabila suatu benda sebagai obyek dibutuhkan oleh seseorang dalam sementara waktu untuk digunakan dan pemilik barang melepaskan keadaan sementara itu. Tetapi untuk menimbulkan adanya aqad sewa menyewa diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu sebagai ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

3.1. Rukun-rukun dan syarat-syarat sewa menyewa.

Rukun-rukun sebagai sesuatu yang perlu dipenuhi lebih dahulu oleh para pihak sebelum melakukan sewa menyewa akan memberikan rincian syarat untuk mewujudkan minatnya. Adapun rukun dan syarat-syarat sewa menyewa itu sebagai berikut :

3.1.1. Penyewa dan yang menyewakan

Pihak yang berminat untuk menyewa dan pihak yang bersedia menyewakan sesuatu harus memenuhi syarat-syarat sama seperti disyaratkan dalam jual beli, yaitu :

- a. Berakal,
- b. Atas kehendak sendiri (kehendak masing-masing pihak),
- c. Bukan pemboros (mubazir),
- d. Dewasa dalam arti baliq (sedikit-sedikitnya berusia 15 tahun).

3.1.2. Barang yang disewakan

Barang sebagai obyek sewa menyewa harus diketahui oleh penyewa secara nyata tentang jenis, bentuk, jumlah, waktu

sewa, sifat dan cacat-cacatnya. Hal ini dimaksudkan supaya sebelum penyewa menikmati barang itu tidak dibebani perasaan kurang tentram, karena adanya hal-hal yang tidak/kurang jelas ketika terjadi perikatan. Dan selain itu saat mengembalikan barang sewaan tidak terjadi kerugian penyewa yang seolah-olah ditimbulkan olehnya ketika masa sewa berlangsung.

Jadi untuk menghindari beban mengganti kerugian penyewa karena tidak diketahui lebih dahulu barang sewaan, maka kejadian itu harus dihindarkan.

Barang sewaan selain harus diketahui lebih dahulu juga tidak dilarang oleh agama. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa pohon yang menghasilkan dapat dijadikan obyek sewa menyewa, karena tidak dilarang oleh agama. Tetapi menyewa pohon itu hanya untuk diambil buahnya saja. Hal ini disamakan dengan menyewa domba untuk mengambil bulunya.

Kedua peristiwa hukum sewa menyewa (pohon dan domba) ini sebagai qiyas atas firman Allah yang dicantumkan dalam **Surah (65) Al-Thalaq ayat 6**, menyatakan “Kalau perempuan menyusukan anak kamu, maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka”.

3.1.3. Kegunaan (manfaat) barang

Barang yang akan disewakan harus mempunyai kegunaan (manfaat) yang dapat dinikmati oleh penyewa. Karena itu para pihak harus mengetahui bahwa barang yang disewakan mempunyai kegunaan sesuai sifatnya. Ada tiga syarat kegunaan (manfaat) barang sewaan, ialah :

a. Kegunaan yang berharga.

Setiap barang sebagai alat mempunyai sifat dalam kegunaan masing-masing. Pemakai akan dapat menikmati barang itu sesuai sifat kegunaannya. Dan menikmati barang sesuai sifatnya berarti merupakan kegunaan yang berharga.

Tidak dibenarkan dalam sewa menyewa kalau seseorang menyewa suatu barang yang dipakai tidak sesuai sifat kegunaan bendanya. Misalnya menyewa pakaian untuk diletakkan di lemari, sedangkan sifat kegunaan pakaian untuk dipakai. Dan tidak dibenarkan juga kalau digunakan untuk kejahatan, seperti menyewa mobil untuk mencuri, merampok dan sebagainya.

- b. Orang yang menyewakan harus memberitahukan lebih dahulu kegunaan dari barang yang akan disewakan kepada calon penyewa. Pemberitahuan itu dilakukan untuk menghindarkan jangan sampai terjadi kesalahan dalam pemakaiannya. Dan kalau terjadi kesalahan menimbulkan akibat penyewaan yang sia-sia.
- c. Barang yang disewakan harus diketahui batas-batas kegunaannya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi salah paham dari penyewa yang akan dapat menimbulkan konflik, seperti :
 - 1. *Penyewaan jangka waktu*, misalnya menyewa rumah dalam waktu satu tahun, dua tahun dan seterusnya.
 - 2. *Penyewaan dalam daya kerja*, misalnya menyewa mobil yang akan digunakan dari Bandung sampai Jakarta. Kalau daya kerja kurang jelas hendaknya diterangkan dahulu melalui sifat kerjanya yang dapat menghasilkan, misalnya tukang batu membuat rumah

diterangkan dengan ukurannya, jumlah kamar, menggunakan fundasi, dinding tembok dan sebagainya.

3.2. *Berakhirnya sewa menyewa*

Sewa menyewa sebagai aqad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.

Rumah sewa akan berakhir masa sewanya kalau roboh, hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi akan berakhir masa sewanya. Sedangkan kalau hanya terjadi kerusakan kecil selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki/mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Dalam keadaan benda/barang sewaan oleh pemiliknya dijual, maka aqad sewa menyewanya tidak berakhir sebelum masa sewa selesai. Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian juga halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik, maka aqad sewa menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan akan diteruskan oleh ahli warisnya.

4. Hutang Piutang

4.1. *Pengertian hutang piutang*

Hutang piutang sebagai salah satu aqad terjadi karena sepakat. Artinya setiaporang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebagai

syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.

Dasar hukum hutang piutang ini adalah firman Allah yang dicantumkan dalam **Surah (5) Al-Maidah ayat 2** menyatakan “Hendaknya kamu tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa kepada Allah dan jangan kamu tolong-menolong atas dosa atau permusuhan”.

Dari ayat ini yang penting ada unsur “tolong-menolong”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam menolong seseorang, karena kesulitan, hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar. Dan bantuan yang diberikan itu tidak mngikat tambahan saat mengembalikannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikan. Maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain. Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.

Jadi dilihat dari uraian ini dapat dirumuskan bahwa “Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterima”.

Dalam hal seseorang memberikan hutang sampai dua kali kepada orang tertentu, maka hutang yang pertama tidakperlu

ditagih untuk pelunasannya. Bahkan anggaplah hutang yang pertama itu sebagai pemberian lepas untuk meringankan beban yang berhutang. Dalam hal ini hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Madjah menyebutkan : “Seorang muslim yang memberikan hutang kepada seorang muslim dua kali, seolah-olah ia bersedekah kepadanya satu kali”. Dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan : “Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya”.

Dari dua hadits ini menunjukkan kejelasan bahwa sifat hutang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain. Dan untuk itulah Allah berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain.

4.2. *Rukun-rukun dan syarat-syarat hutang piutang*

Memberikan hutang kepada seseorang yang sunat hukumnya dapat dilakukan dengan kerelaan. Dan sunat ini menjadi wajib kalau dilakukan kepada orang terlantar atau sangat memerlukan bantuan.

Untuk menimbulkan hutang piutang dirukunkan beberapa hal dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat hutang piutang itu sebagai berikut :

4.2.1. *Lafaz (kalimat) ijab qabul*

Sebagai aqad hutang piutang diperlukan ijab qabul. Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa para pihak benar-benar menghendaki adanya ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Lafaz yang memberi hutang biasanya dengan ucapan “saya menghutangkan ini kepada saudara” dengan jawaban yang berhutang “saya mengaku

berhutang ini kepada saudara” diperlukan dalam pelaksanaannya. Tetapi berhutang dalam hutang piutang dilarang untuk mengambil tambahan pembayaran (yang ditentukan dalam perjanjian), maka lafaz dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, sebagai syarat lain, dengan ucapan “diberi tambahan sebanyak ini”.

4.2.2. Yang berhutang dan berpiutang

Kedua belah pihak sebagai yang berhutang dan berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli. Disyaratkan sama seperti dalam jual beli itu, karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai aqad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ialah :

- a. Berakal,
- b. Atas kehendak sendiri (kehendak para pihak),
- c. Bukan pemboros (mubazir),
- d. Dewasa dalam arti baliq.

4.2.3. Barang yang dihutangkan

Setiap barang dapat dihutangkan sesuai daya jangkau pelunasannya. Dalam hal ini yang menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan kemampuan membayar kembali atas orang yang mau berhutang. Dan perkiraan yang baik kalau dapat memperhatikan mengenai kehidupan keluarga, pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan yang mendesak dari calon penghutang. Kemudian perkiraan ini dibandingkan dengan besarnya (jumlah) hutangnya. Adapun tujuan perkiraan itu supaya jangan sampai menimbulkan beban hutang yang berat, sehingga pelunasannya tidak dapat dipenuhi.

4.3. *Menambah jumlah pelunasan*

Pelunasan pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang, atas kemauanya, melebihi jumlah pembayaran dari hutang yang diterima, maka kelebihan itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Dalam hal melebihi jumlah pembayaran dari yang diterima tanpa kemauan sendiri, maka hadits bani yang diriwayatkan oleh Baihaqi menyebutkan : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaatnya, maka ia semacam dari beberapa riba”.

Dilihat dari hadits ini menunjukkan bahwa pengertian jumlah hutang ketika dikembalikan menjadi bertambah karena salah satu syarat terjadinya hutang piutang, maka penambahan itu termasuk riba. Dan berbicara mengenai riba kiranya perlu diketahui pengertian yang dimaksud untuk menghindarkan kesalahan memberikan makna.

Istilah riba berasal dari bahasa Arab yang berarti lebih (tambahan atau bunga). Kata riba itu berawal dari pengertian yang terdapat di dalam jual beli mengenai “aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak dinyatakan dengan jumlah yang seimbang atau tidak memenuhi ketentuan atau terlambat menerima tukarannya”. Dari adanya kata-kata ini memberikan suatu makna bahwa salah satu pihak dalam jual beli berbuat riba. Kemudian istilah riba itu digunakan dalam kegiatan yang lebih luas dari setiap

hubungan antar sesama manusia tanpa mengurangi arti kata riba. Karena itu ada beberapa macam riba yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Beberapa macam riba yang dikemukakan oleh ulama tertentu terdiri atas :

- a. *Riba Fadhli* ialah menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama (seimbang).
- b. *Riba Qardhi* ialah meminjam dengan syarat memberikan keuntungan bagi yang meminjamkan.
- c. *Riba Jad* ialah berpisah dari tempat terjadinya aqad sebelum pengalihan hak milik dilaksanakan.
- d. *Riba Nasa'* ialah penukaran yang disyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Keempat macam riba ini dilarang dalam perwujudannya, karena akan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak bahkan kemungkinan dapat membawa kesengsaraan bagi pihak lain.

Yang sangat banyak dapat menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain kalau sampai terjadi riba beriba atau lazim dikenal dengan sebagai *bunga berbunga*. Dan pada umumnya mengenai bunga berbunga ini terjadi dalam hutang piutang. Dengan syarat riba dalam suatu hutang piutang kalau tidak dapat mengembalikan pada waktu yang diperjanjikan, maka hutang dan bunga itu menjadi hutang baru yang lebih besar jumlahnya dalam perjanjian baru, juga dengan ditentukan jangka waktu pengembaliannya. Kalau proses ini berlangsung terus menerus akan menimbulkan jumlah hutang bertambah besar yang pada suatu waktutiggal penderitaan dan kesengsaraan saja bagi yang berhutang.

Riba semacam ini dinamakan “riba nasi’ah”, dilarang dengan wahyu Allah untuk melakukannya, karena akan banyak orang yang menjadi habis hartanya dengan terus menerima tagihan sedangkan

barang-barang yang mungkin sudah digadaikan akan habis karena dilelang tanpa dapat ditebus.

Kalau suasana dalam suatu kelompok sosial tertentu anggotanya banyak yang terancam oleh riba nasi'ah ini niscaya dalam waktu relatif singkat menjadi rusak kehidupan sosial ekonominya, karena yang kaya dari hasil riba bertambah kaya sedangkan korban riba akan menjadi miskin dan menderita seumur hidupnya.

Kalau riba nasi'ah itu termasuk pemerasan manusia kepada manusia tanpa mau melihat penderitaan yang dialami manusia lain. Karena itulah Allah melarang dan dinyatakan sebagai perbuatan kebathilan. Harata kekayaan yang diperoleh dari riba itu tidak membuahkan kebaikan. Firman Allah yang dicantumkan dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 276** menyatakan : “Allah hapuskan riba dan Ia sebutkan derma-derma”.

Tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memakan riba itu tentulah karena mau kekayaan, dan dengan kekayaan itu ia mau senang sentosa, mulia dan terhormat. Sedangkan kenyataannya serba terbalik, yaitu memakan riba itu dibenci orang, dimusuhi dan tidak dihormati. Di Eropah, benua yang dipandang maju dengan orang-orangnya mengaku berkemanusiaan tinggi dalam abad keduapuluhan debeberapa kota ada penduduk yang membakar kampong Yahudi pemakan riba. Dan inilah yang disebut dengan “Allah hapuskan riba”.

Selain itu firman Allah yang dicantumkan dalam **Surah (30) Ar-Rum ayat 39** menyatakan: “dan suatu riba yang kamu beri supaya menjadi tambahan bagi harta-harta manusia, maka tidaklah menjadi tambahan (bagi ganjaran kamu) di sisi Allah, tetapi suatu zakat yang kamu keluarkan karena menurut perintah Allah, maka itulah yang mendapatkan ganjaran berganda-ganda”.

Ayat ini memberikan kejelasan bahwa bagi orang yang memberikan tambahan kepada seseorang supaya bertambah kaya kerana riba tidak ada pahalanya dari tambahan itu, tetapi dengan zakat kerana Allah justru akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah.

Dengan dua ayat yang bermakna larangan bagi orang untuk melakukan riba dan hendaknya jangan sampai diwujudkan dalam kenyataan. Khusus mengenai riba nasi'ah adalah haram hukumnya kerana dapat merusak kehidupan masyarakat dengan menciptakan kemiskinan dan kemelaratan orang yang menjaddi korban riba itu.

4.4. *Jaminan dalam hutang piutang*

Dalam suatu perjanjian hutang piutang dimungkinkan adanya pemberian jaminan sebagai faktor penguat untuk dapat menimbulkan kepercayaan bagi pemberi hutang. Tujuannya untuk menjaga kalau sampai terjadi penyimpangan dari isi perjanjian tanpa pembayaran pihak berhutang maka jaminan itu sebagai pelunas.

Dilihat dari sifatnya, maka bentuk jaminan hutang itu ada dua, yaitu :

4.4.1. *Jaminan barang*

Jaminan barang ialah suatu barang yang dijadikan penuat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang yang dijaminakan itu boleh diuangkan kalau hutang tidak dapat dbayar dengan harga yang berlaku sesuai pasaran umum.

Untuk menimbulkan kepercayaan adanya hutang piutang dengan jaminan barang itu diperlukan pemenuhan rukun-rukun jaminan. Dan rukun jaminan barang terdiri atas:

- a. Lafaz (kalimat) pernyataan harus tegas saat penyerahan dan penerimaan barang dari kedua belah pihak.

- b. Kedua belah pihak disyaratkan sebagai ahli tasharruf (berhak menjual belikan hartanya).
- c. Barang yang dijaminakan adalah setiap benda yang boleh dijual dengan syarat keadaan barangnya tidak dapat rusak selamaperjanjian hutang piutang berlangsung.
- d. Ada hutang dengan syarat keadaannya telah tetap (dapat berlangsung).

Kalau barang yang dijaminakan berada pada pihak berhutang maka barang itu tidak boleh dipindahtangankan baik dijual, dijaminakan dalam hutang lain maupun diberikan kepada orang lain kecuali atas izin pemberi hutang. Dan kalau barang itu rusak atau hilang, maka pemegangnya tidak perlu mengganti karena sebagai barang yang dijaminakan memerlukan saling percaya kecuali dalam keadaan diseengaja.

Selama hutang piutang dengan jaminan berlangsung, maka kegunaan barang yang dijaminakan itu tetap ada pada pemilik. Dalam hal ini pemilik tetap berhak mengambil kegunaan barang itu walaupun tanpa izin dari pemberi hutang.

Dalam keadaan barang yang dijaminakan menjadi bertambah dan *tambahannya terpisah*, seperti pohon berbuah, hewan bertelur atau beranak, maka tambahannya itu tidak termasuk barang yang dijaminakan. Tambahan itu tetap kepunyaan pemilik. Demikian juga halnya kalau sampai terjadi pelelangan barang yang dijaminakan, karena yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka tambahan atas barang yang dijaminakan tidak termasuk dalam pelelangan.

Sedangkan tambahan atas barang yang dijaminakan dalam keadaan *tidak dapat dipisah*, seperti hewan menjadi gemuk atau bertambah besar, maka tambahan itu termasuk barang

yang dijamin. Pemiliknya tidak berhak mengambil bagian dari tambahan itu, karena tidak dapat dipisahkan kecuali kalau gemuk hanya bulunya seperti domba tentu ada hak untuk menggunting bulu domba itu. Tetapi jaminan sawah terhadap hutang piutang tetap dapat diambil kegunaannya oleh pemilik untuk hasil yang diperoleh dari suatu penanaman.

4.4.2. *Jaminan orang*

Jaminan orang dalam arti luas disebut “dhaman”, ialah penanggung hutang atau orang yang diikutsertakan untuk menjamin hutang seseorang.

Sebagai jaminan hutang orang lain dimaksudkan akan menanggung pembayaran hutang itu kalau yang berhutang pada waktu yang telah disepakati tidak dapat membayar. Tetapi walaupun dalam suatu hutang piutang ada jaminan orang tidak berarti yang berhutang menggantungkan diri sepenuhnya kepada penjamin. Dalam hal ini yang berhutang harus tetap berusaha untuk dapat melunasinya. Dan kalau yang berhutang dapat melunasi hutangnya, maka penjamin tidak perlu untuk memberikan pembayaran kepada yang diberi jaminan.

Jadi dalam pengertian jaminan orang akan timbul kewajiban penjamin kalau yang dijamin tidak melakukan kewajiban membayar hutang yang telah disepakati. Dalam hal ini yang berpiutang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari penjamin.

Kalau seseorang sejak awal aqad hutang piutang telah dilibatkan sebagai penjamin dalam perjanjian, sebagai pihak ketiga, maka pembayaran hutang yang telah dilakukan penjamin kepada yang berpiutang dapat diminta

penggantiannya oleh penjamin kepada yang berhutang. Tetapi dalam hal penjamin tidak dilibatkan sebagai pihak ketiga sejak ada aqad, maka pembayaran hutang yang dilakukan dianggap sebagai kerelaan dalam menaggung hutang orang lain.

Suatu aqad hutang piutang dengan jaminan mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat-syarat itu sebagai berikut :

- a. Yang menjamin disyaratkan sudah baliq, berakal, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri.
- b. Yang berpiutang disyaratkan diketahui oleh penjamin.
- c. Yang berhutang syaratnya mengetahui adanya penjamin.
- d. Jaminan orang disyaratkan keadaannya diketahui dan sifatnya tetap (tidak sementara atau berubah).
- e. Lafaz (kalimat) jaminan disyaratkan yang mengandung makna jaminannya dan tidak digantungkan kepada sesuatu yang masih sementara.

Kalau rukun dan syarat-syarat ini tidak dipenuhi berakibat jaminannya tidak sah. Karena itu sebelum melibatkan orang sebagai jaminan hutang hendaknya diketahui lebih dahulu rukun dan syarat-syaratnya di samping risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

4.5. *Hiwalah*

Yang dimaksud dengan hiwalah ialah pemindahan hutang atas hutang orang lain. Timbulnya sebagai akibat dari peristiwa hukum hutang piutang bersegi, yaitu terjadinya minimal tiga pihak yang melibatkan diri di dalam peristiwa itu secara berkaitan.

Misalnya : A menghutangkan sesuatu kepada B dan B menghutangkan sesuatu kepada C. dalam hutang

piutang ini B atas persetujuan A menyuruh C membayar hutangnya kepada A. dengan berpindah kewajiban B kepada C itu berate B tidak mempunyai hubungan hukum hutang piutang lagi dengan A.

Memindahkan hutang atas hutang orang lain yang masih berkaitan ini diperkenankan dengan syarat. Dan syarat utama yang perlu diperhatikan oleh pihak berpiutang sebagai penerima pemindahan ialah :

- a. Pihak yang berhutang yang diwajibkan mengalihkan pembayaran hutang itu mampu melunasi pembayaran hutangnya. Kemampuan ini harus diketahui untuk menjaga kemungkinan jangan sampai terjadi tidakadapelunasan.
- b. Pemindahan pembayaran hutang dapat dilakukan dengan syarat jumlah hutang, jenis dan aqadnya sama. Maksudnya, kalau ada perbedaan jumlah, jenis yang tidak sama dan aqad terutama jangka waktu berbeda berarti tidak ada keseimbangan dalam pengembalian di kemudahan hari. Hal ini juga untuk menjaga kemungkinan jangan sampai dilibatkannya kembali pihak berhutang yang telah putus hubungan hukum setelah adanya pemindahan kewajiban pembayaran hutang tersebut.

Kalau kedua syarat ini telah dipenuhi, maka risiko yang timbul setelah terjadinya pemindahan pembayaran hutang sepenuhnya terletak pada pihak yang akan menerima pembayaran. Maksudnya kalau pihak yang berkewajiban membayar hutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak penerima pembayaran tidak dapat meminta pembayaran hutangnya itu. Dengan pengertian bahwa hiwalah boleh (setuju) dilaksanakan berarti selesailah hubungan hukum antara pihak pemberi hutang pertama dan penerima hutang sebagai pihak kedua.

Jadi dalam hiwalah ini yang merupakan pegangan pokok utama adalah qabul “setuju” pihak penerima pemindahan pembayaran hutang.

5. Pinjam Meminjam

5.1. *Pengertian pinjam meminjam*

Suatu perbuatan hukum yang terjadi dalam hubungan antar manusia dan hampir sama pengertiannya dengan hutang piutang adalah perbuatan hukum pinjam meminjam. Dialaksanakan hampir sama karena peristiwanya terjadi bagi seseorang yang membutuhkan sesuatu tetapi tidak memiliki, dan sesuatu yang dibutuhkan itu dimiliki oleh orang lain. Kalau terjadi sesuatu proses bahwa yang membutuhkan bertemu dan melakukan transaksi dengan yang memiliki sesuatu (benda) serta terjadi aqad, maka timbullah peristiwa hukum. Yang membutuhkan berhak menerima sesuatu (benda) dari yang memiliki untuk digunakan dalam waktu tertentu yang memiliki wajib menyerahkannya.

Dari proses ini nampak bahwa sesuatu yang berupa benda itu dilepaskan oleh pemiliknya untuk sementara waktu dan diambil kegunaannya oleh yang membutuhkan setelah terjadi aqad. Sedangkan sifat pelepasan benda itu hanya dalam waktu tertentu. Artinya kalau selesai diambil kegunaannya, sesuai aqad oleh yang membutuhkan, maka ia wajib mengembalikannya, dan proses inilah yang dinamakan pinjam meminjam (ariyah).

Jadi pinjam meminjam (ariyah) adalah suatu aqad (perikatan) yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk menggunakan sesuatu (benda) dalam waktu tertentu dan berkewajiban secara timbale balik untuk menyerahkannya dalam keadaan semula.

Dilihat dari pengertian pinjam meminjam ini menunjukkan bahwa dalam hubungan antar manusia untuk menciptakan bertetangga/berteman baik diperlukan saling tolong menolong. Artinya seorang yang membutuhkan sesuatu (benda) karena tidak memiliki kalau menghubungi orang yang memiliki perlu ditolong. Dan tidak perlu diberikan beban yang mengakibatkan kerugian, terutama material. Hal inilah yang dimaksudkan dengan isi **Surah (2) Al-Baqarah ayat 2**.

Kalau dilihat dari bendanya yang dikuasai oleh peminjam dan bersifat sementara, maka peminjam berkewajiban mengembalikan seperti ketika menerimanya.

Hadits nabi diriwayatkan Abu Daud dan Tarmizi menyatakan : “Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar”.

Dan dari hadits ini jelas bahwa bagi peminjam tidak boleh menghambat waktu yang telah diperjanjikan untuk pengembalian pinjamannya. Sedangkan kata “harus membayar” mengandung makna jaminan untuk mengembalikan dalam keadaan seperti ketika menerima.

5.2. *Rukun-rukun dan syarat-syarat pinjam meminjam*

Seperti halnya dalam perikatan yang lain, maka untuk menimbulkan aqad pinjam meminjam bagi para pihak diperlukan pemenuhan rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar sah.

Ada 3 rukun yang wajib dipenuhi untuk sahnya aqad. Dan ketiga rukun itu terdiri atas adanya peminjam, yang meminjamkan, dan benda pinjaman. Sedangkan syarat-syaratnya secara rinci sebagai berikut :

1. Peminjam

- a. Orang yang berhak menerima kebaikan, artinya dapat memelihara hak miliknya.

- b. Dewasa dan berpikiran sehat.
 - c. Tidak boleh meminjamkan kepada orang lain.
2. Yang meminjamkan
- a. Orang yang berhak berbuat kebaikan atas kehendaknya.
 - b. Dewasa dan berpikiran sehat.
 - c. Pemilik bendanya.
3. Benda yang dipinjamkan
- a. Ada kegunaan (manfaat)nya.
 - b. Tidak habis dipakai.
 - c. Tidak cepat rusak.

Kalau rukun-rukun dan syarat-syarat ini dipenuhi, maka sah hukumnya dalam perjanjian pinjam meminjam.

5.3. *Kegunaan benda yang dipinjam dan akibatnya*

Setiap benda sebagai alat dapat membantu pemenuhan kebutuhan seseorang. Dan sebagai alat benda itu mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Maksudnya benda sebagai alat mempunyai sifat tertentu, dan dari sifat itu akan diketahui kegunaannya.

Jadi tidak setiap benda sebagai alat mempunyai kesamaan sifat dan kegunaannya, dan selalu terbatas kepada sifat benda itu. Kegunaan yang terbatas atas suatu benda tidak dapat dipaksakan oleh pemakainya yang tidak sesuai sifat perbedaannya. Misalnya cangkul dipakai untuk menggali batu, sawah dipakai untuk menanam pisang.

Demikian juga halnya bagi peminjam wajib mengetahui sifat dan kegunaan yang terbatas atas benda yang dipinjam. Kalau peminjam menggunakan tidak sesuai dengan izin yang meminjamkan atau melampaui batas kegunaan bendanya, maka kemungkinan berakibat timbulnya kerusakan.

Dan timbulnya kerusakan atas benda atau kerusakannya atas perbuatan peminjam serta tanpa izin, maka ada kewajiban bagi peminjam untuk mengganti. Penggantian itulah yang disebut jaminan (tanggung jawab) peminjam. Tetapi kalau penggunaan benda itu atas izin yang meminjamkan, maka peminjam tidak perlu mengganti. Analog dengan penggantian atau tidak dengan kerusakan benda pinjaman juga kalau terjadi kehilangan.

5.4. *Mengembalikan benda pinjaman*

Mengembalikan benda pinjaman merupakan kewajiban bagi peminjam. Dan kalau seandainya peminjam tidak mengembalikan, maka yang meminjamkan berhak untuk memintakan pengembaliannya. Tetapi sebenarnya penyimpangan dari aqad waktu pengembalian dapat dibenarkan. Maksudnya, kalau peminjam sebelum waktu aqad habis dan telah selesai memakai benda pinjaman, maka tidak dilarang untuk mengembalikannya. Dan sebaliknya kalau yang meminjamkan memerlukan, waktu aqad belum habis benda yang dipinjamkan, maka ia dapat memintanya.

Hal ini tidak dilarang, karena pinjam meminjam merupakan aqad yang tidak tetap. Hanya saja terhadap benda tertentu yang memerlukan waktu lama, misalnya sawah, kebun atau lading, maka pengembalian atau permintaan kembali harus selesai panen.

Jadi dalam perjanjian pinjam meminjam (ariyah) kedua belah pihak boleh memutuskan aqad sebelum waktunya selesai, tetapi tidak merugikan pihak peminjam. Dan tolak pangkalnya adalah pinjam meminjam bukan aqad tetap.

6. Bagi Hasil (Qiradh)

Kalau ada orang yang memiliki modal yang tidak dapat dijalankan sendiri dalam suatu usaha karena tidak memiliki

keahlian berusaha atau tidak ada waktu untuk itu, maka ia dapat memberikan modal itu kepada yang tidak memilikinya dan mampu berusaha atau berdagang.

Pemberian modal yang dimaksud dilakukan dengan aqad agar penerima ada tanggung jawab. Dengan kemampuannya dapat menggunakan modal yang diterima dan mengusahakan agar memperoleh keuntungan. Keuntungan itulah dibagi dengan pemberi modal. Untuk membagi keuntungan, sebelumnya dalam perjanjian telah ditentukan apakah dua bagian yang sama atau duapertiga untuk pemberi modal dan sepertiga untuk penerima modal.

Kegiatan seperti ini dinamakan qiradh atau lazim dikenal dengan sebutan bagi hasil (dari keuntungan). Jadi qiradh ialah suatu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk usaha (perdagangan) dengan pembagian hasil keuntungan.

Menjalankan qiradh mempunyai makna tertentu yaitu menolong orang yang potensial dalam usaha dan dapat menghasilkan keuntungan dari usahanya. Potensi yang dimiliki kalau tidak disalurkan dengan baik kemungkinan dapat menimbulkan penyimpangan dalam bertingkah laku. Dan fatalitasnya dapat terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dapat juga menimbulkan ketimpangan ekonomi masyarakat atau kesenjangan dalam kehidupan sosial.

Qiradh bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat ekonomi lemah yang potensial dalam dunia usaha agar dapat hidup layak sebagaimana dikehendaki oleh setiap manusia. Tujuan idealnya membentuk kehidupan masyarakat dalam keadaan makmur.

Proses kegiatan dalam menyelenggarakan qiradh bagi pelaksanaannya tidak dibebani hutang atau ganti kerugian kalau

terjadi rugi. Maksudnya. Pemberian modal tidak merupakan hubungan hukum hutang piutang. Dan bagi penerima kalau dalam usahanya sampai terjadi kerugian tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian itu. Karenanya dalam aqad qiradh harus benar-benar jelas mengenai kesepakatan para pihak supaya tidak ada penyimpangan dari kehendak syariat yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerima modal. Selain itu juga harus menghindarkan terjadinya penyimpangan dari makna qiradh yang mengutamakan perbuatan menolong orang agar tidak ada dalam kehidupan yang tidak layak.

Kalau aqad qiradh bermakna hutang piutang, ada riba dan atau penggantian kerugian bagi penerima modal, maka aqad itu batal demi hukum. Dan dalam pelaksanaannya dinyatakan tidak pernah terjadi aqad qiradh.

Jadi dalam menyelenggarakan qiradh bagi pemilik modal benar-benar reladan berniat menolong orang lain untuk menaikkan tingkat kehidupan perekonomiannya yang masih lemah. Sedangkan yang ditolong secara terbuka berniat menjalankan usahanya dengan baik sesuai kemampuan yang dimilikik agar tetap dapat dipercaya tanpa cacat.

Kerugian usaha melalui qiradh pada awalnya dapat dilakukan dalam bidang perdagangan melalui jual beli. Tetapi dapat dikembangkan mengelola perkebunan, sawah atau ladang. Kegiatan usaha mengelola perkebunan dengan bagi hasil dari keuntungan dinamakan musaqah. Kegiatan mengelola sawah dengan bagi hasil dari keuntungan dinamakan muzara'ah sedangkan untuk ladang dinamakan mukhabarah.

Di Indonesia kegiatan qiradh dapat saja dilakukan secara perorangan aqadnya tidak menyimpang dari makna qiradh, karena termasuk substansi sadaqah. Tetapi yang diusahakan justru kalau

terorganisir dengan baik. Hal inilah yang kemudian yang dilakukan melalui suatu kegiatan bank non bunga.

7. Pemberian

7.1. *Dasar pemikiran*

Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri.

Kehidupan manusia yang selalu berkelompok dan lazim disebut kelompok sosial senantiasa bertujuan mencapai hidup bahagia. Untuk mencapai tujuan itu setiap anggota kelompok akan berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya tentu dilakukan sebaik mungkin melalui komunikasi antar anggota. Jarang sekali ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan dilakukan tanpa komunikasi. Dan dengan menggunakan komunikasi sebagai alat, maka proses pemenuhan kebutuhan akan dapat dicapai seoptimal mungkin. Maksudnya, setiap kebutuhan yang perlu diperoleh pemenuhannya oleh individu sebagai anggota kelompok sosial melalui komunikasi akan dapat sesuai dengan materi yang tersedia untuk kebutuhan saat itu. Dan upaya yang dilakukan akan menyesuaikan juga dengan tersedianya materi. Karena itu tidak mungkin kebutuhan seseorang dapat dipenuhi secara mutlak sesuai keinginannya di satu saat berhubung keinginan sebagai pemuas diri tidak mungkin akan seimbang dengan tersedianya materi sebagai obyek pemenuhan kebutuhannya. Kalau hal seperti itu terjadi hanyalah merupakan suatu pengecualian.

Dalam kehidupan kelompok sosial terkecil yang disebut “keluarga” pemenuhan kebutuhan anggota-anggotanya wajib diusahakan oleh kepala keluarga. Tetapi tentunya harus sesuai

dengan kemampuan dan keterampilan baik dari kepala keluarga itu. Dan dalam pelaksanaannya dituntut kejujuran, kebenaran dan tidak merugikan orang lain dengan hanya untuk kepentingan pemuas diri beserta keluarganya. Tidaklah dibenarkan kalau pemenuhan kebutuhan anggota keluarga diperoleh dari jalan yang tidak halal.

Firman Allah dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 188** menyatakan bahwa “Janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan batal (tidak halal)”.

Berdasarkan firman ini berarti bahwa berdosa hukumnya bagi seseorang dalam usaha memenuhi kebutuhan hanya melihat untuk pemuas diri dengan melebihi kemampuan yang dimiliki dan memperoleh hasil mengambil hak harta orang lain, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Demikian juga halnya bagi kepala keluarga yang tidak dapat membatasi keinginannya untuk memperoleh hasil usaha melebihi kemampuannya merupakan perbuatan dosa. Tetapi dalam hal harta diperoleh seseorang atau suatu keluarga karena “pemberian” orang lain, maka peristiwa itu tidak merupakan halangan untuk digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan.

7.2. *Sadaqah, hadiah dan hibah*

Istilah “pemberian” mempunyai pengertian yang luas, karena prosesnya akan dapat berlangsung sebagai beri-memberi yang meliputi setiap pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain. Pada umumnya proses beri-memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan sering ada tenggang waktu tertentu sesuai suasana saat itu. Maksudnya, pelaksanaan pemindahan sebagian hak milik

seseorang kepada orang lain jarang dilakukan secara timbale balik waktu itu melainkan dalam jarak waktu tertentu sebagai balasan pihak penerima dalam melakukan pemberian sesuatu kepada pihak pemberi walaupun sebenarnya tidak ditunggu dan diharapkan. Proses seperti itu sering terjadi di dalam kehidupan bertetangga, antar kenalan atau teman.

Jadi, sifat hukum dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Dalam pergaulan sehari-hari suatu lembaga yang lebih sempit pengertiannya dengan istilah pemberian yaitu sadaqah, hadiah dan hibah. Yang dimaksud dengan lebih sempit pengertiannya dari tiga perbuatan (sadaqah, hadiah dan hibah) ini dibanding pemberian biasa yaitu tidak menuntut imbalan apapun juga dari penerima dan hanya sekedar keikhlasan hati pemberi dalam melakukannya. Selain itu juga termasuk dalam bidang hukum muamalat sendiri.

Sadaqah merupakan suatu pemberian yang ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Artinya pemberian yang dilakukan melalui sadaqah kalau pemberi memang benar-benar ikhlas tentu akan ada harapan memperoleh pahala di akhirat nantinya. Karena itu dapat diartikan bahwa sadaqah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa balasan dengan harapan memperoleh pahala di akhirat.

Hadiah merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan dan hanya sekedar pemberian yang tidak mengharap imbalan. Sebagai salah satu hukum pemberian, maka dalam hadiah mengandung sifat hukum “menghormati” seseorang atau kelompok orang penerima atau karena sesuatu hal tertentu. Dan sama halnya dengan sadaqah di

dalam hadiah ada unsur keikhlasan serta sukarela untuk melakukannya. Karena itu dapat diartikan bahwa hadiah adalah pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain tanpa balasan dan dilakukan sebagai penghormatan.

Hibah juga merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini bukan unsur keikhlasan dan kesukarelaan dalam memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain melainkan mengenai pemindahan hak dan hak miliknya. Dan di dalam hukum Islam yang diartikan dengan hibab adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah kekayaan.

Ketiga bentuk pemberian seperti disebutkan di atas dianjurkan bagi setiap orang Islam, karena dengan memberikan sebagian dari kekayaan yang dimilikinya, berarti membantu mengurangi beban orang lain. Bahkan terhadap sadaqah justru akan mendapat pahala dari Allah bagi yang melakukannya.

Dalam Al Quran bagian terakhir dari **Surah (2) Al-Baqarah ayat 177** menyatakan bahwa "... dan mendermakan harta yang sedang dicintai kepada keluarganya yang miskin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang dalam perjalanan da orang yang meminta". Makna ayat ini sebenarnya yang dapat dijadikan alasan kebenarannya bahwa selama hidup di dunia ini hendaklah jangan membiarkan orang yang memerlukan bantuan tetap menderita tanpa diperhatikan oleh orang yang dapat memberikan bantuan.

Sadaqah dan hadiah dalam proses pelaksanaannya tidak memerlukan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak pemberi dan pihak penerima kecuali adanya kerelaan bagi pemberi untuk melakukan perbuatan itu. Tetapi untuk hibah selain kerelaan juga masih diperlukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang wajib

dipenuhi oleh para pihak. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat hibah sebagai berikut:

7.2.1. *Pemberi*

Yang dapat melakukan penghibaan sebagai pemberi adalah setiap orang yang :

- a. *Dewasa*, artinya orang itu sudah baliq dan mampu untuk melakukan tindakan hukum sendiri dalam bidang hukum Islam.
- b. *Berpikiran sehat*, artinya dapat menggunakan akal nya secara baik tidak terganggu karena gila atau keborosan.
- c. *Pemilik bendanya*, yaitu orang yang tersebut benar-benar sebagai pemilik dan menguasai benda yang akan dihibahkan, bukan sebagai pemegang atau penerima titipan dari orang lain.

7.2.2. *Penerima*

Yang dapat memberi hibah ialah setiap orang yang berhak memiliki sesuatu kekayaan dan tidak harus dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena itu penerima dapat orang dewasa, anak-anak atau orang yang tidak berpikiran sehat. Tetapi bagi anak-anak dan orang yang tidak berpikiran sehat dalam menerima hibah benda pemberian itu harus diterimakan kepada walinya.

7.2.3. *Serah terima (ijab qabul)*

Dari kedua belah pihak diperlukan adanya serah terima secara nyata. Maksudnya, pihak pemberi benar-benar dengan ikhlas menyerahkan benda yang dimiliki dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (ijab), sedangkan bagi penerima bersedia menerima benda yang diberikan dengan ucapan balasan menerima (qabul) pemberian itu. Tetapi dalam ijab qabul ini tidak mutlak hukumnya dan mempunyai

perkecualian kalau menurut hukum kebiasaan tidak perlu dilakukan, seperti seorang istri menghibahkan giliran kepada madunya, bapak/ibu memberikan barang keperluan bagi anaknya.

7.2.4. Benda yang akan dihibahkan

Benda sebagai obyek penghibahan hendaknya merupakan barang yang boleh dijual dalam keadaan :

- a. Halal, maksudnya tidak bertentangan dengan hukum dalam arti sah diberikan dan sah dijual. Misalnya kulit hewan yang masih basah sah diberikan tetapi tidak sah dijual.
- b. Sepadan, maksudnya wujud dan jumlah barangnya bermanfaat. Misalnya biji-bijian kalau hanya beberapa butir sah diberikan tetapi tidak sah dijual.
- c. Nyata, artinya barang yang akan dihibahkan benar-benar ada dan kelihatan (diketahui), sebab kalau tidak diketahui akan sah diberikan tetapi tidak sah dijual.

Kalau semua syarat ini telah dipenuhi, maka yang perlu diperhatikan mengenai peristiwa penyerahan benda sebagai barang hibah. Penyerahan barang dalam suatu penghibahan akan mempunyai akibat hukum sendiri.

Sesaat penyerahan barang dilakukan, maka akan terjadi perubahan status pemilikan mutlak bagi penerima hibah, karena hibah bukan merupakan perjanjian meainkan sebagai pemberian lepas.

Pemberi hibah tidak mempunyai hak untuk mengawasi, mengatur dan menentukan keperluan serta tujuan dalam menggunakan barang yang dihibahkan itu. Sedangkan penerima akan mempunyai hak sesuai dari sifat barang itu boleh dijual.

Hibah dapat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa memandang penerimanya asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap hibah yang terjadi tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi. Maksudnya orang yang memberikan hibah dengan alasan apapun juga tidak dapat meminta kembali benda yang telah dihibahkan itu. Pengecualian terhadap penarikan hibah itu hanya dapat dilakukan kepada anaknya. Misalnya : A sebagai orang tua telah menghibahkan sesuatu barang kepada B anak kandungnya. Melihat tingkah laku B yang tidak baik dalam menggunakan harta miliknya, maka A dapat meminta kembali barang hibah itu.

Ketentuan mengenai tidak dapat ditariknya kembali suatu hibah kecuali kepada anaknya terdapat dalam hadits Nabi Muhammad. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim meminta kembali pemberiannya kecuali pemberian bapak kepada anaknya.

7.3. *Wakaf (waqf)*

7.3.1. *Pengertian wakaf*

Wakaf sebenarnya hampir sama prosesnya dengan sadaqah, hadiah dan hibah, yaitu merupakan suatu pemberian dengan mengalihkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Tetapi dalam wakaf proses pemberian itu mempunyai perbedaan arti sesaat setelah terjadi penyerahan terutama mengenai kegunaan dan kelanggengan dari benda yang diwakafkan.

Marilah kita tinjau mengenai hal yang dimaksud itu tadi. Kata “wakaf” berarti penahanan (pembekuan), maksudnya menyatakan suatu benda yang bersifat tahan lama tidak lekas

hilang (habis/rusak) karena dipakai supaya dapat digunakan untuk kebaikan.

Dari pengertian ini ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu:

1. Benda yang bersifat tahan lama

Benda yang bersifat tahan lama dimaksudkan bagi setiap barang dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang diberikan oleh benda itu maupun kegunaan yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat.

2. Untuk kebaikan

Benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai-bagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan benda itu ada makan kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah.

Firman Allah dalam **Surah (22) Al-Haj ayat 77** menyatakan: “Hai orang-orang yang beriman, ruku dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu dapat kejayaan”. Dalam **Surah (3) Al-Imran ayat 92** menyatakan: “Kamu tidak akan mendapat (balasan) kebaikan kecuali kamu mendermakan sebagian harta dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu yang kamu dermakan itu Allah mengetahui adanya”.

Dari kedua firman Allah itu terlihat bahwa berbuat kebaikan adalah hal yang dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu. Sedangkan salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan

memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk digunakan oleh orang lain.

Arti wakaf dilihat dari segi hukumnya banyak yang menimbulkan pandangan terutama dari para ahli Hukum Islam seperti Abu Hanifah, Qadli Abu Jusuf dan Imam Muhammad (pengikut Abu Hanifah) dan pandangan dari golongan Syi'ah.

Menurut Abu Hanifah wakaf itu merupakan penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan waqif (orang yang bebauat waqf) dan menggunakan hasilnya (ariah) untuk tujuan amal saleh. Pandangan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah ini memberikan pengertian bahwa benda yang dinyatakan sebagai wakaf akan tetap dikuasai oleh pemberi sedangkan hasil yang diberikan oleh benda atau kegunaannya dapat dinikmati setiap orang walaupun telah diserahkan, tetapi tidak lepas dari kekuasaan (bezit) pemilik asalnya. Yang diutamakan menurut pandangan ini terwujudnya amal saleh sebagai tujuan pewakafan.

Pandangan Qadli Abu Jusuf dan Imam Muhammad menyatakan bahwa wakaf itu adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda milik Allah Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari waqif berakhir dan pindah kepada Allah untuk suatu tujuan yang hasilnya digunakan bagi kemanfaatan makhluk-Nya. Menurut pandangan ini sesaat setelah terjadi penyerahan benda, maka pemilik sebagai waqif tidak mempunyai kekuasaan apapun juga terhadap benda yang telah dinyatakan sebagai wakaf. Hak pemilikan benda itu kembali kepada Allah, sedangkan bendanya dapat digunakan oleh setiap makhluk Allah dalam

menikmati hasil dari benda itu. Dan pemilikan dari benda wakaf itu tidak dapat dilakukan oleh manusia siapapun juga. Itulah yang kemudian diartikan sebagai wakaf (penahanan/pembekuan). Dari pandangan ini menunjukkan unsur-unsur pokok penting bahwa setiap wakaf yang terjadi akan menimbulkan:

1. Pemilikan oleh Allah yang berarti sifat sifat bendanya menjadi abadi dan tidak dapat dicabut,
2. Hapusnya hak pemilikan dari waqif,
3. Bermanfaat bagi makhluk manusia.

Pandangan *golongan Syi'ah* menyatakan bahwa wakaf itu adalah suatu kontrak yang hasil atau akibatnya merupakan penahanan asal dari sesuatu benda dan membiarkan bebas hasil-hasilnya. Dari rumusan yang dinyatakan oleh golongan Syi'ah tentang wakaf ini dapat dilihat pokok-pokok pandangannya bahwa tidak secara tegas menyatakan pemilik benda yang dibekukan juga tidak ditegaskan penggunaan hasil (keuntungan) yang diperoleh dari benda itu.

Sebenarnya lembaga wakaf itu semula timbul dari adanya hadits Nabi Muhammad berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh Umar. Hadits Nabi Muhammad (diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim) menyatakan bahwa “Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Chaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah : “Apakah perintahmu kepadaku berhubungan dengan tanah yang saya peroleh itu?” Jawabnya: “Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya”. Maka dengan petunjuk itu Umar mensedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tanahnya tidak akan dijual, diberikan dan tidak pula dipusakakan (diwariskan)”.

Dari hadits inilah menunjukkan adanya penahanan (pembekuan) suatu harta di bawah pemilikan Allah dan dipersembahkan hasil-hasil harta itu untuk kegunaan umat demi kebaikan.

Dengan demikian kalau suatu harta telah dinyatakan sebagai wakaf dan persembahannya mempunyai tujuan amal saleh (kebajikan), maka hak pemilikan seseorang atau kelompok orang dari wakaf itu menjadi hapus dan menjadi abadi pemilikannya di tangan Allah Yang Maha Kuasa.

7.3.2. *Syarat-syarat wakaf*

Wakaf yang tujuannya bersifat keagamaan, yaitu digunakan untuk kepentingan manusia hendaknya kemanfaatan wakaf harus dilihat sebagai yang utama. Dan diutamakan kemanfaatannya itu justru karena hendaknya menjadi abadi, tetapi hasil dan kegunaan benda itu yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Sebagi hukum pemberian dalam pewakafan ada pihak pemberi dan pihak penerima. Pemberi wakaf disebut waqif dan penerima (dalam arti mengurus wakaf) disebut mutawalli. Untuk pengertian penerima wakaf di sini bukan dimaksudkan sebagai pemilik baru melainkan sebagai pengurus atau pengelola agar benda wakaf tetap sesuai tujuannya dapat digunakan dan serta memberikan hasil yang diperlukan oleh manusia. Karena itu tidak benar bahwa mutawalli dapat memiliki atau memindahtangankan benda wakaf. Yang dapat menjadi mutawalli adalah setiap orang, kelompok orang atau pemerintah daerah yang mampu menggunakan hak hukumnya. Sedangkan bagi pemberi wakaf ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, yaitu :

1. Setiap orang yang menggunakan hanya untuk berbuat kebaikan. Maksudnya bagi seseorang yang menyadari bahwa dalam menyisihkan seebagian dari harta kekayaan yang dimiliki untuk keperluan orang lain secara terus menerus, berarti ia menggunakan haknya. Dan tindakan seperti itu dapat dilakukan oleh setiap orang dan tidak terbatas bagi yang beragama Islam saja.
2. Atas kehendaknya sendiri, yaitu dalam memberikan wakaf tidak karena pengaruh seseorang atau kelompok orang sebagai anjuran apalagi paksaan. Niat untuk menyisihkan sebagian dari harta kekayaan diwujudkan dalam bentuk pewakafan benar-benar merupakan keikhlasan diri.

Kedua syarat ini kalau sudah dipenuhi oleh seseorang baik orang Islam maupun bukan Islam tidak ada halangan untuk melakukan wakaf. Dan sifat wakafnya tidak akan habis walaupun waqif telah meninggal dunia. Untuk hal ini hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jamaah Ahli Hadits juga Buhari dan Ibnu Madjah menyatakan bahwa “Dari abu Hurairah sesungguhnya Nabi Besar SAW telah berkata : “Apabila seseorang meninggal dunia akan habislah amalnya (amalnya tidak akan bertambah lagi) kecuali tiga perbuatan, yaitu 1) wakaf, 2) mengembangkan ilmu pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun karang mengarang dan sebagainya), 3) anak saleh yang mendoakan untuk ibu bapaknya”.

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakafkan adalah:

1. Kekal sifatnya, artinya sejak benda itu mulai diambil manfaatnya akan bersifat abadi.
2. tidak dapat ditarik kembali. Maksudnya bagi suatu benda yang dinyatakan menjadi wakaf telah berpindah

pemilikannya dari pemilik asal (manusia) kepada Allah sebagai pemiliknya. Karena itu tidak seorang pun yang dapat meminta benda itu untuk dimilikinya kembali.

3. tidak dapat dipindahtangankan, maksudnya wakaf sebagai suatu dana yang kekal adalah kepunyaan Allah. Tidak dapat dipindahtangankan artinya tidak dapat dijual, diberikan atau dipusakakan. Tetapi kalau seandainya kegunaan untuk mengambil manfaat dari benda itu sudah tidak ada lagi, seperti tikar mesjid yang tidak pantas dipakai, tentu boleh dijual dan hasilnya untuk kepentingan mesjid lagi.
4. Semula milik yang mewakafkan, maksudnya benda yang akan diwakafkan harus kepunyaan (hak milik) dari orang yang mau mewakafkan. Dan sebelum diwakafkan pemilik menguasai bendanya, hal ini berkenaan dengan penyerahan benda itu secara langsung sebagai pernyataan wakafnya.

7.3.3. Subyek dan obyek wakaf

Subyek wakaf adalah benda-benda yang dapat diwakafkan. Semula ketika untuk pertama kali lembaga wakaf ada yang dapat diwakafkan hanya benda tetap seperti tanah, ladang dan kebun. Tetapi sejak banyak para ahli hukum Islam mengemukakan pandangannya tentang wakaf, maka dalam perkembangannya menjadi benda bergerak termasuk hewan dan piutang menjadi subyek wakaf juga. Bahkan *Musya'* yaitu suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya dapat juga dijadikan subyek wakaf di samping tempat-tempat dan jabatan tertentu. Jadi kalau dilihat dari macam-macamnya benda sebagai subyek wakaf dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- a. *Benda tetap* berupa tanah termasuk dalam arti lapangan, sawah, ladang, kebun dan bangunan yang melekat pada tanah itu seperti *mesjid* sebagai tempat melakukan salat dan ibadah lainnya, *tempat beristirahat* yaitu tanah pekuburan, *sayyadanashin* yaitu bangunan yang berupa langgar sebagai tempat memperoleh ajaran agama dan melakukan latihan rohaniyah dalam mengabdikan kepada Allah.
- b. *Benda bergerak*, adalah setiap benda yang dapat dipindahkan-pindahkan seperti tikar, kitab suci Al Quran untuk bacaan di mesjid, benda bergerak lainnya yang tidak mudah habis atau rusak dan hewan yang tidak diharamkan seperti unta, kuda, sapi dan lainnya.
- c. *Jabatan tertentu*, adalah Qadhi (hakim) yang turun temurun.

Sedangkan yang dimaksud dengan obyek wakaf, yaitu sesuatu yang dituju dalam perwakafan. Artinya wakaf itu diberikan kepada kelompok orang tertentu. Sesuatu yang dituju dalam perwakafan ini dapat dilakukan kepada keluarga atau masyarakat. Kedua perwakafan seperti ini hendaknya mempunyai sifat yang sama. Wakaf kepada keluarga hanya hasilnya saja yang dapat dimanfaatkan oleh anggota keluarga, dan benda pokok sebagai wakaf tetap tidak merupakan hak milik dari keluarga. Artinya tidak dapat berpindah tangan atau menjadi pusaka. Dan wakaf kepada masyarakat proses penggunaannya sama dengan wakaf kepada keluarga. Maksudnya tidak ada pemindahan hak milik dan yang dapat dinikmati hanya hasilnya saja dari benda wakaf.

BAB VII

JINAYAT

1. Penertian Jinayat

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan sebutan hukum pidana. Dan istilah dalam hukum Islamnya dinamakan “Jinayat”.

Secara etimologi kata jinayat berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah.

Kalau dilihat dari arti-arti kata di atas, maka jinayat itu merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi hukuman bagi pelakunya untuk menjalankan kisas, diyat dan atau hudud. Dan dengan adanya sanksi ini, maka jinayat sebagai hukum sanksi dapat dibagi menjadi dua kitab, yaitu kitab jinayat dan kitab Hudud.

2. Kitab Jinayat

Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil hak Allah, ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengingkari segala kewajiban atas perintah Allah. Dan perbuatan itu berupa menghilangkan nyawa orang atas kehendaknya yang dinamakan pembunuhan. Sedangkan

keyakinan setiap orang beragama bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Setiap kematian akan terjadi atas kehendak Allah. Kalau kematian seseorang sebagai akibat dari perbuatan manusia dalam melakukan pembunuhan, maka kematian itu atas kehendak manusia pelakunya dan bukan kehendak hak Allah. Jadi perbuatan membunuh itulah yang dimaksud dengan “mengambil kehendak Allah”. Karena itu kalau terjadi peristiwa hukum pembunuhan pelakunya dikenakan sanksi hukuman. Dan sanksi itu dilakukan Allah dalam memberikan balas yang setimpal dengan perbuatannya berupa hukuman berat di dunia dan dimasukkan ke dalam neraka nantinya di akhirat. Ketentuan pasal hukumnya dicantumkan dalam:

- a. **Surah (4) An-Nisa ayat 93** menyatakan : “Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka untuk selama-lamanya, Allah murka kepadanya, dikutuknya dan disediakan siksa yang berat”.
- b. **Surah (2) Al-Baqarah ayat 178** menyatakan : “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melakukan qisas (balasan yang sama dengan perbuatannya) karena membunuh orang”.

Kedua surah ini menunjukkan bahwa hukuman sebagai sanksi pembunuhan dilaksanakan dengan dua jalan, yaitu :

1. Hukuman di akhirat sebagai beban untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Dilihat dari pasal hukum tentang penghukumannya, maka hukuman di akhirat itu baru akan dijalankan oleh seorang pembunuh kalau dirinya sudah meninggal dunia. Dan sebagai ketentuan hukum Allah, maka hukuman itu belum dapat dirasakan akibatnya selama masih hidup. Karena itu bagi orang yang belum kuat imannya tidak akan memperhatikan bahwa hukuman di akhirat itu ada. Dan

bahkan tidak akan mau bertobat atas perbuatannya. Hukuman di akhirat tidak menjadi rintangan untuk melakukan pembunuhan atau perbuatan yang mengambil hak Allah lainnya.

2. Hukuman di dunia sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Hukuman di dunia itu harus dijalankan dengan qisas bagi pelaku suatu pembunuhan. Qisas adalah hukum bunuh bagi siapapun juga yang sengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya hukum bunuh itu tidak selamanya dilakukan, karena dengan alasan tertentu dapat diganti hukum denda. Maksudnya, dalam melaksanakan hukuman mati sebagai sanksi yang setimpal dari perbuatan membunuh hanya dapat dilaksanakan oleh keputusan ahli waris korban sebagai haknya. Dan ahli warislah yang menentukan pembalasan hukuman mati terhadap pembunuh. Kalau pembunuh bertobat dan menyerahkan/diserahkan dirinya kepada ahli waris korban, maka ahli waris korban itu dapat menentukan qisas atau pengampunan untuk mengganti qisas dengan membayar denda (diyat) atau dibebaskan. Sedangkan korban akan menerima penggantian dari Allah di akhirat sebagai suatu kebaikan.

Menurut Kitab Jinayat perbuatan membunuh itu ada tiga jenis, yaitu:

1. *Sengaja*, yakni dilakukan oleh seseorang dalam membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dapat mematikan. Perbuatan kesengajaan dapat terjadi dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari peristiwa itu ada “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Bagi pembunuh wajib menjalankan qisas kecuali memperoleh pengampunan dari ahli waris korban. Dan

hukuman berat berupa qisas dari Allah itu bertujuan untuk menjaga keselamatan serta ketentraman umum. Sedangkan sifat normanya sebagai peringatan bagi masyarakat supaya tidak melakukan bunuh-membunuh antar manusia sesamanya.

Pasal hukum qisas dicantumkan dalam **Surah (2) Al-Baqarah ayat 179** yang menyatakan : “Dengan berjalannya hukum qisas, kamu dapat hidup, hai orang-orang yang berakal mudah-mudahan kamu takut”. Dari ketentuan pasal ini jelas maksudnya bahwa bagi orang yang tidak melakukan (pembunuhan) akan dapat hidup dengan baik dan tanpa kekhawatiran hukuman Allah, karena hukum qisas tidak berlaku kepadanya. Sedangkan bagi orang yang melakukan (pembunuhan) merupakan hukum wajib dalam menjalankan qisas. Artinya ia tidak akan hidup lebih lama lagi setelah hukum qisas dilaksanakan dan selama qisas itu sebagai hukum positif. Karena itu dengan berlakunya hukum qisas diharapkan tidak ada suatu perbuatan pembunuhan karena adanya rasa takut atas ancaman sanksi berat yang diberikan Allah kepada pelaku pembunuhan.

Pelaksanaan qisas bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dapat dijalankan kalau pembunuh memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan syarat-syarat dapat menjalankan qisas itu, ialah :

- a. Sudah baliq dan berakal,
- b. Pembunuh bukan bapak dari korban,
- c. Kedudukan korban sederajat, artinya beragama Islam dan merdeka (bukan hamba).

Bagi seorang pembunuh yang memenuhi syarat-syarat ini selain memenuhi dasar hukumnya, maka diwajibkan

menjalankan qisas. Dasar hukum qisas berlaku juga bagi hukum talio lainnya akibat korban menjadi cacat tubuh. Hukum talio lain yang dimaksud meliputi perbuatan penganiayaan, melukai atau menghilangkan salah satu bagian anggota tubuh (indera), maka pelakunya dikenakan sanksi hukuman seperti hukum qisas. Dan sebagai analogi hukum qisas bagi pelakunya tidak menjalankan qisas melainkan hukumnya sesuai atas perbuatan yang dilakukan kalau memenuhi syarat-syarat talio dalam menjalankan hukuman itu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan sanksi hukuman harus sesuai. Maksudnya kalau korban kehilangan tangan kanan, maka terhukum harus dipotong tangan kanannya. Dan arti dari “hukuman harus sesuai” ini berlaku juga bagi setiap anggota tubuh lain yang hilang karena perbuatan seseorang dan baginya harus mengalami dalam keadaan yang sama.
- b. Pemotongan bagian anggota tubuh sebagai pelaksanaan sanksi yang harus dilakukan oleh terhukum tidak boleh kurang atau lebih dari korban yang menderita sebagai akibat perbuatan terhukum.
- c. Luka yang diderita sebagai akibat perbuatan seseorang tidak dikenakan hukuman pembalasan yang sesuai dengan pelakunya.

Dari syarat-syarat talio ini menunjukkan bahwa hukuman yang dilaksanakan atas perbuatan yang mengakibatkan cacat tubuh seseorang tidak boleh lebih dari yang dialami korban.

2. *Tidak disengaja*, yaitu peristiwa hukum yang dilakukan sebagai suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat korbannya meninggal dunia.

Sanksi qisasnya tidak wajib melainkan diwajibkan membayar “diyat ringan”. Dan pembayaran diyat itu dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada ahli waris korban dalam jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan angsuran pada tiap-tiap akhir tahun sebanyak sepertiga bagian dari jumlah yang telah ditentukan.

Pasal hukum pembayaran diyat itu dicantumkan dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 92** yang menyatakan “Barang siapa membunuh orang mukmin tanpa sengaja, hendaknya ia dimerdekakan dengan membayar diyat kepada ahli waris orang terbunuh”.

Berdasarkan ketentuan pasal ini berarti bagi setiap pelaku pembunuhan tidak sengaja dibebaskan dari hukuman akhirat, tetapi tetap menjalankan hukuman dunia tanpa qisas dan hanya membayar diyat.

Diyat adalah denda pengganti jiwa tanpa menjalankan hukuman mati. Ada dua macam diyat yang dilaksanakan oleh pelaku pembunuhan, yaitu :

1. *Diyat berat*, wajib bagi pelaku pembunuhan yang disengaja bagi pengganti qisas karena memperoleh pengampunan.

Kewajiban diyat berat itu dilakukan dengan membayar tunai sejumlah hewan yang telah ditetapkan. Banyaknya hewan yang wajib dibayar sejumlah 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor unta betina berumur 3 jalan 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 jalan 5 tahun, dan 40 ekor unta betina dalam keadaan bunting.

Dasar hukum pembayaran diyat berat ini adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Tarmidzi menyatakan “Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia

diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda”. Dan di dalam ketentuan hadits ini juga dinyatakan mengenai jumlah hewan yang harus dibayarkan secara tunai.

Kalau dilihat dari pembayaran diyatnya, maka diyat berat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Dendanya dibagi tiga dengan tingkat umur yang lebih tua,
2. Wajib dilakukan oleh pelaku pembunuhan,
3. Pembayarannya harus tunai.

Dengan sifat-sifat ini terlihat bahwa bagi pelaku pembunuhan akan dapat merasakan beratnya membayar diyat yang dimaksud, karena selain tidak boleh dibayarkan oleh orang lain juga dalam memenuhi jumlah unta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan itu akan banyak menimbulkan kesulitan.

2. *Diyat ringan*, wajib dilakukan oleh setiap pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. Besarnya pembayaran denda sama dengan diyat berat. Tetapi dalam pelaksanaannya dibagi lima dengan rincian 20 ekor unta betina berumur 1 jalan 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 jalan 3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 jalan 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 4 jalan 5 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 5 jalan 6 tahun. Pelaksanaan denda ini dapat dibayarkan oleh keluarga pembunuh dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran sepertiga dari jumlah dan dibayar setiap akhir tahun.

Kalau keluarga pembunuh tidak dapat membayarkan unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta, jadi tidak

harus unta yang dibayarkan. Diyat ringan ini mempunyai sifat-sifat berupa :

1. Dendanya dibagi lima,
2. Pembayaran dilakukan oleh keluarga,
3. Pelaksanaan pembayaran selama 3 tahun dengan angsuran,
4. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang sebesar harga unta.

Pembunuhan tidak sengaja dengan diyat ringan akan berubah sifat hukumnya menjadi diyat berat kalau pembunuhannya dilakukan :

1. Di Mekah,
2. Terjadinya pembunuhan pada bulan haram (bulan-bulan Zulka'idah, Muharam dan Rajab),

3. Kalau yang terbunuh adalah muhrim dari pembunuh.

Selain dari tiga hal di atas, maka kalau yang terbunuh seorang wanita, maka denda yang wajib dibayarkan hanya setengah dari denda terbunuh pria. Dan kalau yang terbunuh seorang beragama Yahudi atau Nasrani, maka denda yang wajib dibayarkan hanya sepertiga dari terbunuh orang Islam. Kalau terbunuh seorang Majusi, maka denda yang wajib dibayarkan sebesarsepelimabelas dari korban beragama Islam.

3. *Tidak ada kehendak kesengajaan*, melakukan perbuatan menyakiti orang seperti memukul yang mengakibatkan kematian. Perbuatan seperti itu lazim dinamakan penganiayaan berat berakibat kematian.

Hukuman bagi pelakunya tidak diwajibkan qisas melainkan wajib membayarkan diyat berat. Tetapi pelaksanaan diyat ini

justru diangsur dalam waktu tiga tahun yang dibayarkan kepada keluarga korban

Dalam suatu penganiayaan yang berakibat cacat tetap bagi korban, maka disempurnakanlah diyat bagi pelakunya sebagai diyat pembunuhan. Penyempurnaan diyat dilakukan terhadap tindakan hukum oleh seseorang dalam berbuat memotong anggota tubuh orang lain sehingga hilang mafaatnya.

Larangan berbuat dan sebagai penganiayaan terhadap orang lain mempunyai sanksi pembalasan. Dasar hukumannya diterangkan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Nasai, yakni Rasulullah telah mengirimkan surat kepada penduduk Yaman, di antara beberapa ketentuan hukum yang diterangkan dalam suratnya mengatakan bahwa “memotong hidung seluruhnya, lidah, dua bibir, dua buah zakar, kemaluan dan mata, wajib diyat sempurna (sebagai pembunuh), dan memotong kaki seperdua diyat”.

Setiap anggota tubuh yang menjadi cedera (tidak sempurna lagi) tidak dapat dikenakan qisas. Tetapi pelakunya wajib membayar pengganti sebagai imbu (tambah). Caranya melalui suatu transaksi tertentu, ada harga patokan seperti jual beli hamba yang mempunyai nilai uang. Patokan itu dilakukan dari awal sebelum cacat harga tubuh itu tinggi dan setelah ada cacat pada bagian tertentu akan menjadi kurang harganya. Kekurangan itulah yang wajib dibayar oleh pelaku penganiayaan sebagai imbu dari harga semula.

Jadi untuk kecederaan seseorang sebagai akibat penganiayaan mempunyai harga imbu tertentu. Dan bagi pelaku penganiayaan itu tidak diwajibkan membayar penuh seperti yang dilakukan dalam penganiayaan berat tidak mematikan

korban. Sedangkan pembayaran imbuhan sebagai sanksi hukuman itu hanya sebagai penutup kekurangan pada tubuh korban.

Dari kitab jinayat ini dapat dilihat bahwa hukum pembunuhan pada dasarnya mempunyai sanksi di akhirat yang tidak dapat diampuni sebagai janji Allah dan sanksi dunia dengan balas setimpal bagi pelakunya. Sedangkan hukuman penganiayaan pada dasarnya mempunyai sanksi hukum pembalasan yang sama dengan derita yang dialami korban selain denda ringan yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya.

3. Kitab Hudud

Hudud berasal dari kata HAD yang menurut ucapannya berarti pagar, larangan, batas, tapal atau dinding. Di dalam fiqh Islam disebutkan bahwa kata hudud berarti hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan bagi orang menjalankannya kalau melanggar larangan-larangan tertentu.

Dilihat dari dua arti ini menunjukkan bahwa kalau terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dan memenuhi ketentuan-ketentuan larangan tertentu, maka pelakunya dikenakan hukuman. Dasar larangan yang mempunyai sanksi hukum itu ada lima. Rinciannya sebagai berikut :

1. Larangan I, Zina.

Zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki samapai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Pengertian zina sebagai perbuatan hubungan seks antara pria dan wanita ini mempunyai batas syarat-syarat tertentu dan tidak sama dengan hubungan seks yang disahkan oleh hukum (suami-istri).

Syarat-syarat agar hubungan seks itu dinamakan zina, ialah :

1. Ada keinginan dari kedua belak pihak,

2. Diwujudkan dalam persetubuhan,
3. Memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sampai batas optimal,
4. Kedua-duanya bukan suami istri (prai-wanita yang diharamkan)

Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, maka perbuatannya disebut perzinaan, dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukum.

Tetapi kalau perbuatan seorang pria memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan seorang mayat wanita atau ke dalam kemaluan istrinya yang sedang berhalangan (haid) atau ke dalam kemaluan hewan betina walaupun diharamkan oleh agama, tetapi tidak dikenakan sanksi hukum badan.

Jadi zina akan mendapat sanksi hukum kalau dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis kelamin yang memenuhi syarat-syarat larangannya. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu :

1. *Muhshan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Perbuatan zina yang dimaksud ini merupakan perbuatan pria dengan wanita yang mempunyai pasangan hidup. Jadi suatu perbuatan penyelewengan yang tidak diketahui oleh pasangan sahnya, tetapi berbuat seolah-olah sebagai pasangannya sendiri.

Bagi pelaku zina yang sudah mahshan ini dikenakan sanksi hukum rejam. Rejam adalah pelemparan dengan batu sampai meninggal dunia.

Pasal hukum rejam dalam Al-Quran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar (Khalifah ke 2) pernah melihat Nabi

Muhammad memerintahkan perejaman bagi muhshan (riwayat Buchari, Muslim, Abu Daud, Tarmidzi).

2. *Tidak muhshan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Maksudnya hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita itu kedua-duanya tidak memenuhi syarat-syarat muhshan. Hukuman bagi pelakunya berupa dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

Pasal hukum dari penderaan ini dicantumkan dalam **Surah (24) An-Nur ayat 2** yang menyatakan “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali deraan, dan janganlah kamu dikalahkan dalam (menjalankan) agama Allah oleh kasihan mereka berdua, jika (benar) kamu beriman kepada dan hari Kemudian, dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh golongan dari Mukmin”.

Sedangkan hukum dera bagi hamba-hamba yang melakukan perzinaan dalam keadaan tidak muhshan hanya setengah dari orang merdeka. Pasal hukumnya dicanntumkan dalam **Surah (4) An-Nisa ayat 25** menyatakan “Atas hamba-hamba perempuan yang berzina hukunya seperdua hukuman perempuan yang merdeka” (anak kalimat terakhir).

Tetapi perzinaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (belum baliq) antar sesamanya atau orang gila tidak dikenakan hukuman. Dan bagi homoseks atau lesbian hukuman yang wajib dijalankan seperti zina.

2. Larangan II, Menuduh orang berzina

Menuduh orang berzina dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kebenaran tuduhannya termasuk suatu larangan. Maksudnya kalau seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan

tuduhannya itu tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang diperlukan untuk suatu tuduhan perzinaan, maka penuduhnya dikenakan sanksi hukum. Hal ini disebabkan tuduhannya termasuk perbuatan fitnah yang dapat merusak nama baik orang yang dituduh. Sedangkan sanksi hukumnya berupa penderaan sebanyak 80 kali. Ketentuan pasal hukumnya dicantumkan dalam **Surah (24) An-Nur ayat 4** menyatakan “Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina kemudian mereka tidak mengahdirkan empat saksi, maka deralah mereka delapanpuluh kali deraan”.

Deraan yang dimaksud dalam surah ini dijalankan oleh seorang penuduh kalau benar-benar tidak dapat menggagalkan sanksi hukumannya. Dan kalau penuduh dapat memenuhi jalan sebagai syarat untuk menghindarkan deraan, maka hukuman itu tidak boleh dijalankan. Adapun syarat-syarat hukum dera sebanyak 80 kali itu, ialah :

1. Penuduh sudah baliq, berakal dan buakn ibu-bapak, nenek dan setrusnya dari yang tertuduh,
2. Tertuduh beragama Islam, baliq, berakal, merdeka dan orang baik-baik.

Sedangkan untuk menghindarkan hukum dera sebanyak 80 kali itu kalau :

1. Penuduh dapat menghadirkan saksi empat orang dan menerangkan bahwa tertuduh betul berzina,
2. Penuduh dimanfaatkan oleh tertuduh,
3. Penuduh yang menuduh istrinya berzina melakukan cerai Li'an.
3. Larangan III. Meminum minuman keras yang memabukkan.

Kehidupan sehari-hari seseorang yang terbiasa meminum minuman keras akan menimbulkan kelainan fisik dan psikisnya.

Bagi seseorang yang kecanduan minuman keras lama kelamaan akalnya kurang tajam yang dapat berakibat

menimbulkan kehilangan akal. Sedangkan akal bagi manusia itu mempunyai kegunaan yang penting yang perlu dipelihara dengan baik. Kalau akal tidak dipelihara apalagi kurang sehat akibat keracunan alkohol tentu tingkah laku orangnya pun juga sakit.

Untuk menghindarkan semua manusia hidup di dunia ini dalam keadaan sakit akal, maka bagi peminum minuman keras yang memabukkan dikenakan sanksi hukum. Dan sanksi hukumnya berupa penderaan sebanyak 40 kali.

Pasal hukum dasar dari sanksi larangan ini dicantumkan dalam **Surah (5) Al-Maidah ayat 90** yang menyatakan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, sembelihan-sembelihan untuk berhala, dann undi-undi nasib itu kotor termasuk pekerjaan setan. Karena itu hendaklah kamu jauhi supaya kamu dapat kejayaan”.

Seedangkan pasal hukum pelaksanaan dari hukum dasar itu ada dalam hadits nabi, riwayat Muslim, menyatakan “Bahwasanya Rasulullah telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamar sebanyak empatpuluh kali”.

Selain dari minuman keras yang mempunyai sanksi hukum, maka secara analogis yang mempunyai sifat sama dengan berdasarkan titik tolak pengertian “menghilangkan akal” manusia, yaitu berupa makanan.

Makanan yang dapat merubah akal seseorang seperti candu, heroin dan sejenisnya mempunyai sanksi hukum sama dengan minuman keras yang memabukkan. Dan yang terakhir ini justru kalau dilihat dari kenyataan yang terjadi lebih berbahaya dari minuman keras.

4. Larangan IV, Mencuri

Mencuri adalah mengambil hak milik orang lain dengan diam-diam dari tempat benda yang biasanya berada.

Suatu perbuatan “mengambil” tanpa izin dari pemiliknya dalam pengertian yang dimaksud itu, berarti bagi pelakunya telah mengurangi harta kekayaan dari orang lain yang tidak direlakan. Dan akibatnya timbul kerugian bagi pemilik karena ketidakridhoan melepaskan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain.

Firman Allah dalam **Surah (5) Al-Maidah ayat 38** menyatakan “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka usahakan, dan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan adalah Allah itu Maha Kuasa, Bijaksana”.

Dari surah ini menunjukkan bahwa perbuatan mencuri yang dilakukan oleh seseorang mempunyai sanksi hukum berupa pemotongan tangan bagi pelakunya. Tetapi untuk dapat menjalankan hukuman potong tangan bagi pelakunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik pelaku pria maupun pelaku wanita. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Sudah baliq, berakal dan atas kehendaknya sendiri,
2. Barang curian memenuhi nisabnya, minimal seberat 93,6 gram emas yang diambil dari tempatnya.

Da seelain dari syarat-syaratnya harus dipenuhi juga ada saksi cukup atau atas pengakuan pelakunya sendiri. Sedangkan perbuatan mencuri yang tidak di beri sanksi hukum potong tangan kalau pelakunya seorang anak di bawah umur, orang gila, orang yang dipaksa mencuri oleh orang lain, anak mencuri harta orang tua atau sebaliknya, pencurian antar suami-istri, dan orang miskin yang mencuri dari Baitulmal.

5. Larangan V, Merampok

Merampok sebenarnya termasuk perbuatan mencuri yang dilakukan dengan nyata dari dan atau atas sepengetahuan pemilik dengan jalan kekerasan. Dan perbuatan dengan jalan kekerasan ini dapat berakibat kerugian atau tidak bagi pemilik.

Kerugian atas suatu perampokan yang selesai dapat berupa kematian dengan hilangnya barang, kematian pemilik tanpa hilangnya barang atau pemilik tetap hidup dengan hilangnya barang. Di samping itu ada juga suatu perbuatan ancaman perampokan, tetapi kerugiannya hanya kekhawatiran diri.

Hukuman bagi perampok sesuai dengan berat ringannya akibat hukum yang terjadi atas suatu perampokan.

Firman Allah dalam **Surah (5) Al-Maidah ayat 33** menyatakan “Tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan rusuh di bumi melainkan dibunuh mereka, disalib mereka atau bersilangan atau dihalau mereka dari bumi”.

Dari surah ini nampak tentang berat ringannya sanksi hukum yang wajib dijalankan oleh pelaku perampokan, apakah dibunuh, dipotong tangan kakinya atau diasingkan (dipenjara). Perampokan itu dapat terjadi dalam empat macam, yakni :

1. Membunuh orangnya dan merampok harta bendanya. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam satu peristiwa hukummelibatkan dua tindak pidana yang terjadi kalau perampok membunuh orangnya dan mengambil barang-barangnya. Peristiwa hukumnya dilakukan dengan tahapan, yaitu perampok itu lebih dahulu membunuh pemilik barang yang hendak dirampok kemudian setelah selesai ia mengambil barangnya untuk dimiliki. Atas perbuatan itu pelakunya dikenakan sanksi hukum berupa hukuman wajib bunuh dia kemudian disalib (dijemur).

2. Membunuh orangnya dan tidak merampok harta bendanya. Kalau tindak pidananya berupa pembunuhan saja dan barangnya tidak diambil, maka pelakunya hanya menjalankan satu hukuman saja. Hukuman wajib itu berupa pelaksanaan qisas.
3. Orangnya tidak dibunuh dan harta bendanya dirampok. Perbuatan semacam ini sama dengan pencurian. Perbedaannya hanya terletak pada kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya dikenakan hukuman potong tangan kanan dan kaki kirinya.
4. Mengancam akan merampoknya. Perbuatan akan mengancam akan merampok seseorang termasuk tindakan pidana yang tidak selesai. Tetapi ada akibat psikologis bagi terancam. Dirinya ada dalam keadaan rasa takut terus menerus. Karena itu bagi pengancam dikenakan sanksi hukum dipenjara atau sanksi hukum lain sehingga ada rasa takut untuk mengulangi perbuatannya itu.

Bagaimanakah kalau pelaku perampokan itu melakukan tobat setelah selesai perbuatannya?

Surah (5) Al-Maidah ayat 34 menyatakan “Melainkan orang yang bertobat sebelum kamu dapat tangkap mereka. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Pengampun, Penyayang”.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam surah ini, maka ada pengurangan hukuman bagi perampok yang bertobat. Dan pengurangannya terletak pada hak Allah saja. Sedangkan hak pada manusianya tetap wajib dijalankan oleh perampok itu. Dan pengurangan hukuman itu sebagai berikut :

1. Perampok yang membunuh orangnya dan mengambil barangnya kalau benar-benar bertobat sebelum tertangkap, maka gugurlah hukuman salibnya (dijemurnya). Sedangkan hukuman bunuh

sebagai akibat kematian pemilik barang yang dirampok tergantung qisas atau pemanfaatan dari ahli waris korban.

2. Perampok yang membunuh orangnya dan tidak mengambil barangnya kalau benar-benar bertobat sebelum ditangkap, maka gugurlah hukuman wajib dibunuh. Sedangkan diyat atau pemaafaan tergantung dari ahli waris korban.
3. Perampok yang tidak membunuh orangnya dan hanya mengambil barang pemilik terampok kalau benar-benar bertobat sebelum ditangkap, maka gugurlah hukuman potong kaki. Sedangkan hukuman potong tangan tetap wajib dijalankan.

Jadi maksud dari pengurangan hukuman terhadap perampok yang selesai melakukan tindak pidana perampokan itu untuk menjaga hubungan antar manusia selama hidup agar benar-benar mau berdamai sesamanya.

4. Pembelaan Diri

Perbuatan hukum yang dapat merugikan jiwa dan harta benda orang baik pencurian maupun perampokan bagi calon korban diperkenankan melakukan pembelaan diri. Perbuatan melakukan pembelaan diri dari segala ancaman kejahatan itu dibenarkan oleh hukum.

Surah (2) Al-Baqarah ayat 195 menyatakan “Dan janganlah kamu biarkan dirimu jatuh dalam kebinasaan”. Dari surah ini dimaksudkan bahwa dalam menhadapi musuh Allah, maka orang berusaha jangan sampai dibinasakannya. Dan usaha mempertahankan dari orang-orang yang menyerangnya itu yang disebut dengan “pembelaan diri” yang dibenarkan oleh hukum.

Jadi kalau ada orang menyerangnya dan melakukan penganiayaan janganlah tinggal diam melainkan hendaknya membela agar tidak menjadi korban penyerangan itu.

Pembelaan diri itu dapat disebabkan hendak membela diri sendiri, keluarga dan atau harta kekayaan yang dimiliki. Pelaksanaannya dilakukan terhadap orang yang menyakiti fisik dengan niat suatu pembunuhan, penganiayaan ataupun perampokan harta kekayaan.

Pembelaan diri terhadap perbuatan seseorang dengan niat yang tidak baik itu hendaknya dilakukan dalam keadaan terpaksa. Pembelaan dalam keadaan terpaksa artinya tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menghindarkan diri, dan kalau dilawan sampai berakibat kematian musuh, maka dirinya tidak dikenakan hukuman dunia akhirat. Pasal hukumnya dicantumkan dalam **Surah (42) As-Syura ayat 41** menyatakan “Dan sesungguhnya orang-orang yang membalas sesudah dianiaya itu tidak ada jalan buat diapa-apakan mereka”.

Jadi jelas bahwa perbuatannya tidak berdosa dan tidak diqisas karena membela diri. Hanya saja cara membela diri itu hendaknya dilakukan dengan tertib. Maksudnya, kalau ada serangan dari orang jahat semula dihindarkan. Misalnya dengan memberi peringatan. Apabila tetap tidak dihiraukan dan tetap memukul, maka balaslah dengan pukulan pula. Dan kalau pembalasan seperti itu tidak mengakibatkan dirinya terbela, maka dapat menggunakan alat yang lebih berat. Yang penting dalam pembelaanya itu dilakukan secara bertahap. Dapat menggunakan senjata tajam ataupun senjata api dan apa saja yang berguna untuk pembelaannya.

BAB VIII

AQDHIYAH

(HUKUM-HUKUM PENGADILAN)

1. Peradilan Agama Pada Umumnya

1.1. *Pengertian Aqdhiyah*

Masyarakat Arab sebagai bagian dari bangsa Semit memiliki hukum Adat seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Di dalam kehidupan masyarakat Adat ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuknya sendiri yang ditaati secara turun temurun.

Untuk mengatur kehidupan damai antara sesama individu selain hukum material, maka dalam mempertahankan keutuhannya juga berlaku hukum formal. Dan hukum formal ini merupakan realisasi penyelesaian atas penyelenggaraan ketentuan-ketentuan hukum material di dalam lingkup kehidupan masyarakat. Maksudnya, kalau terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan aturan penyelesaian yang dirasakan kurang adil antar para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan menurut tata cara hukum formal yang berdiri dalam satu wadah tertentu. Wujud pelaksanaan hukum formal inilah, sebagai satu wadah tersendiri, dikenal dengan sebagai “lembaga peradilan”.

Jadi bagi masyarakat Arab pada zaman Pra Islam telah mengenal lembaga peradilan yang fungsinya menyelesaikan perselisihan antar para anggota masyarakat. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah digunakan Adat-istiadatnya secara turun temurun. Tetapi ketika masyarakat Arab mengalami krisis sosial yang dikenal dengan sebutan zaman “jahiliyah” setiap perselisihan yang terjadi pada umumnya diselesaikan oleh penguasa yang berkuasa sewenang-wenang. Dan penguasa waktu itu mempunyai kelompok dengan

kekuatannya sendiri yang dapat merubah aturan apapun juga untuk kepentingannya termasuk keimanan. Akibatnya banyak masyarakat yang menjadi korban, dan berarti keadilan yang didambakan tidak pernah berwujud dalam keadaan nyata secara menyeluruh.

Setelah Muhammad ditugaskan oleh Allah sebagai Rasulullah dan denagn wahyu-wahyu-Nya secara bertahap berwujud lagi rasa keadilan masyarakat. Setiap perselisihan yang timbul diselesaikan dengan qadhi (hakim). Dan pada waktu itu yang bertindak sebagai qadhi Nabi Muhammad sendiri yang melakukannya atas petunjuk Allah. Cara-cara penyelesaian masalah inilah yang kemudian yang menjadi pedoman oleh para khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Sedangkan pedomannya dikenal dengan sebutan “hukum-hukum pengadilan (aqdhiyah)”. Pelaksanaannya dilakukan dalam lembaga peradilan yang dibentuk dengan sengaja agar masyarakat menggunakannya untuk memperoleh keadilan.

Kata “hukum” memberikan petunjuk untuk memisahkan atau mendamaikan antar dua pihak atau lebih yang berselisih berpedomankan kehendak Allah. Sedangkan kata “peradilan” (Al-Qadla) berarti menyelesaikan, memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya. Dan dalam fiqh Islam dikemukakan bahwa peradilan itu merupakan suatu badan yang menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum (kehendak) Allah sebagai dasar, dijalankan oleh orang yang mempunyai kekuasaan umum.

Jadi hukum-hukum pengadilan (Aqdhiyah) itu adalah tempat mendamaikan perselisihan antar manusia melalui hukum Allah.

1.2. *Lembaga Peradilan*

Mendamaikan perselisihan yang terjadi antar manusia dapat dilakukan oleh siapapun juga yang mampu untuk

melaksanakannya. Tetapi belum tentu dapat menentramkan para pihak secara psikologis untuk selama-lamanya.

Dua firman Allah menyatakan :

1. **Surah (5) Al-Maidah ayat 49** : “Dan hendaknya engkau hukumkan antar mereka dengan apa yang Allah telah turunkan”.
2. **Surah (4) An-Nisa ayat 58** : “... dan apabila kamu menghukum di antara manusia, supaya kamu hukum dengan adil...”

Dari dua surah ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad sebagai hakim (qadhi) dan membimbing masyarakat tentang cara-cara melangsungkan peradilan. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, maka pelaksanaan peradilan itu dilanjutkan oleh para khalifah. Demikian selanjutnya bahwa perkembangan adanya Negara Islam, maka kepala negaranya tidak mungkin dapat menangani sendiri setiap perkara. Sejak itulah qadhi diserahkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat dan membenntuk wadah dalam lembaga peradilan mandiri. Sedangkan pasal-pasal hukum yang dijadikan pedoman dari lembaga peradilan itu, selain dua pasal hukum terdahulu, dicantumkan dalam :

1. **Surah (38) Shad ayat 26** menyatakan : “Hai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah keputusan bagi manusia dengan benar, dan janganlah engkau turut hawa nafsu, karena nanti ia sesatkanmu dari jalan Allah”.
2. **Surah (4) An-Nisa ayat 105** menyatakan : “Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Kitab (ini) dengan (membawa) kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia dengan (faham) yang Allak unjukkan kepadamu, dan

janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat”.

Dengan mempedomankan kepada dua surah terdahulu dan dua surah yang terakhir ini, maka suatu lembaga peradilan dibentuk dan dipimpin oleh seorang hakim (qadhi). Kepadanyalah dipercayakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang diajukan oleh orang-orang sebagai peminta/mengharapkan keadilan.

Orang yang berhak menjabat hakim kalaau dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi seorang hakim sebagai berikut :

1. Beragama Islam,
2. Baliq dan berakal,
3. Merdeka,
4. Adil,
5. Laki-laki,
6. Mengerti ayat-ayat Quran dan Hadits,
7. Mengetahui Idjma' dan menjalankan Qiyas,
8. Mengetahui bahasa Arab,
9. Baik pendengaran dan penglihatan.

Dilihat dari syarat-syarat seperti yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa seorang hakim merupakan pemimpin, kadudukannya mulia dan tinggi. Karena itu seorang hakim wajib memiliki budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti yang baik itu ditunjukkan melalui sikapnya yang terbuka antara lain dengan :

1. Berkantor di tempat yang mudah diketahui masyarakat,
2. Tidak memihak bagi yang berperkara,
3. Tidak memberikan keputusan perkara dalam keadaan :
 - a. Marah,
 - b. Sangat lapar dan haus,

- c. Sangat susah atau gembira,
 - d. Sedang sakit.
4. Tidak boleh menerima pemberian kecuali dari orang biasa memberikan hadiah yang tidak dalam keadaan perkara,
 5. Berhak meminta keterangan dalam sidang,
 6. Tidak boleh memberikan petunjuk tentang cara-cara menuduh dan membela,
 7. Dalam melakukan surat menyurat dengan hakim diluar wilayahnya tentang hukum mengenai isinya harus diketahui oleh dua orang saksi.

Sikap keterbukaan seperti ini sangat sulit dimiliki oleh seseorang. Tetapi untuk mewujudkannya bagi pemimpin tidak akan menimbulkan kesulitan.

1.3. Proses Peradilan

a. Kewenangan Hakim

Hakim bertugas menyelesaikan masalah hukum atas permintaan yang diajukan oleh seseorang. Dan hakim itu berhak mengadili hanya di daerah kewenangannya saja. Kewenangan mengadili di daerah tertentu itu atas tugas penguasa yang mengangkatnya. Akibatnya, masing-masing hakim dalam menjalankan tugasnya bervariasi. Misalnya :

1. Hakim hanya berwenang memutuskan perkara dari penduduk yang menetap di daerahnya,
2. Ada hakim yang berwenang memutuskan perkara dari penduduk daerahnya dan pendatang,
3. Ada hakim yang berwenang menyelesaikan perkara hanya satu jenis hukum saja, seperti hukum perdata atau hukum pidana saja, apabila telah ditentukan jenis hukumnya,

maka bagi jenis hukum yang lain tidak sah memeriksanya walaupun terjadi di daerah kewenangannya,

4. Ada hakim yang berhak menyelesaikan hanya satu perkara saja, dan kalau sudah selesai, maka tugas menjadi hakim juga selesai,
5. Hakim diangkat dengan pembatasan perkara tertentu, misalnya tidak boleh menerima perkara yang sudah kadaluarsa atau tidak boleh menerima perkara dari seorang suami yang berusia di bawah 18 tahun dan istrinya di bawah 16 tahun,
6. Beberapa hakim diangkat bersama-sama untuk menyelesaikan suatu perkara dan tidak boleh mendeengarkan pengakuan atau memutuskan perkara seorang diri.

Dari variasi itu menunjukkan agar jangan sampai terjadi kejenuhan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan perkara yang ditangani terdiri atas tindak pidana kejahatan, pelanggaran (larangan), peristiwa perdata kecuali terhadap benda dan hak tertentu. Bagi kedua peristiwa hukum yang terakhir ini pemiliknya dapat langsung mengambil kembali dari yang menguasai.

b. Proses penyelesaian perkara

Kalau ada suatu perselisihan, maka mudda'I yang dirugikan mengajukan gugat kepada mudda'a alaihi melalui hakim pengadilan. Gugat berasal dari bahasa Arab Dakwa, artinya permintaan/pengharapan. Kata mudda'I berarti orang yang menuntut hak (penggugat). Sedangkan mudda'a alaihi orang yang dituntut (tergugat).

Suatu dakwa akan diterima oleh hakim kalau menuntut hak dan membela haknya dari orang lain. Dan hakim dalam memeriksa perkara itu mempertimbangkan akan disidangkan terbuka atau tertutup. Hakim perkara boleh mengikutsertakan beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusan.

Pada hari yang telah ditentukan mudda'I dan mudda'a atau wakil-wakilnya dimintakan hadir dalam persidangan. Bagi gugatan yang telah ada hakim dapat memaksakan mudda'a menjawabnya.

Dalam pemeriksaan perkara dapat membenarkan atau menolak dakwaan. Dan kalau menolak diwajibkan bagi mudda'a untuk mengajukan pembuktian.

c. Pembuktian

Pembuktian dalam sidang pengadilan itu ada 7, yaitu :

1. Pengakuan (ikrar).

Pengakuan merupakan alat bukti yang terkuat, karena datangnyanya dari mudda'a sendiri. Tetapi ikrar itu diucapkan atau ditulis mudda'a dalam keadaan sehat, berakal, baliq, tidak dipaksakan dan tidak atas pengampunan.

2. Kesaksian (syahadat)

Kesaksian adalah mengemukakan keadaan sebenarnya untuk menetapkan hak dari orang lain. Dasar hukumnya **Surah (4) An-Nisa ayat 135** yang menyatakan bahwa “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah”.

Untuk memberikan kesaksian yang dapat dijadikan pembuktian kuat wajib memenuhi syarat-syarat tertentu berupa :

Diri orangnya beragama Islam, baliq, berakal, merdeka, adil (menjauhi dosa, baik hati, dapat dipercaya, menjaga kehormatan) dan bukan musuh terdakwa. Sedangkan jumlah saksi dalam suatu perkara dibutuhkan :

- a. 4 orang laki-laki dalam perkara zina,
 - b. 3 orang laki-laki dalam perkara seorang kaya yang menjadi pailit,,
 - c. 2 orang laki-laki dalam perkara hudud selain zina dan pembunuhan,
 - d. 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita untuk perkara hutang piutang,
 - e. 1 orang laki-laki ditambah sumpah penggugat untuk perkara harta benda,
 - f. 4 orang wanita untuk perakara yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki seperti kelahiran bayi, keperawanan, menyusukan, haid, cacat wanita.
3. Sumpah (yamin)
- Sumpah hanya diucapkan oleh tergugat kalau menolak gugatan sedangkan penggugat tidak dapat menghadirkan saksi. Dan sumpah tidak sah kalau tidak dilakukan atas nama Allah. Karena itu bagi orang yang diharuskan bersumpah bagian lafaznya diejakan oleh petugas sumpah. Penyumpahan terhadap seseorang hanya dilakukan bagi perkara-perkara perdata.
4. Penolakan sumpah
- Kalau tergugat menolak sumpah, maka dapat dimintakan agar penggugat yang mengucapkan sumpah. Dan kalau kedua-duanya menolak mengucapkan sumpah perkaranya diputuskan oleh hakim tanpa sumpah.
5. Sumpah limapuluh orang (dasamah)

Kalau terjadi kematian seseorang akibat pembunuhan dan pelakunya tidak diketahui, maka untuk pembenaran dapat dilakukan sumpah oleh 50 orang. Dan untuk dapat diterima bahwa korban meninggal dunia akibat pembunuhan, maka wali korban dapat menunjuk 5 orang penduduk kampung yang dicurigai agar bersumpah bahwa dirinya tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya.

d. Keputusan hakim

Seseorang hakim dalam memberikan keputusan jangan sampai bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hadits riwayat Buhari dan Muslim menyebutkan “Dari Amr bin ‘Ash bahwasanya ia mendengar Rasul bersabda “Apabila qadhi akan memutuskan perkara dan ia beridjtihat kemudian iia ternyata benar, maka baginya mendapat dua pahala. Dan apabila ia akan memutuskan perkara lalu ia beridjtihat kemudian ternyata salah, maka baginya satu pahala”.

Jadi kalau dilihat dari hadits ini menunjukkan bahwa benar salahnya putusan hakim melalui idjtihatnya akan tetap memperoleh pahala. Hakim diwajibkan untuk segera memberikan putusan atas suatu perkara. Kelambanan memberikan putusan kalau :

1. Hakim ingin memperhatikan lebih jauh tentang pembuktian yang diberikan oleh saksi,
2. Memberikan kesempatan untuk berdamai antar para pihak,
3. Menerima permintaan tergugat untuk mencari bukti sebagai penolakan terhadap gugatan,
4. Mengabulkan permintaan penggugat,
5. Hakim ingin mempertimbangkan keputusan.

Putusan hakim yang berupa perkataan dan tindakan, seperti mengawinkan anak di bawah umur yang tidak mempunyai wali, dapat juga berupa menerapkan hukum-hukum yang telah ada dan bukan menetapkan suatu hukum.

1.4. *Banding*

Semula putusan seorang hakim tidak diganggu gugat. Tetapi dalam perkembangannya disadari bahwa ada kemungkinan hakim sebagai manusia dapat berlaku khilaf. Karena itu para pihak yang berperkara diberikan hak untuk mengajukan banding.

Banding dalam suatu perkara ditangani oleh Qadhi Qudhah, yaitu yang ditunjuk dan berwenang meninjau kembali putusan hakim bawahannya. Isi putusan banding dapat berupa :

1. Memperkuat, jika putusan terdahulu benar,
2. Menolak (merubah), jika putusan terdahulu tidak sesuai hukum dalam arti :
 - a. Berlawanan dengan Idjma',
 - b. Berlawanan dengan Hadits,
 - c. Berlawanan dengan Qiyas.

2. Peradilan Agama di Indonesia

2.1. *Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama*

Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia secara historis antropologis terutama unsur budaya mengenai “religi dan upacara keagamaan” melibatkan adanya bermacam-macam agama. Dan agama yang paling cepat berkembang penganutnya adalah agama Islam. Hal ini nampak bahwa sejak memasuki abad ke-16 bangsa Indonesia yang beragama Islam mayoritas lebih banyak dari agama lainnya. Tetapi walaupun demikian anggota masyarakat itu tetap

berbaur dalam satu kesatuan bangsa tanpa membedakan agama dan adat istiadat masing-masing.

Setelah bangsa Belanda mulai menjajah Indonesia, mereka yang bergerak dalam bidang ilmu hukum melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku bagi orang-orang bumiputra. Penelitian dilakukan karena adanya hukum asal bumiputra sehingga orang Belanda tidak dapat membedakan. Hasil penelitian yang dilakukan di Semarang sebagai buku hukum tidak berbeda dengan yang dihasilkan di Cirebon. Buku hukum (kompendium) yang di Semarang disebut Kompendium Frejer dan di Cirebon bernama Pepakem Cirebon. Isinya mengenal hukum keluarga bidang aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam.

Akibat dari hasil penelitian itu hukum Adat dalam bidang hukum keluarga tidak pernah mau dirubah atau dihapus, karena merupakan hukum agama. Dan memang dalam kenyataan pergaulan hukum masyarakat, sebelum Belanda datang, hukum Islam bidang munakahat, waris, dan wakaf di daerah-daerah tertentu sudah menjadi hukum positif. Karena itu untuk menghormati berlakunya hukum positif Indonesia lahirilah Ketentuan Pasal 75 Regerings Reglement (RR) dengan dicantumkan berlakunya hukum Adat bagi golongan Bumiputra. Selanjutnya untuk mewujudkan pelaksanaan atas Pasal 75 RR pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan S. 1882 : 152, tentang Peradilan Agama yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Pelaksanaan dari peraturan itu tidak menyimpang dari peraturan tidak tertulis yang sudah lama berlaku bagi kehidupan orang-orang Islam. Kemudian penyempurnaan atas peraturan itu dilakukan melalui S. 1937 : 116 dan S. 1937 : 610. dan penyempurnaan itu

secara tetap melahirkan lembaga pengadilan agama dalam dua tingkat, yaitu :

1. Pre-esterraad (Raad Agama) dan
2. Hof voor Islamietische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi).

Peradilan ini diperuntukkan bagi setiap orang Islam.

Sedangkan wewenangnya menyelesaikan perkara perdata bidang hukum keluarga meliputi nikah, talak, rujuk, waris dan waqaf.

Bagi orang-orang Islam di luar Jawa dan Madura seementara dibiarkan mengatur dan menyelesaikan perkara yang dihadapi sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing daerah. Tetapi untuk sebagian Kalimantan sejak tahun 1937 dikeluarkan S. 1937 : 638 dan S. 1937 : 639, tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar di sebagian Residen Kalimantan Selatan Dan Timur. Lembaga peradilan inipun tugasnya juga menyelesaikan perkara perdata bidang hukum keluarga yang sama dengan lembaga peradilan agama di Pulau Jawa Dan Madura. Dan pembentukan lembaga peradilan agama oleh Pemerintah Hindia Belanda itu ketentuan hukumnya yang baru serta berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 juga dianggap sebagai konstitusi dasar, sebagai pengganti RR, yaitu Indische Staatsregeling (IS), pasal hukmnya dalam Pasal 134 IS.

Setelah Indonesia merdeka, berpedomankan kepada dasar hukumnya Pasal 134 IS untuk pembentukan lembaga peradilan yang sama dengan di Pulau Jawa dan Madura, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 99). Dengan demikian berarti peraturan pemerintah Hindia Belanda dalam S. 1937 : 638 tidak berlaku lagi.

Bertitik tolak kepada pemikiran pemerintah Hindia Belanda dan tidak menyimpang dari Falsafah Pancasila serta Undang-undang dasar 1945, maka untuk mewujudkan cita-cita Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai perwujudan 4 lembaga peradilan Indonesia, diundangkan tanggal 29 Desember 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49). Berarti sejak tanggal 29 Desember 1989 Indonesia telah memiliki 4 lembaga peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Militer,
3. Peradilan Agama,
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

2.2. *Ruang Lingkup Peradilan Agama*

Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Melihat pada ketentuan pasal ini memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup peradilan agama dalam wewenang menyelesaikan perkara hanya yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam saja. Dan bagi yang tidak beragama Islam walaupun salah satu pihak beragama Islam bagi Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikannya. Mengenai perkara-perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama juga terbatas kepada perkara perdata tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan perdata tertentu pada Pasal 49 ayat 1 menyebutkan :

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dialkukan berdasarkan hukum Islam,
- c. Waqaf dan shadaqah.

Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 ini juga nampak bahwa kewenangan peradilan agama tidak menangani seluruh hukum Islam positif muamalat dan munakahat melainkan hanya sebagian saja dari kedua bidang hukum itu. Hanya saja untuk menangani perkara perkawinan ada perluasan pengertian yaitu berkenaan dengan hukum keluarga sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang Peradilan Agama ini. Dan proses yang diatur secara rinci dalam Undang-undang Peradilan agama ini berkenaan dengan perkara perceraian saja. Sedangkan masalah keluarga lainnya dapat diajukan dan diselesaikan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.

2.3. Struktur dan pelaksanaan proses

2.3.1. Susunan lembaga peradilan

Peradilan agama Indonesia terdiri atas dua tingkat, yaitu :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama disebut Pengadilan Agama berkedudukan di tiap Kotamadya dan Ibukota Kabupaten sebagai wilayahnya. Sedangkan struktur organisasinya terdiri atas Pemimpin (seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua). Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.
- b. Pengadilan Tingkat Banding disebut Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota Propinsi sebagai wilayahnya. Sedangkan stuktur organisasinya terdiri atas

Pemimpin (Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua), Hakim anggota (Hakim Tinggi), Panitera dan Sekretaris. Pembinaan teknis kepada kedua tingkat pengadilan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Menteri Agama.

Untuk menjadi hakim para Lembaga Peradilan Agama diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang pada dasarnya tidak berbeda dengan syarat-syarat hakim peradilan agama pada umumnya. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
5. Bukan anggota PKI dan ormasnya yang dilarang atau yang terlibat langsung/tidak langsung G.30.S/PKI,
6. Pegawai negeri
7. Sarjana Syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam,
8. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun,
9. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Dan untuk menjadi Hakim Tinggi selain syarat-syarat tersebut juga ada tambahan syarat-syarat, yaitu :

1. Umur serendah-rendah 40 tahun,
2. Berpengalaman :
 - a. 5 tahun sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, atau
 - b. 15 tahun telah menjadi Hakim Pengadilan Agama.

Sedangkan tugas-tugas yang dilakukan oleh aparat pengadilan sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan :

- a. Mengatur berkas-berkas tugas kepada para hakim,
- b. Membagikan berkas-berkas perkara atau surat lainnya yang berhubungan dengan perkara,
- c. Menetapkan perkara yang harus diselesaikan berdasarkan nomor urut. Dan kalau ada perkara yang menyangkut kepentingan umum harus didahulukan.
- d. Mengawasi semua penetapan atau keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dilaksanakan secara sempurna.

2. Panitera Pengadilan :

- a. Menyelenggarakan administrasi perkara serta bertanggung jawab atas kerja administrasi perkara,
- b. Mengatur tugas Wakil Ketua, Panitera Muda dan Panitera Pengganti,
- c. Sebagai kesatuan aparat kepaniteraan membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
- d. Melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan,
- e. Mendaftar dan memberikan nomor urut atas perkara yang diterima serta membuat salinan atas penetapan atas putusan Hakim.

3. Juru Sita :

- a. Melaksanakan semua perintah Ketua Sidang berupa penyampaian pengumuman, teguran, pemberitahuan penetapan atau putusan,
- b. Melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan membuat Berita Acara.

2.3.2. Proses berperkara

Suatu dasar hukum untuk melakukan proses di Pengadilan Agama adalah Pasal 54 yang menyatakan : “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Melihat ketentuan pasal ini pengertiannya menunjukkan agar jangan sampai terdapat dualistis berproses dalam Peradilan Indonesia. Maksudnya berproses pada pengadilan agam diberlakukan peraturan proses yang berlaku pada Peradilan Umum kalau tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang Peradilan Agama. Sedangkan peraturan proses yang berlaku pada Peradilan Umum adalah Reglement Indonesia Baru (R.I.B). Dan proses yang dianut oleh Peradilan Agama antara lain, ialah :

- a. Ada penggugat yang mengajukan permohonan atau gugatan kepada tergugat,
- b. Hakim memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang selalu dihadiri oleh panitera,
- c. Pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup. Dan selama pemeriksaan berlangsung terbuka bagi para pihak untuk berdamai,
- d. Setelah pemeriksaan selesai Hakim dapat memberikan penetapan ataupun putusan,
- e. Setiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2.3.3. *Sengketa perkawinan*

Ketentuan-ketentuan yang diatur rinci dalam Undang-undang Peradilan Agama berkenaan dengan perceraian setelah usaha perdamaian tidak berhasil. Perkara perceraian yang diproses ada 3 macam, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina. Ketiga macam perceraian ini ketentuan-ketentuannya diatur dalam Pasal 88. penyelesaian perkara melalui ketiga macam perceraian ini sebagai berikut :

1. Cerai talak

1.1. Permohonan

- a. Permohonan diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya. Untuk permohonan itu pengadilan harus mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami ditujukan kepada pengadilan tempat kediaman termohon kecuali kalau termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Dan yang dengan termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman itu kalau ia tidak ada di tempat kediaman asal atau bertempat kediaman di luar negeri. Tetapi kalau pemohon dan termohon ada di luar negeri, maka permohonannya diajukan di daerah pengadilan tempat asal perkawinan berlangsung atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- c. Dalam permohonan dapat dicantumkan juga mengenai permohonan hadanah anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama atau kesemuanya itu dilakukan setelah ikrar talak diucapkan.

1.2. Proses persidangan

- a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim. Sedangkan waktu pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan didaftarkan di Kepaniteraan. Dan sidang pemeriksaannya dilaksanakan tidak terbuka untuk umum.
- b. Sejak sidang pertama Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Kalau perdamaian yang ditawarkan Hakim tidak dapat dilakukan dan pengadilan menganggap cukup alasan perceraian, maka permohonan cerai talak itu dikalbulkan melalui penetapan. Dan atas penetapan ini istri berhak mengajukan banding.
- c. Selama banding belum ada putusan, maka bagi para pihak tetap sebagai suami istri. Tetapi kalau tidak menggunakan hak bandingnya atas penetapan cerai dari Hakim, berarti penetapan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga halnya kalau banding istri ditolak oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama, maka penetapan cerai sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kemudian pengadilan akan menentukan hari sidang penyaksian “ikrar talak”.

Pada hari sidang penyaksian ikrar talak suami istri atau kuasanya masing-masing pihak wajib hadir. Dan ikrar talak diucapkan oleh suami atau kuasanya. Tetapi kalau sidang itu tidak dihadiri oleh istri atau kuasanya, maka pengucapan ikrar talak dapat dilakukan suami tanpa kehadiran istri atau kuasanya. Hal ini dibenarkan oleh Undang-undang.

Kalau sebaliknya suami atau kuasanya tidak hadir, maka sidang untuk mengucapkan ikrar talak diundurkan. Dan ketidakhadiran suami atau kuasanya itu masih dibearkan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan sidang ikrar talak. Kalau tenggang waktu itu dilampaui sedangkan suami atau kuasanya tidak hadir juga dalam pengadilan sidang, maka gugurlah penetapan talak Hakim. Dan dengan gugurnya penetapan talak itu suami tidak dapat mengajukan lagi permohonan cerai talak dengan alasan yang sama.

- d. Setelah ikrar talak diucapkan oleh suami atau kuasanya dalam sidang untuk itu, maka Hakim akan membacakan putusannya. Dan putusan sidang cerai talak dibuat oleh Hakim dengan penetapan yang isinya menyatakan “Perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan”. Untuk ini tugas Panitera yang terakhir mencatat hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. Terhadap penetapan pengadilan mengenai cerai talak dengan disertai ikrar talak tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

2. Cerai gugat

2.1. Permohonan

- a. Permohonan cerai gugat dilakukan oleh istri atau kuasanya.
- b. Permohonan cerai gugat diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat. Kalau penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, maka gugatan dapat dilakukan di tempat tergugat.

Tetapi kalau penggugat berada di luar negeri, permohonannya diajukan di daerah hukum tempat kediaman tergugat. Dan kalau kedua-duanya berada diluar negeri, permohonan diajukan di tempat perkawinan berlangsung atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- c. Alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan permohonan cerai gugat, yaitu :
 - 1. Suami dijatuhi pidana penjara,
 - 2. Suami mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami,
 - 3. Syqoq yang tidak dapat berdamai.

2.2. Proses persidangan

- a. Pemeriksaan permohonan cerai gugat dilakukan oleh Hakim Majelis. Dan pemeriksaan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak setelah permohonan didaftarkan di Kepaniteraan. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaannya melalui sidang tidak terbuka untuk umum.
- b. Pada sidang pertama Hakim berusaha mendamaikan, karena itu diwajibkan bagi suami istri hadir. Selain itu selama pemeriksaan berlangsung kalau Hakim memandang dapat membahayakan kedudukan para pihak, maka atas permohonan dapat megizinkan suami istri hidup terpisah.
- c. Selama persidangan berlangsung, maka atas permohonan penggugat pengadilan dapat menenntukan :
 - 1. Nafkah yang ditanggung oleh suami,

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak,
 3. Pemeliharaan harta benda hak milik keluarga.
- d. Kalau Hakim memandang sudah cukup bukti dalam sidang pemeriksaan, maka akan diberikan putusan . dan putusan sidang cerai gugat terbuka untuk umum.
3. Cerai dengan alasan zina

Proses persidangan cerai dengan alasan zina dititik beratkan kepada pembuktian. Dan apabila bukti-bukti yang diperlukan tidak cukup maka Hakim dapat memintakan agar pemohon atau termohon mengucapkan sumpah. Kalau sumpah itu dilakukan oleh suami, maka penyelesaian cerai melalui cerai Li'an. Tetapi kalau sumpah itu dilakukan oleh istri, maka penyelesaian cerai melalui proses persidangan cerai gugat.

2.3.4. Biaya perkara

Kalau seseorang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama perlu diketahui lebih dahulu apa saja untuk keperluan itu. Hal ini dimaksudkan agar pemohon dapat mempertimbangkan akan melanjutkan permohonannya atau tidak, sebab suatu permohonan terutama cerai sering tidak memperhatikan kehidupan yang akan datang setelah perceraianya mendapat putusan Hakim. Selain itu biaya untuk hidup lebih lanjut setelah cerai tidak pernah diperhatikan, karena yang berbicara untuk kehendak perceraian kebanyakan hanya melalui emosi aktifnya. Karena itu perlu diketahui pembiayaan apa saja yang harus ditanggung oleh seseorang dalam berperkara di pengadilan. Adapun biaya perkara itu sebagai berikut :

- a. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau tergugat. Dan biaya perkara itu diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.
- b. Pembiayaan meliputi :
 - 1. Kepaniteraan dan biaya materi,
 - 2. Pemanggilan para saksi dan pengambilan sumpah,
 - 3. Pemeriksaan setempat dan tindakan lainnya yang diperlukan,
 - 4. Pemanggilan dan pemberitahuan sidang.
- c. Besarnya biaya perkara dan beban pembiayaannya kepada penggugat atau tergugat dalam berperkara dicantumkan dalam amar penetapan atau putusan pengadilan.

DAFTAR ISTILAH

1. Nama-nama surah yang digunakan :

- Al-Fatihah = Pembukaan
- Al-Baqarah = Sapi betina
- Al-Imran = Keluarga Imran
- An-Nisa = Perempuan-perempuan
- Al-Maidah = Hidangan
- At-Taubah = Taubat
- Al-Anbiya = Nabi-nabi
- Al-Fathh = Kemenangan
- Ash-Shafath = Baris
- Ath-Thalaq = Perceraian
- At-Tahrim = Mengharapkan
- Al-Qiyamah = Kiamat
- An-Nas = Manusia

2. Kata-kata :

- Ahli; istri; anak istri; orang-orang dirumah; yang mempunyai; golongan; yang layak.
- Ahlul-Kitab: orang-orang yang mempunyai kitab agama, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen.
- Al-Haq: kebenaran; yang benar; Tuhan; Wahyu.
- Al-Masjidul Haram: masjid besar di Mekah; masjid yang mulia.
- Amal shalih: amal yang baik pada pandangan Islam termasuk perbuatan mengenai dunia dan akhirat dan bukan ibadah saja.
- Diyat: denda pengganti jiwa.

- Fitnah: percobaan; adzab; kesusahan; bala; sesuatu yang membangkitkan kurusuhan; sesuatu yang memalingkan kepada kejahatan.
- Hijrah: pindah; meninggalkan kaumnya di tempat kediaman.
- Yahudi: orang yang beragama dengan kitab Taurat; pengikut Nabi Musa.
- Kafir: orang yang tidak mau beriman kepada Islam, Yahudi, Nashara atau lainnya.
- Mu'min: orang yang beriman.
- Mu'minin, mu'minin: orang-orang yang beriman.
- Mu'jizat: perkara luar biasa dilakukan oleh nabi atau rasul atas izin Allah untuk membuktikan kebenaran.
- Munafik: perkataan yang tidak sesuai dengan isi hatinya.
- Musyrik: kafir yang menganggap atau menyembah sesuatu selain Allah.
- Musyrikin, musyrikun: orang-orang musyrik.
- Muslim: orang yang beragama Islam.
- Muslimin, muslimun: orang-orang yang beragama Islam.
- Nashara: orang-orang Nashara; orang Kristen.
- Nasrani: seorang Nashara.
- Nuzul: turun.
- Kiamat: kebangkitan; hari yang manusia dibangkitkan dari kubur untuk berkumpul dan untuk diperiksa perhitungan amal masing-masing serta menerima keputusan.
- Quraisy: orang Arab yang berkuasa di Mekah dan sekitarnya; keluarga Nabi Muhammad.
- Rasulullah: utusan Allah.
- Setan: makhluk di waktu mengganggu; iblis; makhluk yang sama kalau tidak mengganggu, dan dapat menakut-nakuti.

- Taubat (tobat): sesal; serik; jera; menyesal atas suatu dosa yang dikerjakan serta berniat tidak akan mengerjakan lagi.

3. Nama-nama bulan :

Bulan 1 = Muharram

Bulan 2 = Safar

Bulan 3 = Rabiul awal

Bulan 4 = Rabiul Tsani

Bulan 5 = Jumadil Ula

Bulan 6 = Jumadil Tsaniyah

Bulan 7 = Rajab

Bulan 8 = Sya'ban

Bulan 9 = Ramadhan

Bulan 10 = Syawal

Bulan 11 = Zulqaidah

Bulan 12 = Zulhijjah

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Hasan – Al Furqon – Tafsir Quran, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
2. A. Rahman Zainuddin – Hak-hak asasi dalam Islam, Media Dakwah, 1979.
3. Asaf. A. A. Fyzee – Pokok-pokok Hukum Islam I, II, Tintamas – Jakarta.
4. Dr. Soebardi, Prof. Harjoso – Pengantar Sejarah dan Ajaran Islam, Binacipta -Bandung, 1983.
5. Dr. Franz von Magnis – Etika Umum, Yayasan Kanisius – 1975.
6. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S. H. – Hukum Waris Indonesia, Sumur Bandung, 1966.
7. Drs. H. Hasbullah Bakry, S. H. – Lembaga Hukum Islam, Pelajar – Bandung.
8. Drs. H. Zahry Hamid – Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Binacipta – Bandung.
9. Drs. H. Zahry Hamid – Peminangan Menurut Hukum Islam, Binacipta – Bandung.
10. Drs. Moh. Sjafaat – Demokrasi dan Ajaran Islam, Sulita – Bandung.
11. Eman Suparman, S. H., M. H. – Intisari Hukum Waris Indonesia, CV Mandar Maju – Bandung, 1991.
12. H. M. K. Bakri – Hukum Pidana Dalam Islam, Ramadhani.
13. H. M. S. Mintaredja, S. H. – Renungan Pembaharuan Pemikiran Masyarakat Islam dan Politik di Indonesia, Permata – Jakarta, 1972.

14. H. Sulaiman Rasjid – Fiqh Islam, Allahirijah – Jatinegara, Jakarta.
15. Joseph Schacht – An Introduction to Islamic Law, Oxford At The Clarendon Press, 1964.
16. Koentjaraningrat – Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT Gramedia – Jakarta, 1981.
17. Nicolas P. Aghnides – Pengantar Ilmu Hukum Islam, AB. Sitti Sjamsijah – Solo.
18. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S. H. – Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV Mandar Maju – Bandung, 1990.
19. Prof. Mr. Dr. Hazairin – Hendak Kemana Hukum Islam, Tintamas – Jakarta, 1960.
20. Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, S.H. – Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, PT Pembangunan – Jakarta, 1963.
21. Purnadi Purwacaraka, S. H., Dr. Soerjono Soekanto, S. H., M. A. – Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni – Bandung, 1979.
22. R. Abdul Djamali, S. H. – Pengantar Hukum Indonesia, CV Rajawali – Jakarta, 1985.
23. Sayid Quth – Masyarakat Islam, Yayasan At-Taufiq, PT Alma'arif – Bandung.
24. T. M. Usman El Muhammady – Pengantar Ilmu Islam, Pustaka Agus Salim – Jakarta, 1964

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Dr. Paisal Burlian, S.H, M. Hum, Penulis sekarang berdomisili di Jln. Sapta Marga Lrg. Pancasila No.61 Rt.51 Palembang. Sehari-hari beraktivitas sebagai tenaga pengajar Tetap Pada Megister Hukum Tata Negara (S.2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Selain dari itu menyempatkan diri sebagai dosen Luar Biasa (LB) di lingkungan Kota Palembang Negeri maupun swasta, antara lain: di, PPS UIN Raden Fatah Palembang, PPS UNSRI Pada Program Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa pada Program Megister Hukum, Universitas Taman Siswa pada Megister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah pada Program Megister Hukum, STIA Satya Negara dan STIE Musi Palembang.

Pendidikan terakhir calon Profesor ini adalah S.3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, diselesaikan pada tahun 2013 dengan kepakaran bidang perundang-undangan (legislasi), dan sekarang menjabat Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Syari'ah, Direktur LKKBH (Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum dan juga sebagai Asesor BAN-PT.

Penulis pernah menulis berbagai buku, jurnal Internasional Scopus dan media massa serta tampil sebagai pemakalah diberbagai seminar dan pelatihan. Karya tulis yang telah diterbitkan berupa buku, antara lain: Patologi Sosial Ditinjau dari Sosiologis, Yuridis dan Filosofis. Sedangkan karya tulis yang dimuat dalam jurnal, antara lain: Tranformation: Historial Analysis Towards Egalitarian Characters, Aspek Hukum dan Teknologi,

Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral, Penulis disamping sibuk menulis juga menyempatkan diri dalam berorganisasi, baik organisasi sosial keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan, antara lain: Wakil Ketuan KOSGORO Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua I Sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Palembang, Ketua Bidang Advokasi Hukum BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Prov. Sumatera, Anggota DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia) PGRI Kota Palembang, Ketua Bidang Pembinaan Umat BAMUKOI (Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir) Pusat,